

**STRATEGI KOMUNIKASI  
PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM  
KASUS PENOLAKAN REKLAMASI  
TELUK BENOA**

**OLEH:**

**Nur Sofyan S.I.Kom., M.I. Kom  
Dr. Suciati, S.Sos., M. Si**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Sofyan, S.I.Kom., M.I.Kom  
NIK : 19890704201704163163  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa isi buku yang berjudul :

### **STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM KASUS PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA**

Benar-benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,



Nur Sofyan, S.I.Kom., M.I.Kom

# **STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM KASUS PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA**

Penulis : Nur Sofyan S.I.Kom., M.I. Kom  
Dr. Suciati, S.Sos., M. Si

Editor : Dr. Suciati, S.Sos., M. Si

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, segala puji syukur atas karunia Illahi senantiasa terpanjatkan dalam semua situasi. Usailah sudah penulis sekaligus peneliti meramu, menulis, mengembangkan dan menyajikan rangkaian pembahasan topik reklamasi ini. Isi buku ini pada dasarnya bertujuan untuk menambah referensi untuk mahasiswa dalam memahami bagaimana model penyelesaian konflik dalam kasus penolakan reklamasi Teluk Benoa Bali.

Buku ini sangat berguna untuk para mahasiswa maupun peneliti yang ingin memahami dan menulis tentang penyelesaian konflik kebijakan dalam rangka mewujudkan harmonisasi. Hal ini mengingatkan bahwa kasus-kasus reklamasi yang terjadi di dunia ini tidak selamanya bisa sukses. Indikasi ini dapat dilihat dari respon masyarakat setempat yang melakukan penolakan melalui demonstrasi-demonstrasi yang menuntut pembubaran proyek reklamasi. Tentu saja penolakan ini didasarkan pada analisis dampak lingkungan yang ternyata tidak berpihak pada kehidupan masyarakat setempat.

Berkaca dari reklamasi Jakarta dan reklamasi Teluk Benoa Bali yang bisa dikatakan gagal menjadi inspirasi penulis untuk memaparkan sebab-sebab persoalan tersebut muncul, proses perjalanan penolakan masyarakat, serta langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk penyelesaian

konflik. Pada bagian akhir bab buku ini, penulis memaparkan model penyelesaian konflik serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi Bali dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan.

Kiranya kekurangan dan kekhilafan peneliti adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Saran dan kritik membangun dari pembaca akan peneliti terima dengan tangan terbuka. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018

penulis

# DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi

## BAB I

### LATAR BELAKANG PENOLAKAN REKLAMASI TELUK

BENOA .....	1
LATIHAN.....	11

## BAB II

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ...	12
LATIHAN.....	18

## BAB III

BALI MANDARA (BALI AMAN, DAMAI, DAN SEJAHTERA) .....	19
A. TOPOGRAFI, AGAMA, ADAT DAN BUDAYA BALI .....	19
B. KONSEP TRI HITA KARANA .....	23
C. PROVINSI BALI DALAM KONSEP PEMBANGUNAN BALI MANDARA .....	31
LATIHAN.....	51

## BAB IV

### STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM MENGATASI PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA..52

A. Reklamasi Dalam Perspektif Pemprov Bali dan Masyarakat Bali .....	52
1. Reklamasi Dubai: Palm Jumeirah .....	52
2. Reklamasi Singapura .....	54
3. Reklamasi Mongolia .....	55
4. Reklamasi Belanda.....	56
5. Reklamasi Hongkong .....	57

6. Reklamasi China .....	58
7. Reklamasi Korea Selatan.....	59
8. Reklamasi Jepang.....	60
B. Strategi Komunikasi Pemprov Bali Dalam Kasus Teluk Benoa .....	68
C. Peran Kearifan Lokal Bali .....	90
LATIHAN.....	101
<b>BAB V</b>	
<b>ANALISIS KRITIS TERHADAP STRATEGI KOMUNIKASI PMPROV</b>	
<b>BALI.....</b>	<b>102</b>
A. Analisis Strategi Komunikasi Berdasarkan Tujuan .....	110
B. Analisis Strategi Komunikasi Berdasarkan Prinsip.....	117
C. Analisis Komunikasi Berdasarkan Metode.....	123
D. Analisis Penggunaan Pesan dalam Strategi Komunikasi Pemprov Bali .....	125
E. Langkah-Langkah Pemprov dalam Mencapai Efektivitas Strategi Komunikasi.....	127
F. Langkah-Langkah Pemprov Bali dalam Pelaksanaan Strategi Komunikasi.....	131
LATIHAN .....	139
<b>BAB VI</b>	
<b>SIMPULAN DAN IMPLIKASI .....</b>	<b>140</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>
<b>PERPRES NO.51 TH.2014.....</b>	<b>147</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>160</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>164</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>167</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gb 1: Reklamasi Jepang yang Sukses .....	3
Gb 2: Gegap Gempita Masyarakat Menolak Perpres 51th2014	5
Gb 3: Masyarakat Bali Menolak Reformasi.....	6
Gb 4: Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kawasan Penting yang Terdampak Jika Reklamasi terlaksana di Teluk Benoa .....	9
Gb 5: Peta Bali .....	19
Gb 6: Kegagalan Relamasi Jakarta Karena Amdal tidak Matang .....	30
Gb 7: Jalan Tol Bali Mandara Menghubungkan antara Benoa, Ngurah Rai Tuban, dan Nusa Dua .....	32
Gb 8: Rumah Sakit Bali Mandara .....	40
Gb 9: Siswa-siswi SMA dan SM Bali Mandara .....	42
Gb 10: Posisi Teluk Benoa Bali .....	50
Gb 11: Pulau Pudut.....	50
Gb 12: Teluk Benoa dalam Pro dan Kontra .....	50
Gb 13: Perencanaan Proyek Dalam Relamasi Teluk Benoa .....	51
Gb 14: Reklamasi Dubai .....	53
Gb 15 : Reklamasi Singapura .....	54
Gb 16 : Reklamasi Mongolia .....	55
Gb 17: Reklamasi Belanda .....	56
Gb 18 : Reklamasi Hongkong.....	57
Gb 19: Reklamasi China .....	58
Gb 20: Reklamasi Korea Selatan .....	59
Gb 21 : Reklamasi Jepang.....	61
Gb 22 :Insight With Desi Anwar-Polemik Reklamasi Teluk Benoa Bali.....	64
Gb 23 :Insight With Desi Anwar-Polemik Reklamasi Teluk Benoa Bali.....	65

Gb 24:Perlawanan Panjang Warga Bali Menolak Reklamasi Teluk Benoa .....	66
Gb 25: DPRD Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa .....	66
Gb 26: Simakrama Sebagai Forum Komunikasi Pemprov Bali dan Masyarakat.....	69
Gb 27: Mandalika NTB .....	71
Gb 28 : Forbali Tolak Reklamasi Teluk Benoa .....	75
Gb 29 :Mangku Wayan Suteja (Aktivis For Bali) Berbicara Tolak Reklamasi.....	89
Gb 30 : Pakaian Udeng Sebagai Salah Satu Bentuk Kearifan Lokal Bali .....	91
Gb 31: Pelantikan kelian Adat .....	94
Gb 32 :Massa dari 39 Desa Adat di Bali Meminta Pemerintah Untuk Membatalkan .....	97
Gb 33 : Reklamasi Teluk Benoa Bali, Pro dan Kontra Tak Kunjung Usai.....	97
Gb 34: Tri Hita Karana.....	101
Gb 35 : Deklarasi Desa Pakraman Denpasar Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Puluhan Ribu Massa Tumpah Ruah di Pusat Kota.....	107
Gb 36 :Warga Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Bali Siap Macet	108
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Tabel I : Reklamasi Sukses di 8 Negara dan Indonesia.....	103
Tabel 2 : Analisis Kegagalan Reklamasi Teluk Benoa .....	108
Tabel 3 : Reklamasi Dilihat dalam Perspektif Pemerintah dan Masyarakat .....	112
Tabel 4 : Efektivitas Pesan Persuasif .....	126
Tabel 5 : Efektivitas Strategi Komunikasi Pemprov Bali.....	128
<b>DAFTAR BAGAN</b>	
Bagan 1: Strategi Komunikasi Pemprov Bali .....	139

# BAB I

## LATAR BELAKANG PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA

**T**ujuan sebuah reklamasi menurut modul Terapan Pedoman Perencanaan tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007), jelas dikatakan bahwa pemanfaatan kawasan baru tersebut bisa diwujudkan sebagai kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi kawasan wisata terpadu. Namun demikian, sebuah reklamasi mungkin sekali menimbulkan kerugian pada beberapa hal.

Adapun kerugiannya antara lain:

- a. Terjadinya perubahan ekosistem pada lingkungan, seperti perubahan pada pola arus erosi pada pantai, sehingga dapat mengakibatkan banjir.
- b. Berdampak buruk pada sistem drainase dan perubahan hidrodinamika yang memiliki dampak negatif kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
- c. Mengganggu lingkungan sekitar karena adanya galian yang dilakukan dengan cara pengeprasan bukit maupun pulau-pulau yang tidak memiliki penghuni.
- d. Beberapa keanekaragaman hayati akan punah seperti hilangnya *species mangrove*, punahnya species ikan, kerang laut, dan sebagainya.

Beberapa kasus penolakan reklamasi di Indonesia bukannya tanpa alasan. Penolakan yang terjadi reklamasi teluk Jakarta antara lain dilakukan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Sebagai alasan penolakan adalah beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh reklamasi tersebut. Singkatnya reklamasi akan menimbulkan pencemaran lingkungan, banjir, dan merugikan nelayan karena mereka akan kehilangan wilayah tangkapan dan justru menguntungkan pebisnis (Suara.com, 4 Februari 2016).

Tidak sedikit negara di dunia ini yang sukses melakukan reklamasi. Singapura, Dubai, Korea Selatan, Jepang, dan China, adalah lima negara yang disebut-sebut sukses dalam melaksanakan reklamasi (liputan 6.com, 6 April 2016). Singapura memperluas wilayahnya hingga 70 km persegi untuk menambah kawasan perumahan, industri dan rekreasi (2001). Bahkan negara ini memiliki *concept plant* hingga 50 tahun mendatang. Dubai memperluas wilayahnya hingga 250 km persegi untuk tujuan kepariwisataan. Korea Selatan melakukan reklamasi di Song Do yang memiliki luas 38 ribu hektare untuk tujuan Bandar Internasional dan kawasan industri. Jepang melalui kawasan Kyoto memperluas 10 km persegi untuk Bandara Internasional. Adapun China melakukan reklamasi di Chao Fe Dian, kawasan pantai Timur Beijing sebagai kawasan industri.

## Gb 1: Reklamasi Jepang yang sukses



Di Indonesia, reklamasi teluk Benoa Bali sampai sekarang belum ada titik terang tentang disetujuinya upaya pemerintah ini. Beberapa penolakan gencar dilakukan oleh masyarakat adat dengan alasan adanya kerugian yang akan mereka derita. Aksi penolakan reklamasi diikuti oleh ribuan warga dari 27 desa Adat yang turun ke jalan dengan membawa ogoh-ogoh raksasa untuk menyatakan penolakan. Koordinator aksi di Bali yaitu I Wayan Gendo Suardana mengatakan bahwa warga masih meminta agar pemerintah menghentikan rencana tersebut, termasuk menghentikan proses Amdal dan mencabut Perpres No 51 th 2014 yang menjadi dasar hukum untuk mengatur soal reklamasi. Penolakan ini ditanggapi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti dengan mengatakan bahwa keputusan akan menunggu sampai amdal proyek reklamasi selesai ([www.bbc.com](http://www.bbc.com), akses Februari 2017).

Beberapa alasan urgensi yang menolak reklamasi teluk Benoa yang disampaikan oleh masyarakat Adat kepada pemerintah antara lain penyelamatan hutan mangrove,

penghentian pendangkalan, penyelamatan habitat/ekosistem teluk dan revitalisasi atau degradasi. Setelah cukup lama rupanya tidak terlihat upaya-upaya secara langsung dari PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) investor yang berencana mereklamasi Teluk Benoa. TWBI melakukan upayanya melalui kementerian Koordinator politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Sebelum penerbitan Perpres 51 Tahun 2014, Gubernur Bali telah menerbitkan SK Reklamasi untuk PT. Tirta Wahana Bali International (TWBI). Penerbitan SK reklamasi tersebut diduga melanggar Perpres No. 45 Tahun 2011 dan Perpres 122 Tahun 2012 yang mengatur bahwa rencana reklamasi tidak dapat dilakukan di kawasan konservasi. Penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 yang mengubah Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi non konservasi diduga sebagai upaya pemutihan pelanggaran tata ruang, oleh karenanya penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 dianggap bertentangan dengan Pasal 91, PP No. 15 tahun 2010. Penerbitan Perpres 51 tahun 2014 juga tidak melalui proses peninjauan kembali sebagaimana diatur didalam PP No. 15 tahun 2010 sehingga Perpres 51 Tahun 2014 harus segera dibatalkan Presiden.

Selain alasan yuridis, penolakan terhadap rencana reklamasi yang tidak pernah henti sejak tahun 2013 dapat dijadikan sebagai modal besar bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 dan mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Untuk itu, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI), menyatakan:

1. Meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA dengan memberlakukan kembali Perpres 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan SARBAGITA

2. Meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera membatalkan proses AMDAL di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena proses-prosesnya mengabaikan aspirasi penolakan masyarakat Bali terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.
3. Meminta Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk segera mencabut izin lokasi yang telah diberikan kepada PT TWBI pada era kepemimpinan presiden SBY dan menghentikan seluruh proses perizinan reklamasi Teluk Benoa, serta mendorong Menteri kelautan dan perikanan untuk tidak memberi celah kepada investor untuk melakukan upaya-upaya reklamasi Teluk Benoa.
4. Mengembalikan fungsi Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi dengan menerapkan kebijakan-kebijakan konservasi di kawasan perairan Teluk Benoa.

(Sumber: <https://www.google.co.id/search?q=peraturan+presiden+51+tahun+2014&oq=perpres+51+tahun+2014&aqs=chrome.3.69i57j0l5.20300j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> akses 21 September 2018)

**Gb 2: Gegap gempita masyarakat menolak perpres 51 th 2014**



### Gb 3: Masyarakat Bali menolak reformasi



Undangan upaya damai dari TWBI ini diungkap oleh Koordinator Forbali I Wayan Gendo Suardana melalui surat no.Un-422/polhukam/De-III/HK.04.04.I//2016 tertanggal 8 November 2016. Forbali menolak undangan dengan alasan bahwa peserta terdiri dari lembaga masyarakat yang mendukung TWBI sedangkan beberapa lembaga penegakan hukum seperti YLBHI (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dan PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia) tidak diundang ([www.forbali.org](http://www.forbali.org), akses Februari 2017).

Keputusan *paruman* Desa Pakraman Denpasar menolak reklamasi Teluk Benoa dengan alasan yakni, menjunjung tinggi Tri Hita Karana, mendukung kawasan Teluk Benoa adalah kawasan suci, mendesak agar kawasan Teluk Benoa dikembalikan menjadi kawasan konservasi, mendesak para pengambil kebijakan di pusat dan Bali mendengarkan aspirasi masyarakat bali, dan menuntut pencabutan Perpres No. 51 tahun 2014 ( [http://www.walhibali.org/category/ tolak-reklamasi-teluk-benoa](http://www.walhibali.org/category/tolak-reklamasi-teluk-benoa)).

Dikutip dari Liputan6.com, pada saat perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Pariwisata dan Budaya Bali berunjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Bali, Wakil Rakyat menyampaikan bahwa DPRD Provinsi memberikan izin atas dilaksanakannya reklamasi, namun dengan persyaratan yakni menyesuaikan hasil kajian serta dasar hukum yang jelas. Di hadapan perwakilan massa aksi dalam dialog, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Sugawa Korry mengatakan, jika dasar hukum dan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) keduanya jelas, maka reklamasi dapat dilaksanakan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014, apabila peraturan ini tetap berjalan, maka reklamasi Teluk Benoa tetap harus dilaksanakan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali menugaskan 2 hal kepada Panitia Khusus (Pansus) dalam Pembahasan Ranperda Arah Peraturan Zonasi (APZ) DPRD Provinsi Bali. *Pertama*, Pansus Pembahasan Ranperda APZ segera melakukan konsultasi ke Jakarta terkait Perpres 51/2014. *Kedua*, Pansus Pembahasan Ranperda APZ juga ditugaskan untuk mengonsultasikan masalah amdal ke pusat. Sugawa memberikan peringatan kepada pendukung reklamasi Apabila Perpres 51 dicabut oleh Pemerintah Pusat, serta hasil amdal negative, maka tidak bisa dilakukannya reklamasi pada Teluk Benoa, begitupun sebaliknya (<http://news.liputan6.com/read/2217360/dprd-bali-izinkan-reklamasi-teluk-benoa-asalkan>, akses Januari 2017).

Permohonan perpanjangan izin lokasi reklamasi Teluk Benoa oleh PT. Tirta Wahana Bali International (TWBI), sudah disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). PT.TWBI masih bisa berusaha untuk mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa. Adapun menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan permohonan izin tersebut disetujui, karena aturan yang ada mengharuskan kementeriaannya mengambil kebijakan tersebut. Dalam Perpres tentang reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil itu, diatur bahwa penolakan permohonan perpanjangan izin bisa dilakukan KKP, dengan jawaban tertulis. Sedangkan bila permohonan dalam 20 hari tidak ditanggapi, maka KKP dianggap menyetujui dan wajib memperpanjang izin tersebut. Izin lokasi tersebut bukanlah izin untuk melakukan reklamasi, yakni penimbunan laut untuk dijadikan daratan. Izin lokasi adalah izin untuk mengklaim sebidang lahan di laut. Sedangkan untuk menimbun laut, hal itu dapat dilakukan dengan bermodal izin pelaksanaan, yang juga berhak dikeluarkan oleh KKP. Namun izin pelaksanaan baru bisa dikelularkan bila proyek tersebut sudah mengantongi izin analisa Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL (<http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/26/susi-jelaskan-kenapa-izin-lokasi-reklamasi-teluk-benoa-diperpanjang>).

Kericuhan ini juga mengundang perhatian dunia pendidikan, terutama universitas terbesar di Bali, yaitu Universitas Udayana. Universitas Udayana melakukan pengkajian pada perairan strategis di Bali Selatan yang dibiayai oleh PT. Tirta Wahana Bali International tersebut dengan nilai kontrak Rp 1,094 Miliar.

Hasil pengkajian tersebut secara tegas disampaikan oleh Senat Universitas Udayana atas tidak layaknya dilaksanakan reklamasi di Teluk Benoa.

([http://www.mongabay.co.id/2013/09/03/kajian-universitas-udayana-reklamasi-teluk-benoa-tidak-layak-diteruskan/akses Januari 2017](http://www.mongabay.co.id/2013/09/03/kajian-universitas-udayana-reklamasi-teluk-benoa-tidak-layak-diteruskan/akses%20Januari%202017))

**Gb 4: Taman Hutan Raya Ngurah Rai, kawasan penting yang terdampak bila Reklamasi terlaksana di Teluk Benoa (Foto: Ni Komang Erviani)**



Hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Udayana telah menjawab pertanyaan masyarakat seputar layak tidaknya rencana proyek reklamasi Teluk Benoa seluas 838 hektar yang hendak dilakukan PT. Tirta Wahana Bali International.

Institusi lain turut melakukan pengkajian atas kasus ini salah satunya adalah Institut teknologi Surabaya (ITS). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya juga menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa, Bali.

(<https://m.tempo.co/read/news/2016/03/13/206753147/its-tolak-tawaran-kajian-reklamasi-teluk-benoa>, akses Febru-ari 2017).

Beberapa contoh reklamasi yang terjadi di Indonesia adalah reklamasi pantai di Jakarta Utara dan reklamasi teluk Benoa Bali. Meski pada awalnya, reklamasi pantai di Jakarta utara tidak menimbulkan kontradiktif, tetapi pada akhirnya upaya tersebut mendapatkan penentangan dari masyarakat sekitar. Demikian pula dengan reklamasi teluk Benoa Bali, hingga saat ini juga belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat setempat. Sikap kontra tersebut tentu saja muncul karena alasan kerugian yang diderita oleh masyarakat sekitar.

Terdapat 4 aspek yang menjadi dasar tidak diteruskannya rencana reklamasi Teluk Benoa, diantaranya adalah aspek lingkungan, teknis, budaya, dan ekonomi finansial. Keputusan final diambil setelah perdebatan antara anggota senat Universitas Udayana. Adapun beberapa alasan urgensi yang menolak reklamasi teluk Benoa yang disampaikan oleh masyarakat Adat kepada pemerintah. Beberapa alasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- (a) Apakah reklamasi akan menyelamatkan hutan mangrove di teluk Benoa.
- (b) Benarkah proyek reklamasi akan menghentikan pendangkalan.
- (c) Benarkah proyek reklamasi akan menyelamatkan habitat/ ekosistem teluk Benoa.
- (d) Apakah reklamasi teluk benoa sebagai revitalisasi atau degradasi.

Dengan demikian hal ini selaras dengan kebutuhan lembaga pemerintah dalam rangka menciptakan integrasi nasional dan harmoni sosial (*Nation integration & social harmony*). Hal ini termasuk dalam upaya mengoptimalkan strategi komunikasi Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelesaikan konflik penolakan reklamasi Teluk Benoa tahun 2015-2016. Selama ini upaya strategi komunikasi oleh pemerintah menfokuskan perhatian pada menyelesaikan konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah beredudukan sebagai otoritas yang memegang penuh segala upaya untuk menyelesaikan konflik. Konflik yang bersifat vertikal belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang khusus dalam satu kajian. Dengan demikian isi buku ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi resolusi konflik yang diambil pemerintah melalui strategi komunikasi yang dilakukan. Strategi komunikasi sebagai upaya menyelesaikan konflik tidak semata-mata hanya melibatkan masyarakat Bali, melainkan juga pemerintah pusat. Masyarakat Provinsi Bali maupun pemerintah saling berhadapan dan masing-masing memiliki argumentasi hukum yang dijadikan rujukan, sehingga diperlukan upaya perencanaan dan komunikasi strategis untuk menyelesaikan konflik yang sudah berjalan tiga tahun tersebut.

### **LATIHAN**

1. Identifikasikan stakeholder dalam persoalan reklamasi Teluk Benoa Bali tersebut. Serta buatlah *mapping stakeholder* untuk mempermudah pendekatan penyelesaian konflik tersebut.

## BAB II

### STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

**B** eberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan strategi komunikasi antara lain: “Peran Komunikasi Persuasif dalam Penyelesaian Konflik Antara nelayan”. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah ini memfokuskan perhatian pada peran komunikasi persuasif dalam upaya menyelesaikan konflik yang terjadi antar masyarakat nelayan tradisional dengan masyarakat nelayan modern (<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/3343> akses tanggal 8 April 2017). Adapun penelitian kedua yang menjadi inspirasi bagi peneliti adalah “*Communication strategies for managing coastal fisheries conflict in Bangladesh*” yang di muat pada jurnal internasional “Science Direct” kategori *Ocean & Coastal Management* 92 (2014) 65-73. Kajian dalam penelitian ini memberikan perhatian pada pengelolaan sumber daya perikanan yang dinilai menyisakan banyak persoalan. Setidaknya permasalahan ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, konflik kepentingan, nilai kebudayaan, cara eksploitasi dan kekuasaan. (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569114000052>, *Ocean & Coastal Management* vol. 92 (2014) 65-73, akses tanggal 9 April 2017).

Berbagai strategi komunikasi berusaha dilakukan manusia dalam mencapai efektivitas komunikasi. Meski bagaimanapun, sebuah strategi tetap bertumpu pada

komponen komunikasi yang terdiri atas komunikator, pesan, media, komunikan, *noise*, dan efek. Menurut Onong Uchjana Effendy (2003) dalam buku berjudul "*Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*" menyatakan bahwa "Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Taktik operasional secara taktis harus dapat dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondisi". Hal ini senada dengan ungkapan Anwar Arifin (1994) dalam buku "*Strategi Komunikasi*" menyatakan bahwa "sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan kemungkinan dihadapi dimasa depan, guna mencapai efektivitas.

Strategi komunikasi ini memiliki fungsi utama yaitu memperluas pesan atau informasi sehingga dapat dihasilkan komunikasi yang persuasif, instruktif, sistemik, dan yang pasti sangat informatif untuk mendapat hasil optimal. Pencapaian hasil yang optimal akan dapat berhasil dengan melakukan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi. Kedua hal ini menjadi syarat mutlak dari sebuah strategi komunikasi sebagai panduan yang menunjukkan operasional teknis yang harus dilakukan. Tentu saja bentuk pendekatannya akan berbeda sesuai dengan konteks waktu dan tempat.

Dalam proses perubahan sosial, pesan-pesan yang terkandung dan dikirim oleh sumber kepada penerima itu berupa ide-ide pembaruan atau inovasi. Namun, unsur terpenting dalam sebuah komunikasi sebelum melakukan transfer pesan adalah melakukan perencanaan yang matang dalam komunikasi agar tidak terdapat *miss communication*. Hafied Cangara (2013) "*Perencanaan dan Strategi komunikasi*" mengungkapkan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang menetapkan kemana kita harus pergi dengan mengidentifikasi syarat apa yang harus dipenuhi untuk sampai ketempat tersebut dengan cara yang paling efisien dan efektif, atau dengan kata lain perencanaan sebagai penetapan spesifikasi tujuan yang ingin dicapai termasuk dengan cara-cara apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menyusun perencanaan yang ideal untuk mendapatkan suatu perencanaan yang baik, maka diperlukan beberapa prinsip yang mendasari rencana tersebut:

- a) Prinsip partisipatif ialah sebuah rencana yang ideal harus dapat mendorong terciptanya partisipatif, baik dari pengelola maupun *stakeholder* yang menjadi target sasaran perencanaan tersebut.
- b) Prinsip kesinambungan ialah sebuah perencanaan dibuat tidak hanya untuk sesaat, melainkan harus mempertimbangkan proses kelanjutannya secara berkesinambungan, artinya rencana harus memiliki perhitungan bahwa perencanaan ini memiliki kelanjutan setelah dilakukan untuk jangka waktu tertentu.

c) Prinsip holistik artinya menyeluruh dan tidak disusun berdasarkan unit-unit. Perencanaan tidak hanya dilihat dari satu sisi tetapi juga harus dilihat dari aspek dan keutuhan konsep secara keseluruhan.

Dalam kerangka yang lebih luas perencanaan komunikasi sangat diperlukan untuk menyusun strategi agar program yang berskala nasional bisa berhasil Effendi, (2003). Pendapat John Middleton dalam Hafied Cangara (2013) menyatakan bahwa perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian untuk mencapai tujuan organisasi dengan menyesuaikan sumber daya komunikasinya. Tentunya sumber daya ini tidak hanya komunikasi antar pribadi atau media massa saja namun hal yang ditekankan disini yakni adanya inovasi keterampilan-keterampilan antar individu dan kelompok pada ruang lingkup pengembangan tugas dari sebuah organisasi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Robin Mehall (dalam Cangara, 2013) menyatakan bahwa perencanaan komunikasi adalah sebuah catatan penggambaran mengenai sub-sub tugas yang harus dilakukan. Perencanaan komunikasi ini melibatkan penjelasan mengenai kepada siapa dan oleh siapa program komunikasi ini ditujukan, dengan alat dan cara apa dapat dilakukan agar dapat mencapai sebuah tujuan, berapa lama estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, hingga bagaimana mengevaluasi (mengukur) hasil yang diperoleh dari perencanaan program komunikasi tersebut.

Hal tersebut dipertegas oleh Quinn (dalam Ruslan, 2002) tentang efektivitas sebuah strategi dijalankan akan sangat bergantung pada beberapa hal yaitu *pertama*, adanya tujuan yang jelas dan bisa dipahami, meskipun tidak harus dibuat secara tertulis. *Kedua*, memelihara inisiatif dengan jalan menjaga kebebasan bertindak dan memperkaya

komitmen, bukan bereaksi terhadap suatu peristiwa. Ketiga, konsentrasi, untuk menentukan sesuatu tergantung waktu dan upaya yang besar. *Keempat, fleksibilitas* yakni diartikan sebagai strategi yang dilengkapi penyangga dan dimensi fleksibilitas. *Kelima*, kepemimpinan yang komit dan penuh koordinasi. *Keenam*, kejujuran, strategi yang dipersiapkan untuk menjaga kerahasiaan dan kecerdasan intuisi menyerang lawan yang tidak diduga. *Ketujuh*, keamanan, strategi yang mengamankan keseluruhan *operational* organisasi (Ruslan : 2002).

Kemantapan dalam melaksanakan strategi komunikasi, dipengaruhi oleh sejauhmana program dipertautkan dengan komponen-komponen komunikasi yang terdiri atas komunikator, pesan, media, komunikan dan efek. Oleh karenanya, harus memperhitungkan faktor-faktor baik pendukung maupun penghambat dalam penentuan strategi komunikasi. Menurut Effendy dalam bukunya Teori, Ilmu, dan Filsafat Komunikasi, menerangkan bahwa setiap komponen komunikasi memiliki pendukung dan penghambat diantaranya, sasaran komunikasi, faktor kondisi dan situasi, faktor pemilihan media, tujuan penyampaian pesan, komunikator, daya Tarik sumber, dan kredibilitas sumber (Effendy : 2003).

Managemen komunikasi sangat identik dengan interaksi sosial. Ada kalanya kita harus mampu untuk memposisikan diri dengan tepat dalam situasi tentunya, kita juga harus mampu menghadapi dan menjalin kerjasama dengan orang lain tanpa mencampurnya dengan urusan pribadi. Ini merupakan sebagian alasan diperlukannya sikap profesional dalam diri kita masing-masing. Konsep managemen dalam

perspektif ilmu komunikasi pada hakikatnya dipahami sebagai proses mempengaruhi orang lain. Selain itu, konsep manajemen komunikasi juga memberi saran kepada kita bahwa kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik bukan hanya sebagai hal yang sudah melekat dalam diri kita saja, melainkan sebagai suatu hal yang dapat kita pelajari dan kita kembangkan. Sebagai contohnya, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam komunikasi agar dapat menjadi seorang komunikator yang memiliki kredibilitas.

Disinilah letak kegunaan mempelajari manajemen komunikasi yang efektif. Manajemen komunikasi menurut Michael Kaye (1994) adalah bagaimana individu atau manusia mengelola proses komunikasi melalui penyusunan kerangka makna dalam hubungannya dengan orang lain dalam berbagai lingkup komunikasi dengan mengoptimalkan sumber daya komunikasi dan teknologi yang ada. Komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam manajemen karena proses manajemen baru terlaksana, jika komunikasi dilakukan.

Proses komunikasi dapat dilihat dari unsur-unsur formula Lasswell yaitu *Who* (siapa pengirimnya/ komunikator), *Say What* (apa yang dikatakan/pesan), *In Which Channel* (saluran komunikasi apa yang digunakan/media), *What Effect* (apa akibat yang ditimbulkan/efek) (Effendi, 2003). Disamping itu untuk melakukan komunikasi yang efektif, dilakukan dengan menganalisa, menyalahkan, menghakimi, menasehati, dan menginterogasi, serta dibutuhkan keterampilan mendengarkan dan bertanya. Dalam proses berkomunikasi, seseorang harus mampu mendengarkan dan memahaminya dengan baik. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan

yang saling memiliki keterkaitan dan mengarah pada suatu solusi. Sehingga tujuan utama dalam komunikasi yang efektif adalah sebuah *win-win solution*. Tak ada satupun orang yang mau disalahkan. Inilah konsep dasar dari komunikasi efektif.

Berdasarkan beberapa teori yang diungkapkan oleh para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen komunikasi ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengendalian faktor-faktor komunikasi seperti sumber, pesan, media, penerima, efek, dampak, dan lingkungan dalam konteks intrapersonal, interpersonal, organisasi dan massa agar efektif dan efisien. Dalam manajemen komunikasi harus jelas mengenai rencana yang dirancang kepada siapa yang ditujukan, dan apa yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta bagaimana jika rencana tersebut tidak berjalan lancar sesuai rencana.

#### **LATIHAN**

1. Analisis bagaimana pendekatan strategi komunikasi yang diterapkan pada reklamasi Teluk Benoa, dan berikan alasan mengapa penyelesaian konflik reklamasi memerlukan pendekatan strategi komunikasi yang efektif?
2. Tahapan apa saja yang bisa dilakukan dalam perspektif komunikasi strategis guna penyelesaian konflik reklamasi Teluk Benoa Bali?

# BAB III

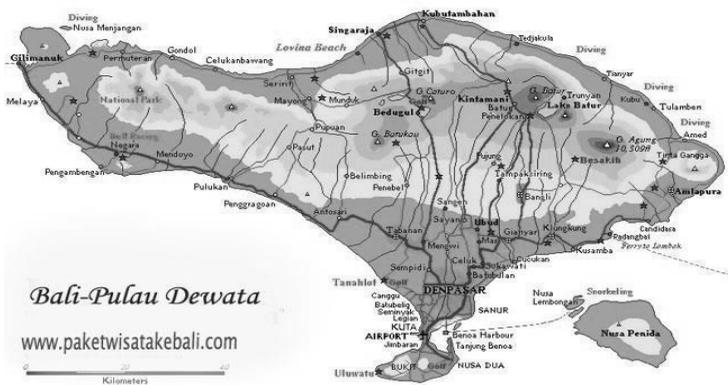
## BALI MANDARA

### (BALI AMAN, DAMAI, DAN SEJAHTERA)

#### A. Topografi, Agama, Adat dan Budaya Bali

**B**ali merupakan sebuah provinsi yang berada di Indonesia bagian tengah. Dimana Bali, terkenal akan kekayaan alam, keindahan alam, dan juga budaya yang masih terjaga hingga sekarang. Luas provinsi Bali yang tak sebesar Pulau Jawa nyatanya malah membuat provinsi ini banyak menjadi tujuan destinasi wisata dalam maupun luar negeri. Luas provinsi Bali sendiri sekitar 5.636,66 km<sup>2</sup> dengan pembagian wilayah Jembrana 841.80, Tabanan 839.33, Badung 418.52, Gianyar 368.00, Klungkung 315.00, Bangli 520.81, Karangasem 839.54, Buleleng 1.365.88, dan Denpasar 127.78. Dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Hindu sebanyak 3.247.283 jiwa (<http://www.baliprov.go.id/v1/topographi>, akses tanggal 30-6-2018, pukul 11: 42 WIB).

Gb 5: Peta Bali



Sebagian besar wilayah merupakan daerah pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Dari rantai pegunungan tersebut membuat Pulau Bali secara geografis terbagi menjadi dua wilayah yaitu Bali Utara dengan dataran rendah dan sempit dengan Bali Selatan yang mempunyai dataran yang luas dan landai. Bali memiliki ciri geografi yang memiliki kekhasan alam yang indah berupa pegunungan, garis pantai serta kaya akan warisan budaya. Sebagai salah satu provinsi dengan keindahan alam yang mempesona membuat Bali menjadi salah satu provinsi di Indonesia dengan tujuan wisatawan baik asing maupun domestik. Jika dilihat dari peta geografis provinsi ini memiliki 6 kabupaten dan satu kota. Hal inilah yang membuat Bali memiliki konsep pembangunan pariwisata yang berbeda dari provinsi Lain. Sebagaimana penulis kutip dari buku “Bali Mandara”, konsep pariwisata budaya mengantarkan pembangunan daerah Bali berbeda dengan daerah lain.

Menurut Putra (Putra : 2017), dengan segala kemudahan aksesnya pada perkembangan era global hal ini membawa paradok, selain memberikan kemudahan namun turut memberikan berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Pada perubahan globalisasi ini setiap unsur pemerintahan dituntut untuk siap menghadapi perubahan tersebut. Bila tidak siap, hal ini seperti yang tergambar pada apa yang terjadi di Bali sekarang. Gemerincingnya dolar atas kemajuan pariwisata di Bali yang merupakan pulau Surga tidak berpengaruh atas kemakmuran seluruh masyarakat Bali (Putra, 2017).

Kondisi geografi yang memiliki sumberdaya alam yang mempesona diharapkan sejalan lurus dengan peningkatan kualitas hidup sumberdaya manusia baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Bali memiliki eksotisme keindahan alam yang memukau. Di sisi yang lain provinsi ini dihadapkan pada pembangunan global maupun akulturasi budaya yang sangat kuat. Masyarakat Bali bertumbuh seiring datangnya wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Pembangunan yang mengedepankan sisi ketahanan nasional, baik ketahanan pangan, ketahanan ideologi, ketahanan sipil semua menjadi dasar peletakan pembangunan manusia yang seiring dengan tantangan global yang dihadapi. Provinsi Bali adalah wadah yang sangat diminati untuk dikunjungi sebagai tempat sakral, wisata, maupun warisan kebudayaannya.

Gunung Agung yang di lerengnya terdapat Pura Besakih merupakan pura terbesar di Pulau Bali. Pura tempat pemeluk agama hindu melakukan ritual dan sembahyang kepada penciptanya. Istana Taman Ujung di wilayah Karang Asem yang menyimpan keindahan bangunan kerajaan Bali masa lalu. Pura Ulundanu, Danau Beratan, Tirta Gangga, Tirta Empul semuanya merupakan rangkaian dari pemberian yang maha kuasa untuk Bali dan untuk Indonesia. Disamping masih banyaknya garis pantai yang indah dengan beberapa titik suci yang sangat disakralkan bagi pemeluk agama Hindu khususnya masyarakat Bali. Bali menghormati sesama, Bali menghormati alam dan Bali menghormati sang pencipta alam raya.

Dengan mayoritas masyarakat memeluk agama Hindu, mereka percaya bahwa bumi dan segala isinya merupakan karunia dari Tuhan yang bisa dimanfaatkan dan dilestarikan. Di dalam agama Hindu juga percaya ada tiga dewa tertinggi yang disebut Trimurti, yaitu *pertama* adalah Dewa Brahma sebagai utusan Tuhan dalam menciptakan alam semesta. *Kedua* adalah Dewa Wisnu yang dianggap sebagai pemelihara semesta dan segala ciptaan Brahma. Dewa Wisnu akan turun jika di dunia terjadi banyak kejahatan. *Terakhir* adalah Dewa Siwa, yang tugasnya adalah sebagai dewa yang bisa merusak segala ciptaan Brahma yang sudah rusak. Tidak hanya tiga dewa itu saja, namun masih banyak dewa-dewa lain yang dipercaya umat Hindu (<http://www.baliprov.go.id/v1/agamaadatbudaya>, akses tanggal 30-6-2018)

Dengan luas wilayah Pulau Bali, nyatanya Bali mempunyai berbagai macam kebudayaan yang ditinggalkan oleh leluhur yang bisa dijadikan daya tarik, bukan hanya untuk wisatawan saja namun juga bagi warga lokal. Sejumlah tradisi yang ada di Bali diantaranya:

1. Tradisi Mekare-kare.

Tradisi ini digelar digelar saat ngusaba kapat (Sasih Sambah). Ritual ini dilakukan bertujuan untuk menghormati Dewa Perang atau Dewa Indra yang merupakan Dewa tertinggi bagi umat Hindu di Tenganan. Adapun ritualnya seperti berperang satu lawan satu dengan masing-masing orang memegang pandan berduri sebagai senjata.

## 2. Tradisi Mekotek

Suara “tek-tek” yang dihasilkan dari ketukan kayu yang berbenturan menandai tradisi Mekotek ini. Dimana tradisi ini dilaksanakan setiap enam bulan sekali tepatnya saat peringatan Hari Raya Kuningan yang bertujuan untuk tolak bala, melindungi dari serangan penyakit dan juga memohon keselamatan kepada sang pencipta (<http://www.baliprov.go.id/v1/agamaadatbudaya>, akses tanggal 30-6-2017)

Kedua tradisi tersebut sesungguhnya menggambarkan secara jelas bahwa kehidupan adat istiadat di Provinsi Bali masih sangat dijunjung tinggi. Kehidupan sosial masyarakat Bali tidak bisa terlepas dari nilai adat yang secara turun temurun diwariskan sebagai *local wisdom* maupun *heritage*. Tradisi mekare-kare adalah lambang bahwa masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi ideologi dan ajaran agama Hindu sebagai penghormatan atas Trimurti atau dikenal dengan tiga dewa utama yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu maupun Dewa Siwa. Adapun tradisi mekotek dilakukan bersamaan dengan Hari Raya Kuningan. Tradisi ini dipercaya masyarakat Bali sebagai sarana pemujaan kepada dewa untuk menolak segala balak yang mungkin bisa menimpa masyarakat Bali.

### **B. Konsep Tri Hita Karana**

Bali sebagai salah satu destinasi di Indonesia yang memiliki kearifan tradisional dan adat istiadat yang masih kental. Seluruh masyarakat Bali sepakat bahwa setiap pembangunan di Bali harus didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang telah dikenal secara universal dalam konsep Tri Hita Karana.

Keanekaragaman alam, budaya, dan seni yang khas di pulau Bali tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keagamaan atau peribadatan masyarakatnya sebagai bentuk sikap kepatuhan yang diyakini. Dalam setiap program dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali selalu berpedoman pada konsep keseimbangan “Tri Hita Karana” yang menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan tuhan. Dengan berpedoman pada konsep tersebutlah, sampai saat ini pariwisata internasional maupun domestik masih menyimpan kepercayaan terhadap Bali (Putra, 2017).

Konsep keseimbangan hubungan inilah yang menjadi ruh pembangunan Provinsi Bali. Bali yang indah dengan potensi alam yang menawan harus senantiasa dijaga untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Pantai harus dijaga kebersihan dan keindahannya, begitu juga dengan pengelola sumber daya alam Bali harus memiliki komitmen yang kuat untuk membangun tidak merusak. Pembangunan jalan tol misalnya tetap memelihara estetika dan tidak merusak keindahan maupun bertentangan dengan titik suci umat Hindu. Optimalisasi daya dukung terhadap sektor pertanian maupun perikanan dilakukan secara masif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hayati. Inilah yang merupakan sisi unik dari Pulau Bali yang masih sangat berpegang teguh kepada Tri Hita Karana yang mana masyarakat Bali menyadari betul bahwa budaya Bali dan elemen-elemennya harus tetap dilestarikan walaupun zaman terus berkembang.

Konsep Tri Hita Karana juga disampaikan oleh I Ketut Wiyana dalam bukunya yang berjudul "*Menuju Bali Jaghadita*" dalam Kitab Baghawad III. Di dalamnya dinyatakan bahwa yadnyalah yang menjadi dasar hubungan Tuhan Yang Maha Esa (Prajapati), manusia (Praja) dan alam atau kamad (Wiyana, 2004). Konsep tersebut memberikan pemahaman bahwa Tri Hita Karana adalah dasar untuk mendapatkan kebahagiaan hidup apabila mampu menjaga hubungan yang harmonis berdasarkan yadnya (ritual/korban suci) kepada Idha Sang Hyang Widhi dalam wujud bakti kepada sesama manusia dalam wujud pengabdian dan kepada alam lingkungan dalam wujud pelestarian alam dengan penuh cinta dan kasih.

Aspek inilah yang memberikan gambaran bahwa Tri Hita Karana tidak hanya sekedar nilai semata tetapi keyakinan yang senantiasa menjadi patokan bertindak bagi masyarakat Bali. Seseorang yang berada dalam lingkup kekuasaan maupun rakyat harus bersatu padu menjaga harmonisasi pada keyakinan mengimplementasikan keter-tundukan pada sang pencipta, membangun, menjaga hubungan dengan sesama manusia pada tingkatan individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Manusia memiliki kewajiban menanamkan nilai luhur yang digariskan Sang Hyang Widhi dengan tetap menjaga seluruh warisan budaya dan adat, ataupun keindahan alam beserta estetikanya.

Dalam konteks implementasi tata ruang maupun pembangunan wilayah, konsep ini menjadi pilar dasar peletakan arah kebijakan. Adalah tidak dikatakan sejalan dengan Tri Hita Karana manakala pembangunan manusia justru merusak keseimbangan alam. Bali yang mampu menjadi primadona wisata dunia karena keteraturan yang dijaga antara pembangunan wilayah, pembangunan manusia maupun hubungan keyakinannya dengan nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam ajarannya. Dengan kata lain upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali tidak boleh tercerabut dari nilai dasar falsafah ini. Masyarakat Bali adalah masyarakat yang “menyame braye” yaitu mereka adalah satu ikatan persaudaraan. Antara satu dengan yang lain tidak boleh menyebabkan pertentangan yang menimbulkan kekacauan. Masyarakat Bali harus selalu berupaya untuk mengkaji suatu kebijakan yang diletakkan pada nilai Tri Hita Karana. Potensi wisata yang begitu besar dengan per-tumbuhan manusia yang memiliki tingkat peradaban tinggi adalah ujung tonggak pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Dalam beberapa kesempatan agar hubungan antara manusia dengan alam tidak mengalami disorientasi maka dilakukan kajian terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah Provinsi Bali. Begitu juga dengan kebijakan reklamasi yang telah di tandatangani pemerintah pusat senantiasa melihat nilai-nilai tersebut. Tri Hita Karana dapat dilihat dari perspektif hukum Indonesia, sebagai tingkat keseimbangan alam yang terjaga.

Beberapa data terlihat dari pernyataan Pemerintah Provinsi Bali terkait kajian reklamasi Teluk Benoa. Gubernur Bali Made Mangku Pastika secara khusus menyampaikan apresiasi dan terimakasih terhadap berbagai masukan baik berupa saran maupun kritik terkait rencana reklamasi Teluk Benoa yang mengemuka pada diskusi terbuka di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Khusus terkait SK Nomor : 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa, tim hukum gubernur mulai bergerak untuk mempelajari serta mendalami berbagai pendapat yang berkembang. Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali yaitu I Ketut Teneng. Setelah digodok secara intern, nantinya Pemprov Bali juga akan membahasnya dengan DPRD Bali dan mengundang sejumlah komponen dan praktisi hukum yang lebih berkompeten. Ketut Teneng berharap, pembahasan secara lebih spesifik mampu menghasilkan solusi yang lebih baik. Karo Humas kembali menyitir beberapa penjelasan Gubernur Mangku Pastika terkait dengan rencana reklamasi. Pihaknya berharap, semua komponen menyikapi rencana ini dengan jernih dan pikiran terbuka. Menurutnya, rencana ini adalahantisipasi jauh untuk Bali dan tidak bermaksud menjual Bali. “Apanya yang dijual, justru kalau rencana ini bisa terealisasi, kita nambah luas wilayah,” tuturnya.

Lantas Ketut Teneng memaparkan manfaat dari reklamasi Telok Benoa ini, yakni reklamasi menjadi salah satu solusi dari kecenderungan meningkatnya lahan produktif serta menjadi daratan penyangga mitigasi bencana tsunami. Serta direncanakan reklamasi ini akan menambah luas hutan di Bali. Sebagaimana pernyataannya:

Dari 800 hektar, 50 persen lahan hasil reklamasi akan dihijaukan. Artinya kita akan nambah hutan. Sektor ketenagakerjaan dan pengembangan destinasi pariwisata juga menjadi pertimbangan dari bergulirnya rencana reklamasi Teluk Benoa ini. Ada ribuan lulusan universitas dan sekolah kejuruan yang setiap tahunnya siap terjun ke dunia kerja. Jika tidak diantisipasi dengan upaya penambahan lapangan kerja baru, dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, kita akan bawa kemana anak-anak itu. Di samping itu, pariwisata Bali juga perlu alternatif destinasi baru untuk menarik kunjungan wisatawan. Negara lain berlomba-lomba menambah destinasi baru. Jika kita statis, kita akan ketinggalan.

Pihaknya mengajak masyarakat untuk menyerahkan kepada lembaga yang berwenang. Ia turut memaparkan bahwa SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali bukan merupakan ijin untuk melakukan reklamasi, dikarenakan SK memberikan banyak batasan yang diharapkan investor segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Merujuk pada sejumlah pemikiran tersebut, Ketut Teneng berharap perencanaan ini dapat dijalankan dengan tenang dan tidak didasari prasangka negatif.

Dikutip dari Website Biro Humas Provinsi Bali, dalam klausul keempat mengenai kajian teknis PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) diwajibkan mentaati prosedur perundang-undangan yang berlaku. Yakni dengan melakukan pengkajian pada pelaksanaan pembangunan kawasan darat serta memaparkan manfaat kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan atau Reklamasi Teluk Benoa. Ditambah lagi persyaratan bahwa pihak investor wajib menyusun AMDAL, mengikutsertakan dan memperkerjakan masyarakat serta mengganti rugi dan merehabilitasi kerusakan yang diakibatkan oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). (<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/302/Tim-Hukum-Gubernur-Dalami-Hasil-Diskusi-Reklamasi-Teluk-Benoa/> diakses pada: Sabtu, 20 Januari).

Apa yang disampaikan pemerintah Bali terkait reklamasi tersebut sesungguhnya ingin menegaskan bahwa konsep keseimbangan antara manusia, alam dan Tuhan benar-benar dijaga. Kajian dari perspektif hukum, lingkungan atau AMDAL adalah bukti bahwa pemerintah provinsi Bali berkomitmen untuk menjadikan falsafah Tri Hita Karana sebagai ujung pembangunan Provinsi Bali. Semua kajian itu setidaknya akan memunculkan jawaban seberapa jauh dam-pak pembangunan reklamasi terhadap nilai nilai keyakinan masyarakat Bali. Lebih jauh adalah memberikan jawaban terhadap dampak nyata atas konsekuensi dilakukannya reklamasi di Teluk Benoa. Tentu pemerintah Provinsi Bali juga berkaca pada reklamasi Jakarta maupun pulau Serangan yang telah dilakukan. Hubungan manusia terlihat menjadi tidak harmonis karena kegagalan kebijakan yang meniadakan aspek harmoni dan keseimbangan alam, manusia dan Tuhan.

Lebih jauh diamati bahwa pemerintah Bali selalu mendengarkan aspirasi masyarakat baik yang pro maupun yang kontra terhadap kebijakan reklamasi. Bali yang aman, nyaman dan damai akan menciptakan tatakelola masyarakat yang beradap. Diharapkan hal tersebut mampu mendorong pemasukan di sektor riil yang selama ini diharapkan oleh pemerintah.

**Gb 6: Kegagalan Reklamasi Jakarta karena Amdal tidak Matang**



Penulis juga berpendapat bahwa posisi pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai pelaksana dari Keputusan Presiden No 51 Tahun 2014 yang sudah disahkan. Perlu diupayakan dengan konsep Tri Hita Karana agar masyarakat Bali dengan pemerintah tidak berujung pada tindakan saling melawan yang menimbulkan perpecahan. Bali yang aman bertahun lamanya adalah hadiah dari keyakinan menjalankan nilai Tri Hita Karana secara terus menerus dalam kehidupan masyarakat Bali. Secara lebih lanjut implementasi dari nilai ini dapat dilihat dari program kerja lima tahunan yang dilakukan oleh I Made Mangku Pastika selama menjabat hingga periode kedua yang berarti Bali Mandara dalam konteks pembangunan provinsi Bali yang berkelanjutan.

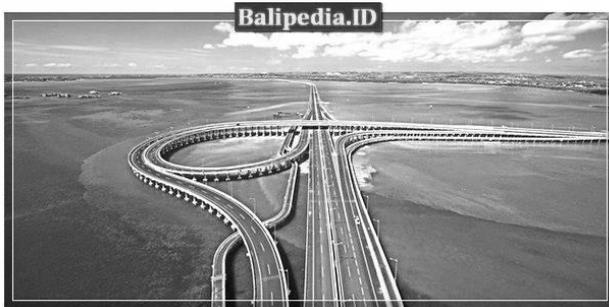
### **C. Provinsi Bali dalam Konsep Pembangunan Bali Mandara**

Pulau Bali merupakan salah satu primadona tujuan wisata dunia. Sebagai tempat tujuan wisata dan terpadu, Bali memiliki banyak tempat wisata menarik antara lain, Pantai Kuta, Nusa Dua, Uluwatu, Jimbaran, Pura Tanah Lot, Danau Beratan, Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Lovina, Nusa Penida, Pura Besakih, Ubud, Kintamani, Amed, Tulamben, Pulau Menjangan dan masih banyak yang lainnya. Kini, Bali juga memiliki beberapa pusat wisata yang sarat edukasi untuk anak-anak seperti kebun binatang, Museum Tiga Dimensi, Miniatur Indonesia, dan berbagai arena jenis baru seperti SPA dan Pusat Belanja dengan konsep modern. Bali memberi nuansa yang berbeda. Nuansa keindahan, romantisme, kegembiraan, kebebasan, etnis, magis, ini tentu memberi makna bahwa Bali memang tempat yang lengkap dengan berbagai kisah dan ceritanya (Putra, 2017). Begitu besar potensi daerah yang dimiliki oleh Provinsi Bali.

Selain memiliki banyak pariwisata yang berbasis keindahan alam, Bali juga merupakan cerminan kehidupan adat istiadat serta warisan budaya yang kuat. Hal inilah yang membuat pembangunan Provinsi Bali harus mengedepankan aspek budaya, agama, estetika serta keindahan alam yang harus dijaga. Provinsi Bali memiliki julukan lain yaitu Pulau Dewata. Hal ini menandakan bahwa Bali merupakan tempat tujuan wisata yang indah. Begitu banyaknya potensi daerah ini kemudian memberikan pemahaman kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk membuat program pembangunan Bali yang berkesinambungan namun tetap menjaga keseimbangan antara kelestarian alam, kebudayaan, maupun rohani agama.

Semenjak kepemimpinan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, konsep pembangunan Provinsi kemudian dituangkan dalam satu tema besar yaitu Bali Mandara. Bali berkembang dengan pertumbuhan ekonomi dan wisata dengan baik, aman namun tidak meninggalkan unsur agama, budaya, adat maupun menjaga harmoni keseimbangan anatara alam, tuhan dan manusia. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Arah pembangunan Bali tidak boleh tercerabut dari nilai aslinya. Gagasan Bali Mandara inilah sebagai inspirasi pembangunan bali yang ber-kelanjutan. Kelak di kemudian hari akan menjadi warisan yang berharga bagi generasi berikutnya. Secara turun temurun pembangunan Bali akan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam membangun peradaban di daerahnya.

**Gb 7: Jalan Tol Bali Mandara Menghubungkan antara Benoa, Ngurah Rai Tuban, dan Nusa Dua**



Bali Mandara adalah program yang dibuat oleh Gubernur Provinsi Bali, yaitu Made Mangku Pastika. Mandara sendiri merupakan singkatan dari Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera yang juga bentuk perwujudan dari cita-cita Provinsi Bali. Hal meruini tertuang dalam satu karya buku yang berjudul “Bali Mandara”. Gubernur Bali Made Mangku Pastika, merumuskan

Konsep pembangunan Bali sejak 2008 mengenai lencana Visi Bali Mandara. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali No, 9 Tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Bali (RP JDM) 2008 – 2013 sebagai Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera. (Putra, 2017).

Menurut Putra (2017), tiga konsep tersebut yaitu Bali yang Aman, Damai, Sejahtera dimaknai sebagai berikut: Bali maju adalah Bali yang dinamis, yang senantiasa bergerak dan maju dengan tetap menjunjung kesucian dan keikhlasan demi tegaknya dharma, “Metaksu” yang selalu meningkatkan kualitas sebagai tujuan wisata yang handal, serta berkharisma dan religious. Bali yang maju adalah Bali yang modern sesuai nilai nilai universal dan tidak menyimpang dari ajaran agama Hindu (Bali), serta adat dan istiadat Bali. Diperbolehkan kehadiran modern sebagai upaya untuk peningkatan kehidupan dan peradaban masyarakat Bali (Putra, 2017).

Pada hakekatnya Bali Mandara dalam kaidah maju sebagaimana dituangkan dalam pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang tidak boleh meninggalkan akar budaya dan religi. Selama ini Bali menjadi tujuan wisata dunia karena wisatawan asing maupun dalam negeri melihat adanya warisan budaya yang dijaga secara turun temurun oleh generasi keturunan Bali. Di sisi lain meskipun pembangunan Bali begitu pesat namun akar kebudayaan maupun religi tidak tercerabut dari nilai aslinya. Upacara suci, adat, maupun berbagai prosesi kebudayaan tetap bisa hadir di tengah akulturasi budaya yang begitu kuat.

Kebudayaan Bali adalah kebudayaan yang senantiasa menjaga keseimbangan antara hubungan sesama manusia, manusia dengan tuhan atau pencipta alam semesta maupun hubungan manusia dengan alam.

Konsep kedua adalah Bali Aman, Bali aman adalah Bali yang “dabdab” teratur sekala niskala, memiliki keseimbangan antara korelasi kebutuhan antar manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam lingkungannya, serta manusia dengan Tuhannya, sejalan dengan konsep “Tri Hita Karana”. Bali yang aman adalah Bali yang terhindar dari ancaman intervensi virus-virus ideologi yang bertentangan dengan Tri Hita Karana seperti: terorisme, anarkisme dan virus non tradisional lainnya yang mewarnai jaman kali ini (Putra, 2017).

Kekuatan keamanan Bali terletak pada harmonisasi dan ideologi kultural yang sangat melekat di hati masyarakat Bali. Menjaga keseimbangan antara manusia, alam dengan penciptanya tidak boleh ditinggalkan. Jika manusia takut dengan tuhannya niscaya ia tak akan berani melakukan tindakan kriminal, ia menghormati hak-hak sesamanya, menghormati sesama manusia, ia pandai dalam menjaga kelestarian alamnya. Keamanan provinsi Bali bergantung pada penduduknya, jika masyarakat sadar untuk senantiasa hidup berdampingan bersama dan merasa memiliki ikatan persaudaraan yang kuat maka dengan sendirinya alam akan terjaga dan terpelihara. Tentu masyarakat Bali sadar bahwa globalisasi sudah sangat begitu kuat baik dari sisi perkembangannya maupun pengaruhnya. Sehingga ideologi kebudayaan masyarakat Bali harus selalu dijaga dan diper-

kuat dengan pengamalan nilai keseimbangan sebagaimana tercermin dalam agama Hindu.

Masyarakat Bali tetap berbusana adat, memakai “Udeng” dan pernak pernik lainnya dalam menyambut adanya akulturasi budaya dalam globalisasi yang tiada bersekat. Pengalaman sejarah pernah terjadi musibah besar yaitu Bom Bali yang menjadi pukulan telak untuk seluruh elemen provinsi Bali. Belajar dari kejadian itulah kekuatan ikatan masyarakat Bali harus diperkuat agar kejadian memilukan tidak terjadi lagi. Prioritas keamanan menjadi sangat penting, selain aparat negara menjaga Bali, masyarakat Bali harus senantiasa terlibat dalam mewujudkan Bali aman melalui upaya berkumpul bersama atau yang dikenal “Simekrame”(simakrama). Setiap persoalan di Bali dibahas di satu wadah dialog bersama guna mencari solusi paling baik yang mampu merepresentasikan nilai luhur kehidupan Provinsi Bali. Hal ini diharapkan memberi pengaruh besar terhadap suasana aman dan nyaman bagi siapapun yang akan berkunjung ke Bali.

Menurut Putra (2017), pembangunan konsep Bali Mandara yakni Bali yang damai. Hal ini dimaknai dengan Bali yang dikelilingi atmosfer dengan kesejukan lahir batin, dan selalu dalam keadaan aman dan kondusif. Bali damai adalah interpretasi harmonisnya komunitas masyarakat Bali, tak memandang kota maupun pelosok pedesaan Konsep ini menjadi indikator optimisnya masyarakat dalam menghadapi masa depan yang menjanjikan (Putra, 2017). Potensi ekonomi Bali paling besar ditopang oleh pariwisata, oleh karena itu faktor keamanan maupun kedamaian harus senantiasa dijaga karena akan mempengaruhi keberlangsungan perputaran roda perekonomian di Bali.

Dalam konteks perbedaan harus diselesaikan dengan prinsip tersebut. Tidak ada demo yang ricuh, maupun aksi masa yang kontra produktif dengan nilai luhur yang diyakini masyarakat Bali. Tentu wisatawan manca Negara maupun domestik akan memperhatikan hal tersebut. Mereka hanya akan datang di wilayah yang aman dan tercipta rasa kedamaian.

Nilai keempat adalah Bali sejahtera yaitu Bali yang *sukerta sekala niskala*, sebagai akumulasi diperolehnya kemajuan, keamanan, dan kedamaian. Kesejahteraan adalah hasil akhir capaian yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam konsep pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Garis besar inilah yang kemudian secara menyeluruh diimplementasikan dalam visi dan misi pemerintah Provinsi Bali semenjak era Gubernur I Made Mangku Pastika.

Menurut I Dewa Gede Mahendra pada buku Bali Mandara, visi Bali Mandara, yakni Pemerintah Provinsi Bali membuat program pembangunan dengan memprioritaskan kemiskinan menjadi permasalahan yang utama. Muaranya permasalahan yakni adalah disebabkan oleh Kemiskinan yang berdampak pada pendidikan dan kesehatan masyarakat. Permasalahan lainnya harus ditanggapi dengan simultan, tidak bisa dipisahkan dan dilaksanakan secara sektoral. Program ini turut menjadi landasan penentuan APBD Prov. Bali setiap tahunnya. Program prioritas tersebut diantaranya jaminan kesehatan Bali Mandara, sistem pertanian terintegrasi, bedah rumah, penuntasan buta aksara dan pembangunan bidang pendidikan, *Bali Green Province*, dan pembangunan desa terpadu (Putra, 2017).

Salah satu implementasi program Bali Mandara adalah pembangunan Tol Bali Mandara. Pada awal sejarahnya mengapa jalan tol Bali Mandara dibangun di atas laut? Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan dengan budaya yang ada di Bali. Rencananya, jalan tol ini akan dibangun dengan konsep melayang atau bisa disebut dengan jalan layang. Akan tetapi, ada aturan khusus terkait budaya di Bali, bahwa dalam mendirikan bangunan tidak boleh memiliki ketinggian di atas pura yang ada di sekitarnya. Sehingga, investor tidak mendapatkan izin atas pembangunan. Kemudian, salah satu dari pihak Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama Sumaryanto memunculkan ide untuk membuat jalan tol di atas laut. Pembangunan jalan tol ini melibatkan beberapa pihak pemegang saham, yaitu PT. Jasa Marga, PT. Pelindo III, PT. Angkasa Pura I, PT. Wijaya Karya, PT. Adhi Karya, PT. Hutama Karya, PT. Pengembangan Pariwisata Bali. Tak hanya itu, pembangunan juga melibatkan pemda serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat. Jika berbicara soal nama Bali Mandara, pada awalnya nama yang digunakan bukan Bali Mandara, akan tetapi tol atas laut Bali. Bahkan ada yang menyebutnya dengan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa. Pada akhirnya, Gubernur Provinsi Bali mengusulkan dua nama, yaitu Soekarno Hatta dan Bali Mandara kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Akhirnya yang disetujui adalah Bali Mandara.

Jalan tol Bali Mandara yang memiliki panjang 12,7 km di atas laut ini merupakan pertama kali dan satu-satunya jalan tol yang memiliki jalur khusus bagi pengendara sepeda motor yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Dalam pembangunannya, Bali Mandara ini sama sekali tidak mengambil dana dari APBD (Putra, 2017). Dana yang digunakan berasal dari gabungan antara bank BUMN dan PT. Jasa Marga. Selain itu, material serta teknologi yang digunakan dalam pembangunan ini berasal dari dalam negeri atau bisa dikatakan merupakan karya anak bangsa. Jalan tol ini dibuat sekitar 15 bulan, yaitu dari bulan Maret 2012 hingga sekitar bulan Mei 2013. Untuk sistem keamanan yang berkaitan dengan cuaca di atas laut, dipasang adanya CCTV dan alat pemantau angin di setiap gerbang tol. Aturan yang berlaku, yaitu ketika kecepatan angin mencapai 40 km atau di atasnya, maka jalan tol akan ditutup untuk menghindari kecelakaan. CCTV yang dipasang 24 jam ini berguna untuk memantau kendaraan yang melaju. Jadi misalnya ada kendaraan yang mogok, maka dari PT. Jasa Marga dapat menolong dengan menyediakan alat derek secara gratis.

Tak hanya dalam bentuk jalan tol, pembangunan Bali Mandara juga dilengkapi oleh pembangunan Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM). RSBM adalah rumah sakit yang mengutamakan pelayanan prima yang ditunjang oleh tenaga medis yang profesional serta alat-alat kesehatan yang canggih dan memadai demi kesejahteraan, kesehatan masyarakat Bali. Pentingnya kesehatan bagi kehidupan masyarakat, baik untuk kesehatan jasmani maupun rohani bertujuan untuk memperoleh pikiran yang sehat, perilaku yang baik serta kesejahteraan masyarakat Bali (Putra, 2017). Rumah sakit ini

didirikan pada tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2017. Rumah sakit ini memberikan pelayanan 24 jam. Pada saat diresmikan, Gubernur Provinsi Bali mendatangi rumah sakit dan melakukan persembahyangan di Pura Tambak Sari Rumah Sakit Bali Mandara. Bersamaan dengan itu, sekretaris daerah setempat juga datang, kemudian mencoba alat-alat kesehatan yang ada. Kemudian, gubernur dan wakil gubernur juga langsung mencoba pemeriksaan jantung.

Rumah sakit Bali Mandara memiliki visi yaitu menjadi rumah sakit yang mandiri dengan pelayanan berkualitas menuju rumah sakit berkelas dunia tahun 2025. Sedangkan misinya yaitu mewujudkan RSBM sebagai rumah sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan; menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, berintegritas dan memiliki budaya kerja; mengembangkan layanan inovasi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki berorientasi pada kebutuhan masyarakat; menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring yang luas; menjadikan RSBM bersertifikat akreditasi nasional dan internasional. Dari visi dan misi yang dibuat oleh RSBM dapat diketahui bahwa rumah sakit ini sangat mengedepankan kualitas pelayanan publik dan kepuasan pelanggan dengan ditunjang adanya SDM yang mumpuni. Rumah sakit ini sempat menuai keresahan di masyarakat sehingga terjadi demo di lingkungan

rumah sakit pada saat diresmikan. Rumah sakit ini sempat menuai protes di masyarakat perihal pengingkaran janji terkait rekrutmen pegawai. Sebelumnya investor menjanjikan lapangan pekerjaan dengan masyarakat Sanur. Namun pada kenyataannya, dari 500 pegawai hanya 7 pegawai saja yang diterima dari masyarakat setempat. Seharusnya ada jumlah minimal pekerja sebanyak 40 persen yang berasal dari masyarakat Sanur dapat bekerja di RSBM, tetapi mereka hanya meminta 10 persennya saja sesuai kesepakatan awal. Pada kenyataannya pihak RSBM mengingkari dan sebanyak 19 ribu lebih masyarakat Sanur melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut.

#### **Gb 8: Rumah Sakit Bali Mandara**



Pembangunan Bali Mandara juga terus berlanjut. Adapun selanjutnya akan dibahas terkait SMK dan SMA Negeri Bali Mandara. SMK Bali Mandara didirikan pada 2 Desember 2013 dan resmi digunakan pada Juli 2015. SMK ini memiliki tiga jurusan yaitu teknik komputer jaringan, teknik kendaraan ringan, teknik gambar bangunan. Fasilitas yang disediakan yaitu asrama dan juga dari pemerintah menyediakan bantuan

Pendidikan untuk siswa Bali yang memiliki potensi untuk maju serta berasal dari keluarga yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Selain itu juga untuk menunjang bidang non-akademik, sekolah ini memiliki beberapa kegiatan yang dapat diikuti oleh siswa, yaitu program keagamaan dan ekstrakurikuler. Kriteria kewajiban dari masing-masing kegiatan juga dibagi oleh sekolah. Kegiatan yang berada di wajib tingkat 1 yaitu pramuka; menyusul wajib tingkat 2 yaitu Karya Ilmiah Remaja (KIR), *marchingband*, dan tabuh; kemudian wajib tingkat 3 yaitu berbagai macam olahraga pilihan, seperti bela diri, sepak bola, basket, bola volly dan ekstrakurikuler lain seperti tari (yang tentunya tari Bali) dan *nyurat lontar*. Ada pula kegiatan lain terkait pelatihan kepemimpinan, seperti OSIS, seminar dengan program *pathway to leader preneurship (PTL)*, *enterprenuership club*, dan sebagainya.

Sistem yang digunakan di sekolah ini adalah dengan menerapkan kurikulum 2016 dilengkapi dengan kompetensi dalam muatan kurikulum Politeknik Negeri Bali yang dalam pembelajaran diampu langsung oleh Dosen Politeknik Negeri Bali. Terkait dengan bidang akademiknya sendiri, ada program *moving class*, *silent reading*, *morning speech*, *additional evening class*, dan sebagainya. Tak kalah dengan SMK Bali Mandara, SMA Bali Mandara yang biasa disingkat dengan SMANBARA merupakan sekolah bertaraf inter-nasional yang ada di Kabupaten Buleleng. Sekolah ini merupakan sekolah yang menerima siswa dari kalangan tingkat ekonomi orang tua yang kurang mampu. Sekolah yang memiliki visi yaitu menjadikan SMANBARA sebagai sekolah terbaik di Bali dalam mempersiapkan calon pemimpin masa

depan. Sedangkan misinya yaitu mendidik calon pemimpin masa depan yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik, berwawasan global dan tanggung jawab dengan nilai-nilai integritas; menjadi terbaik, saling menghargai dan menghormati, berempati, berinovasi, berani, transparan dan terbuka; cinta tanah air, inklusif dan setia kawan.

**Gb 9: Siswa-siswi SMA dan SMK Bali Mandara**



Dari visi dan misi yang dibuat, dapat terlihat bahwa SMANBARA ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika, bukan hanya dalam bidang akademik saja. Sekolah ini berdiri pada tahun 2011 serta merupakan perwujudan kerjasama dari Pemerintah Provinsi Bali dengan Putera Sampoerna Foundation (PSF) dalam rangka memajukan dunia pendidikan. Seringkali ketika menyebut SMA Negeri Bali Mandara terdapat kata yang mengiringinya, yaitu Sampoerna Academy. Sekolah ini menyediakan asrama bagi siswanya serta memiliki kurikulum perpaduan antara kurikulum standar nasional dan standar internasional yakni kurikulum Internasional General Certificate of Secondary Education (IGCSE) yang berasal dari Universitas Cambridge dan Standar

Nasional Pendidikan diterapkan secara bersama pada Sampoerna Academy. Sekolah ini membentuk program L to L (*learning to live*) guna membentuk siswa yang jujur, memiliki jiwa sosial, dan bertanggung jawab. Tidak hanya bidang akademik saja, akan tetapi terdapat program ekstra kulikuler, seperti kegiatan olahraga, kegiatan pelestarian lingkungan, klub jurnalistik, klub musik, dan sebagainya.

Bali Mandara merupakan salah satu wujud program untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di Provinsi Bali. Pelayanan yang diberikan dari Bali Mandara pun sangat bagus, bisa dilihat dari adanya berbagai penghargaan yang diberikan. Selain lengkap, pelayanan yang diberikan juga ramah dan bisa dikatakan murah. Pelayanan publik tersebut diwujudkan guna menerapkan konsep *good governance* di Provinsi Bali karena adanya penerapan sistem transparansi. Akan tetapi, dalam pembangunan terkait, masih belum berpatokan terhadap pembangunan keberlanjutan, dimana pembangunan ini digunakan untuk masa kini dan juga memikirkan dampak masa yang akan datang. Jika dilihat, masih terdapat adanya kerusakan lingkungan dalam pembangunan Bali Mandara. Hal ini dapat berdampak terhadap rusaknya ekosistem Bali di masa yang akan datang.

Reklamasi menjadi tema besar yang kemudian lahir bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2014. Babak baru tentang pemanfaatan dan pengelolaan tata ruang di Provinsi Bali di sahkan oleh pemerintah pusat. Menimbang (a) Bahwa memperhatikan perkembangan kebijakan strategis nasional dan dinamika internal di kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, khususnya terkait pemanfatan

ruang di kawasan Teluk Benoa, sehingga diperlukan revitalisasi. Pada huruf (b) bahwa kawasan Teluk Benoa dapat dikembangkan sebagai kawasan yang potensial guna pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, serta keberadaan prasarana dan prasarana infrastruktur di Kawasan Teluk Benoa. Huruf (c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, (Peraturan Presiden NO 51 Tahun 2014 Tentang Reklamasi).

Jika dicermati secara mendalam ada beberapa faktor yang mendasari lahirnya Keputusan Presiden tersebut. Dengan kondisi geografi Provinsi Bali disertai dengan pertumbuhan sosial yang sangat cepat tentu membutuhkan solusi agar mampu menjawab tantangan tersebut. Jumlah penduduk yang kian hari kian bertumbuh pesat tentu harus disertai dengan ketersediaan lapangan kerja, hunian yang layak serta tata kelola lingkungan yang baik. Pembangunan, pengelolaan serta tata ruang yang baik diharapkan menjadi solusi atas persoalan sosial yang mungkin akan dihadapi masyarakat Bali di kemudian hari. *Human development indeks* atau yang dikenal dengan indeks pertumbuhan manusia setidaknya akan tercapai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai dan tata kelola lingkungan yang baik.

Pulau Bali merupakan salah satu primadona tujuan wisata dunia dengan devisa sangat besar yang mampu

menggerakkan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah dalam perspektif Peraturan Presiden ini akan menjaga kelestarian adat yang selaras dengan pertumbuhan demografi maupun psikografi wilayah Provinsi Bali. Sebagai wisata eksotis dunia inilah pemerintah pusat perlu mengoptimalkan sumberdaya wisata yang dimiliki oleh Provinsi Bali dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi, sosial budaya serta pariwisata.

Mengingat potensi pariwisata pulau Bali yang begitu digemari wisatawan dari segi budayanya, tradisinya, maupun keindahan alamnya membuat pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Peraturan ini dengan mudah diterima masyarakat karena mereka menganggap dengan adanya Perpres ini dapat membantu mengontrol investor untuk tidak mengambil lahan hijau yang ada di Bali ataupun mengambil lahan untuk hutan lindung. Perpres turut menjadi kontrol kawasan konservasi.

Namun, pada akhir jabatannya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengubah isi dari Peraturan Presiden Tahun 45 yang intinya mengubah status konservasi Teluk Benoa menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum. Adanya perubahan pada Perpres Nomor 45 membuat presiden menerbitkan peraturan presiden baru yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014, dalam perpres ini menyatakan bahwa Teluk Benoa tidak lagi menjadi kawasan konservasi sebagaimana yang

tercantum dalam Pasal 55 ayat 5 Perpres Nomor 45 Tahun 2011 serta mengurangi luas kawasan perairan Pulau Serangan dan Pulau Pudut.

Dengan adanya peraturan presiden tersebut membuat penduduk Bali dihadapi dengan perencanaan reklamasi di Telok Benoa wilayah Kuta Selatan. Adanya rencana reklamasi ini tertuang jelas dalam Pasal 63A ayat (2) Perpres Nomor 51 tahun 2014 yang intinya mengubah kawasan konservasi perairan pesisir Teluk Benoa menjadi zona penyangga dengan luas wilayah reklamasi maksimal seluas 700ha.

Jika dilihat dari pengertiannya, reklamasi memiliki beberapa arti. Menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan pengurangan, pengeringan lahan atau drainase. Definisi Reklamasi ini turut diamkasudkan sebagai reklamasi pesisir.

Adanya proyek reklamasi ini menimbulkan pro kontra bagi masyarakat. Adapun pihak yang mendukung adanya reklamasi berargumen bahwa pulau yang akan direklamasi kondisinya sudah tidak bagus dikarenakan perubahan iklim secara global, serta adanya reklamasi ini untuk mengurangi resiko bencana alam, iklim bencana global, dan juga menangani kerusakan pantai pesisir. Selain itu Teluk Benoa juga dapat dijadikan ikon pariwisata baru dengan pengembangan *green development* sebagai upaya mitigasi bencana, khususnya untuk bencana tsunami.

Hal tersebut diperkuat oleh Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Bali Ketut Teneng yang menyatakan bahwa semua komponen berhak mengutarakan pendapat tentang rencana reklamasi Teluk Benoa yang belakangan mengundang pro dan kontra. Namun sejatinya, rencana ini merupakan sebuah antisipasi jauh ke depan dan mungkin baru dinikmati 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Perkembangan bangunan di Pulau Bali menjadi salah satu landasan adanya perencanaan fungsi lahan produktif. Adanya reklamasi dengan menambah lahan baru menjadi alternatif memaksimalkan fungsi lahan. Perkembangan bangunan ini dibarengi dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, migrasi serta alih fungsi lahan.

Mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, yang dilansir pada Biruhumas Provinsi Bali, dalam kurun waktu 14 tahun dari tahun 1997-2011 lahan produktif berkurang mencapai 436 hektare (0,50%) tiap tahunnya. Sedangkan tahun 1997, lahan produktif Bali tercatat 87.849 hektare dan pada tahun 2011 tercatat 81.744 hektare. Melihat pesatnya pembangunan dalam dua tahun terakhir, data tersebut kemungkinan sudah berubah dan luas lahan produktif diperkirakan makin berkurang. Melihat kecenderungan tersebut, mengakibatkan kekurangan lahan yang dimana secara geografis wilayah Bali sangat sempit untuk digunakan pemukiman dan pariwisata. Berangkat dari fakta tersebut, Pemprov Bali memikirkan berbagai upaya dan terobosan dalam menjaga perkembangan pembangunan pariwisata agar sejalan dengan kelestarian pertanian sebagai nafas kebudayaan Bali. Karenanya cara alternative untuk mengatasi hal tersebut dengan reklamasi

untuk mencegah makin menyusutnya lahan produktif. Namun demikian. Ketut Teneng berharap, semua pihak bisa menyikapi rencana ini dengan pikiran terbuka dan jauh ke depan. (<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/305/Reklamasikoma-Sebuah-Alternatif-Atasi-Alih-Fungsi-Lahan/>diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

Pihak yang tidak mendukung adanya reklamasi, memiliki pertimbangan atas pelestarian ekosistem laut yang menjadi wilayah konservasi, wilayah tersebut turut memiliki fungsi fital dalam ekosistem laut. Dengan kata lain reklamasi ini menimbulkan hal yang negative dalam ekosistem kehidupan laut dan masyarakat.

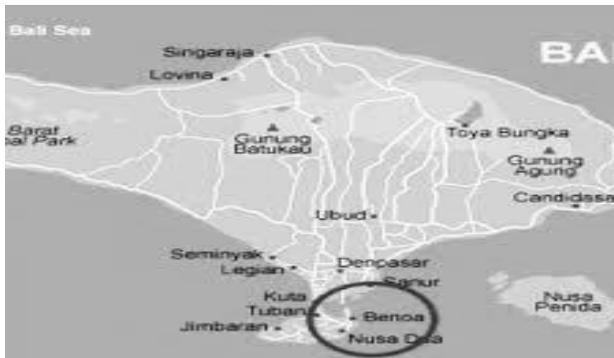
Mereka juga berpendapat bahwa bahasa “revitalisasi” merupakan kedok untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat dan memperhalus jalannya kepentingan para investor. Pihak yang tidak mendukung reklamasi menganggap Pemerintah Negara memberikan jalan yang mudah untuk investor namun akibat dari reklamasi ini ditanggung masyarakat karena investor akan mematikan mata pencaharian masyarakat yang menjadi pundi penghasilan di kawasan Teluk Benoa.

Kekhawatiran bahwa pemilik modal akan menindas kepentingan publik menjadi sikap yang ditunjukkan oleh ForBALI yang sangat tidak mendukung adanya reklamasi berkedok revitalisasi. ForBali beranggapan bahwa pemerintah pusat memberikan kebijakan untuk memudahkan investor yang menguntungkan beberapa pihak dengan alih status konservasi menjadi pemanfaatan publik.

Di sisi lain, Yayasan Bumi Bali Bagus justru mendukung adanya reklamasi bahkan menurut mereka reklamasi Teluk Benoa sangat diperlukan mengingat keadaan Teluk Benoa yang semakin buruk. Ekosistem *mangrove* sekarang dikeadaan yang bahaya karena terjadinya pendangkalan di Teluk Benoa. Oleh karenanya Yayasan Bumi Bali beranggapan bahwa dengan adanya reklamasi akan mengurangi potensi banjir dan mengembalikan fungsi *mangrove* di kawasan Teluk Benoa.

Adanya perubahan Peraturan Presiden yang dibuat pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono banyak menimbulkan pro dan kontra. Perubahan tersebut bisa dikatakan sangat terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik tanpa memperhatikan dampak yang ada setelah peraturan presiden ini muncul. Selain itu, peraturan presiden tersebut juga tidak sesuai dengan undang-undang lainnya. Pertentangan antara undang-undang ini diantaranya pada UU No.1 Tahun 2014, UU No.16 Tahun 2000, dan Perda Kab. Bandung No. 26 Tahun 2013, yang mana UU tersebut telah memaparkan bahwa Kawasan Teluk Benoa adalah kawasan Konservasi. Serta adapun UU No. 1 Tahun 2014 tentang tata Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 bahwa kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan suci untuk beribadah dan upacara adat Hindu dan Bali, yang tidak diperkenankan untuk dibangun dan digunakan serta memanfaatkan untuk kegiatan bisnis atau reklamasi.

**Gb 10: Posisi Teluk Benoa Bali**



**Gb 11: Pulau Pudut**



**Gb 12: Teluk Benoa dalam Pro dan Kontra**



## Gb 13: Perencanaan Proyek dalam Relokasi Teluk Benoa



### LATIHAN

1. Berikan alasan mengapa topografi, adat, agama menjadi unsur penting untuk melihat dinamika sosial di Provinsi Bali?
2. Deskripsikan nilai sosial yang terkandung dalam filosofi Tri Hita Karana? Dan jelaskan mengapa filosofi Tri Hita Karana menjadi penting dalam konsep pembangunan Bali?

## BAB IV

# STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM MENGATASI PENOLAKAN REKLAMASI TELUK BENOA

### A. Reklamasi dalam Perspektif Pemprov Bali dan Masyarakat Bali

**R**eklamasi menjadi kata yang akrab ditelinga Indonesia. Hal ini selain banyaknya pro dan kontra namun didukung pula akan banyaknya proyek yang ada di Indonesia mengenai Reklamasi Dengan kata lain bahwa reklamasi di Indonesia berjalan tidak sesuai harapan sebagaimana reklamasi di luar negeri. Dampak yang ditimbulkan dari reklamasi melahirkan perdebatan yang panjang, khususnya pemerintah dengan masyarakat setempat. Perdebatan berkisar pada dampak lingkungan, sosial, dan budaya. Sebelum membahas tentang pro kontra reklamasi Bali, akan dilihat beberapa negara yang sukses melakukan reklamasi tanpa pertentangan dari masyarakat, antara lain terdiri dari 8 negara sebagaimana di bawah ini yang dikutip dari Kaskus.co.id :

#### **1. Reklamasi Dubai: Palm Jumeirah**

Reklamasi pertama yang dilakukan oleh Dubai, Uni Emirat Arab adalah Palm Jumeirah. Pohon Palm menjadi inspirasi pembuatan pulau ini dengan dihidirkannya lahan terpisah dari pesisir berbentuk menyerupai Pohon Palm dengan luass 572.1 ha.

Adanya kesadaran pemerintah Dubai pada saat itu atas perlunya melakukan reklamasi dilandasi atas kondisi tambang minyak yang akan mengering, dan bermotif untuk dialih fungsikan sebagai kawan wisata untuk tetap mendapatkan prospektif bisnis dari dunia. Menyadari sumber daya alam yang tidak begitu banyak membuat motivasi dalam reklamasi daratan untuk menarik pariwisata untuk kalangan atas dengan memberikan fasilitas eksklusif. Tidak berhenti disitu, proyek Reklamasi terus dilakukan di wilayah Dubai yakni reklamasi Palm Jebel Ali, Palm Deira, dan The World.

Nakheel Properties menjadi perusahaan pengembang Nasional Dubai yang melaksanakan reklamasi dan bekerjasama dengan perusahaan dari Belanda *Van Oord Dredging* untuk melakukan pengurukan.

**Gb 14: Reklamasi Dubai**



## 2. Reklamasi Singapore

Sebagai negara dengan wilayah kecil namun kekayaan yang melimpah bukanlah hal yang sulit ketika Singapura menetapkan sebuah proyek reklamasi pada pulau Sentosa. Pulau Sentosa yang memiliki luas 500 hektar ini, dulunya adalah pulau – pulau kecil dan dikenal sebagai Pulau Blakang Mati. Setelah diadakannya reklamasi Pulau Sentosa menjadi pusat hiburan, wisata, hotel, taman, villa, dan arena permainan. Tak tanggung tanggung kawasan ini mendobrak pariwisata di Singapura dengan menghadirkan tempat wisata yang terkenal seperti Madame Tussauds, Underwater World, Dolphin Lagoon, Animal and Bird Encounters, dan yang paling dikenal yakni Universal Studio Singapura. Pulau sentosa menjadi salah satu resort yang memiliki tema *sustainable tourism* hal ini untuk mendukung menjaga ekosistem alam kawasan pulau, mempromosikan perilaku ramah lingkungan kepada wisatawan, mengefisienkan penggunaan energi, serha melindungi heritage yang menjadi asset Singapura.

**Gb 15 : Reklamasi Singapura**



### 3. Reklamasi Peabody : Mongolia

Proyek yang menjadi salah satu reklamasi tersukses di dunia. Proyek reklamasi Mongolia adalah reklamasi yang memanfaatkan lahan tambang yang rusak, dan disebut sebagai proyek *Peabody Energy Ereen Mining Site*. Wilayah yang dulunya gersang dan rusak sekarang wilayah tersebut telah diubah menjadi padang rumput dan dimanfaatkan untuk penduduk lokal sebagai penggembalaan ternak.

Proyek reklamasi ini berhasil menyediakan sumber air minum bersih yang sebelum dilakukannya reklamasi terdapat permasalahan atas sulitnya mendapatkan air bersih. Keberhasilan reklamasi ini terletak pada penanggung jawab proyek yang telah dipercaya memiliki pengalaman. Pengadaan reklamasi ini juga didasari atas pemerhatian kearifan lokal di Mongolia dalam pengembangannya. Material konstruksi reklamasi ini melibatkan pengusaha lokal yang memiliki pabrik material internasional di Mongolia. Disamping itu positifnya dihadirkan reklamasi ini adanya penerapan transfer pengetahuan mengenai proyek reklamasi kepada masyarakat dan tenaga kerja lokal.

**Gb 16 : Reklamasi Mongolia**



#### 4. Reklamasi Rotterdam : Belanda

Reklamasi Belanda merupakan kiblat atas tergeraknya reklamasi yang berada di Indonesia. Proyek reklamasi tersebut adalah "*Port of Rotterdam*" yang menjadi inspirasi "*Port of Jakarta*". Reklamasi ini memiliki tujuan untuk pencegahan banjir sebagaimana memiliki kasus yang sama di Ibu Kota Jakarta. Reklamasi Port of Rotterdam ini didorong oleh Proyek Maaksvlakte 1 yang telah merujuk angka maksimum, maka dilanjutkan untuk melakukan proyek lanjutan Maaksvlakte 2 yang menghadirkan pelabuhan untuk kepentingan komersial pada tahun 2013 lalu. Port of Rotterdam-pun menjadi pelabuhan terbesar di benua Eropa dengan throughput pertahunnya sebesar 465 juta ton.

Sejak dibuatnya reklamasi tersebut hidrologi, dan drainase Belanda menjadi percontohan dari banyaknya reklamasi pesisir maupun danau di seluruh dunia.

**Gb 17: Reklamasi Port of Rotterdam. Belanda**



## 5. Reklamasi Tung Chung, Hong Kong

Tung Chung, merupakan wilayah terpencil yang sepi penghuni. Namun setelah direklamasi, Tung Chung menjadi wajah perkotaan baru dengan magnet Bandara Internasional Hong Kong dan *Citygate Outlets*. Reklamasi ini melibatkan kawasan Utara, Timur, dan Timur laut Hong Kong seluas 14 Hektar.

Tung Chung menjadi sangat mudah dikunjungi didukung pula dengan lokasi yang strategis antara MTR Tung Chun dan terminal bus. Tung Chung dikembangkan seluas kurang lebih 46,000 m<sup>2</sup>, dengan menawarkan wisatawan untuk berbelanja, hiburan, gerai makanan besar.

Lancarannya reklamasi di Hong Kong ini didasari atas kesadaran untuk tidak hanya fokus memperluas kawasan namun juga memperhatikan dan menyeimbangkan antara kepentingan komersial dengan perlindungan kekayaan sumber daya alam di Hong Kong yang bersifat terbatas.

**Gb 18 : Reklamasi Hongkong**



## 6. Reklamasi China

Cao Fei Dian adalah proyek reklamasi terbesar dicina dengan 20 jut ton pasir disulap menjadi lahan baru pelabuhan dan luasnya sebesar 2000 hektar, dua kalinya Kota Boston. Reklamasi ini sudah ada sejak dinasti Qing, yakni pada masa petani membutuhkan lahan untuk pertanian.

Reklamasi China di Cap Fein Dian dibuat berdasarkan perencanaan yang matang, sistematis, dan pelaksanaan tahapan yang matang. Reklamasi ini dikenal dengan teknik sistem polder yang efisien dan sederhana. Pengembangan bangunannya difokuskan pada elemen-elemen pembentuk ruang yang memiliki daya tarik tinggi, seperti jalan raya, jalur rel kereta api, jaringan listrik, pelabuhan dan fasilitas lainnya. Namun reklamasi ini pernah mengalami kendala yakni atas penghentian pinjaman Bank dan penundaan pembangunan di tengah jalan karena tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

**Gb 19: Reklamasi China**



## 7. Reklamasi Korea Selatan

Beralih ke Negara Asia lainnya, Korea Selatan. Korea Selatan turut mencatat sejarah telah melakukan reklamasi untuk mendukung acara seperti Asian Games pada tahun 2014 serta The World Education Forum pada tahun 2015, yakni proyek Song Do International Business District yang luasnya kurang lebih 600 hektar. Beberapa kawasan terkenal di distrik ini adalah seperti Songdo Central Park dan Convensia.

Proyek Song Do International District ini dirancang selama 10 tahun dengan menghabiskan sekitar 40 Miliar Dollar AS, pengeluaran ini sesuai dengan konsep “new smart city” Song Do. Proyek ini adalah contoh dari reklamasi besar yang dirancang secara sistematis, matang, dan informatif karena perencanaannya turut dihadirkan dalam bentuk maket.

Sebelum dilaksanakan proyek ini, telah dilakukan pengkajian baik dari bidang ekonomi, teknis, sosial, budaya, dan lingkungan agar tidak menimbulkan konflik pada beberapa sektor kehidupan di Song Do. Reklamasi di Korea Selatan ini juga menggunakan sistem reklamasi sistem polder.

**Gb 20: Reklamasi Korea Selatan**



## **8. Reklamasi Bandara Kansai, Jepang**

Pada tahun 1987 konstruksi reklamasi dibangun untuk Bandara Internasional Kansai yang memulai operasi konstruksi bandara pada tahun 1991 dengan luas kurang lebih 500 hektar. Konstruksi yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghindari anti gempa di Jepang. Reklamasi ini menjadi pertama kalinya reklamasi daratan yang dibuat lepas dari pesisir pantai. Reklamasi ini didorong atas kebutuhan Kota Jepang dalam pengaksesan transportasi internasional, Bandara Udara Internasional Kansai yang berada di Teluk Osaka.

Bandara Kansai adalah alternatif untuk wisatawan internasional dari arah Greater Tokyo Area. Bandara Kansai mencatat mampu memfasilitasi 780 penerbangan disetiap minggunya untuk penerbangan Asia dan Australia, 59 penerbangan di Eropa dan Timur Tengah, serta penerbangan ke America Utara sebanyak 80 kali penerbangan.

Berhasilnya perencanaan reklamasi ini mempengaruhi kenaikan kualitas hidup dan perekonomian warga. Jepang-pun mendapatkan penghargaan dari American Society of Civil Engineers atas Rekayasa Sipil Monumen dari Milenium Bandara Udara Internasional Kansai, Jepang.

Sebelum dilakukannya reklamasi, Kansai mengundang partisipasi warga sekitar untuk berdiskusi dan menutarakan pendapat, hal ini untuk menghindari kesalahan serta protes dari warga atas kebisingan suara pesawat udara, karena tingginya jadwal penerbangan dari Bandara ini.

**Gb 21 : Reklamasi Jepang**



Jika ditilik dari manfaat positif dari pembangunan teluk Benoa tidaklah kecil. Dengan mengaca pada kesuksesan reklamasi di delapan negara di dunia rupanya menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk menirunya. Tentu saja hal ini terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan di masa depan, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh kabiro Humas dan protokol Pemprov Bali, Ida Bagus Surya dalam wawancara Mei 2018 di kantor pemprov Bali:

bahwa pada akhirnya kita juga mengetahui pembangunan Teluk Benoa di Bali dengan keluarnya perpres 51. Dan itu sudah mengidentifikasi bahwa seakan-akan pemerintah juga pemerintah dewata, semisal seperti memberikan izin untuk itu, ada nuansa yang saya mungkin sedikit bercerita ke belakang antara kedua belah pihak di satu sisi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sempat memperkirakan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Sehingga dalam posisi generasi yang membutuhkan pekerjaan lumayan tinggi ke depannya itu salah satu ranah yang dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dan daerah mungkin untuk pengembangan lapangan pekerjaan. Salah satunya kebetulan posisinya di pembangunan Teluk Benoa karena itu akan memberikan dampak positif terhadap pembukaan lapangan pekerjaan baru.

Ditanyakan oleh Kabiro bahwa yang pemerintah tidak semata-mata berdiri di satu pihak. Keuntungan pembangunan reklamasi juga berdampak secara langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Bali. Slogan yang didengungkan oleh pemerintah tentang “bekerja dan bekerja” harus difasilitasi oleh pemprov sehingga tidak hanya berada di mulut saja, sebagaimana hal ini juga ditegaskan oleh Ida Bagus Surya:

Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat karena data yang saya juga tidak hafal betul sekilas dalam beberapa dekade ke depan akan sangat dibutuhkan generasi muda kita untuk bekerja karena kita juga tidak ingin slogan “Bekerja! Bekerja!” Tapi kalau lapangan pekerjaan gak ada kan bingung juga kita, untuk itulah salah satu itu adalah bagian dari pembukaan lahan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Hal ini memang terkait dengan upaya pemprov Bali dalam pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas. Dengan demikian penyediaan lapangan pekerjaan adalah pendukung bagi program-program lainnya. Namun di satu sisi, ada karakter masyarakat lokal yang memiliki tiga keyakinan mendasar, antara lain adanya beberapa tempat yang mereka anggap suci:

*pertama* tempat suci yang terdiri tidak hanya pure, masjid, gereja, dan apapun itu tempat ibadah harus disucikan,

*kedua*, masyarakat Bali mensucikan gunung,

*ketiga*, laut juga suci.

Itulah yang mendasari salah satu kenapa ada pemikiran berbeda dari masyarakat seakan akan tidak mau menerima laut digoyahkan dengan upaya reklamasi ini. Ketiga ritual ini terkait dengan ritual keagamaan Hindhu yang selama ini menjadi keyakinan masyarakat Bali. Sebagaimana hal ini diungkapkan lagi oleh kabiro humas dan protokol:

Jadi ada beberapa tempat yang biasa mereka pakai untuk acara keagamaan. Jika reklamasi itu diijinkan mereka khawatir tidak bisa menggunakan lagi, kan selama ini ketika ada pembangunan apapun di Bali itu pantai di kapling oleh si pengembang sehingga dikhawatirkan masyarakat tidak bebas lagi untuk melakukan hal-hal yang bersifat ritual kan seperti itu.

Alasan keberatan lain juga diungkapkan Gendo, pemimpin Walhi bahwasannya reklamasi sangat tidak beralasan karena membawa dampak yang negatif sebagaimana yang dipaparkannya:

Pertama dari aspek hukumnya, Teluk Benoa ini kan kawasan konservasi dia berbarengan direncanakan ditetapkan sebagai kawasan konservasi plus waktu merencanakan pembangunan jalan tol, nah dalam rumusan kawasan konservasi oleh beberapa peraturan hukum dinyatakan jelas bahwa kawasan konservasi terlarang untuk direklamasi untuk kepentingan privat. Tapi kemudian itu yang dilanggar oleh Gubernur dengan mengeluarkan ijin di tahun 2012 maka kemudian kita lawan karena ini terjadi ketidakadilan ruang, nah yang kedua adalah Teluk Benoa yang luasnya 1400 ini, 400 hektar adalah kawasan reservoi kawasan resapan air karena ada lima sungai besar yang masuk kesini. Lima sungai besar yang kalau dari gunung hujan muaranya kesini dan ini adalah penampungan air daratan juga banjir daratan, sehingga kalau diuruk sampai 50% dari luasan teluk menurut research dari konservasi internasional kalau di uruk 50% berarti 3 jam hujan di akan mengalami kenaikan 80 cm kalau 6 jam hujan berarti 1,6 m (CNN Indonesia,16 September 2016 )

**Gb 22 :Insight With Desi Anwar-Polemik Reklamasi Teluk Benoa Bali (CNN, 1 September 2016)**



**Gb 23 :Insight With Desi Anwar-Polemik Reklamasi  
Teluk Benoa Bali (CNN, 1 September 2016)**



Sumber: <http://youtube.be/H1p9c9zimio/> insight with Desi Anwar-Polemik Reklamasi Teluk Benoa, Bali.

Gendo sendiri juga mengaitkan bahwa alasan penolakannya adalah alasan ritual suci yang tidak boleh diganggu gugat, sebagaimana yang dikatakannya:

Akan terjadi banjir dan kemudian airnya 24 jam, kalau sekarang kan pasang surut, 4 jam pasang 8 jam surut airnya, tapi kalau 24 jam pasang maka tidak terjadi flushing, flushing-nya terganggu airnya juga tidak akan berkualitas dengan baik sehingga biota-biotanya akan terganggu terdampak buruk yang terakhir juga adalah kawasan ini sudah ditetapkan sebagai kawasan suci oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia dan sudah ditetapkan berdasarkan paruman pandita atau rapatnya pendeta majelis tertingginya bahwa Teluk Benoa adalah kawasan suci yang tidak boleh dilakukan upaya-upaya pengurukan karena Teluk itu mempunyai energi yang suci disini ada banyak pura ada daratan pasang surut yang diyakini sebagai umat Hindu disebut muntik yang diyakini sebagai area suci (wawancara Gendo dengan Desy Anwar dalam acara Insight di CNN Indonesia 16 September 2016).

**Gb 24:Perlawanan Panjang Warga Bali Menolak Reklamasi Teluk Benoa, (CNN Indonesia Rabu, 29 Agustus 2018)**



**Gb 25: DPRD Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ANTARA News, Jumat, 24 agustus 2018)**



Pengentasan kemiskinan memang tujuan utama pemprov Bali dalam melihat sisi positif reklamasi sebagaimana dikatakan oleh I Mangku pastika, dalam wawancara di acara insight CNN Indonesia:

Mau tidak mau, kalau kita mau *growth* mau tidak mau, sekarang tadi, kontroversi paradoks tadi ya kalau kita tidak mau ada orang datang ya memang harus stop investasi Bali selesai segini saja *thats's oke*, bagi saya itupun terjadi tidak apa-apa tapi manusia Bali kan bertambah terus jumlahnya, setiap tahun ada 25 ribu S1 yang tamat di Bali ini dari 53 perguruan tinggi setiap tahun, mau kerja dimana orang itu.

Hal ini menyebabkan ada beberapa pihak yang memang belum bisa menerima reklamasi dilakukan. Namun di pihak lain pemprov menyadari juga kebutuhan generasi muda untuk lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Hal ini rupanya berbenturan dengan keyakinan tentang tempat ritual sebagaimana disebut sebelumnya. Beberapa tempat sebenarnya sudah terbuka tetapi masih ada beberapa desa yang kuat mempertahankan keyakinan ini, sebagaimana diutarakan oleh humas pemprov Bali:

ada beberapa desa adat yang melakukan upacara ritual. Mereka menganggap tempat itu memang sakral sehingga tidak boleh disentuh. Terdapat dualisme pemikiran, di satu pihak pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan untuk pembangunan yang lebih maju dan membuka lapangan baru tapi di pihak lain ada beberapa *policy* yang membutuhkan daerah itu untuk tidak boleh disentuh.

## **B. STRATEGI KOMUNIKASI PEMPROV BALI DALAM KASUS TELUK BENOA**

### **1. Mengadakan forum komunikasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti simakrama dan PB3AS**

Dualisme pemikiran antara pemerintah dan masyarakat tersebut rupanya mendatangkan konflik nilai, sementara demo pun berkembang dari kalangan masyarakat kepada pemerintah Bali untuk sebagai cerminan ketidaksetujuan untuk pembangunan proyek reklamasi. Dalam menangani dualisme sebagai sumber konflik, maka ada strategi yang dilakukan oleh pemprov Bali dalam menyelesaikan persoalan agar dua pihak saling puas. Beberapa bentuk duduk bersama secara terbuka dengan mengundang elemen terkait dilakukan pemerintah Bali, sebagaimana hal ini kembali dinyatakan oleh Ida Bagus Surya:

Ya untuk menengahi dari dua perbedaan pendapat tadi, pemerintah provinsi Bali sudah berusaha untuk melakukan komunikasi. Pada beberapa pertemuan yang dilakukan sempat terjadi beberapa bentrokan. Pemerintah provinsi Bali juga sudah mendengarkan langsung aspirasi mereka terhadap demo-demo yang masyarakat lakukan tapi di pihak lain pemerintah provinsi Bali telah menyiapkan sarana untuk menyampaikan aspirasinya.

Sebenarnya ada dua persoalan yang dihimbau oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dan berharap bisa segera dituntaskan. Gubernur Bali ke-84 menyampaikan pada saat momen Simakrama, Sabtu 29 Oktober 2018 bertempat Wantilan DPRD Prov. Bali.

Berikut penuturan Gubernur terkait dengan permasalahan di atas:

dua persoalan yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat Bali saat ini yaitu tentang kelanjutan reklamasi Teluk Benoa serta permasalahan angkutan umum berbasis online tengah menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat sebagai pemilik kewenangan. Pastika berharap pusat segera mengambil keputusan agar kedua persoalan ini tidak berlarut larut dan dikawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

**Gb 26: Simakrama sebagai Forum Komunikasi Pemprov Bali dan Masyarakat**



Himbauan Pastika bukannya tidak beralasan mengingat demonstrasi yang semakin marak dari dua peristiwa. Imbas selanjutnya tentu saja mengarah kepada munculnya konflik antar masyarakat adat di Bali serta citra Bali sebagai daerah wisata terbesar di Indonesia sebagaimana dikatakan oleh gubernur:

Maraknya aksi demonstrasi terkait dua permasalahan di atas hendaknya menjadi bahan pertimbangan Pusat

untuk segera mengambil langkah karena dikhawatirkan akan berimbas pada citra pariwisata Bali. Bukan saya bermaksud menyalahkan, persoalan ini adalah persoalan mendasar yang menyangkut banyak hal sehingga saya meminta ketegasan dari Pemerintah Pusat untuk segera mengambil keputusan baik terkait reklamasi Teluk Benoa maupun angkutan online, saya tidak mau ada konflik apapun di Bali dan membuat kita sesama saudara Bali bertengkar karena hal ini akan berpengaruh besar pada pariwisata kita.

Pastika berharap demonstrasi tidak usah dibesarkan tetapi lebih baik dimusyawarahkan secara baik-baik tidak dengan kemarahan, tetapi dengan kepala dingin, sebagaimana yang dikatakannya:

Kepada masyarakat baik yang pro maupun kontra agar menyampaikan aspirasi dengan baik, dipikirkan dengan kepala dingin dan tidak menggunakan emosi, sehingga nantinya keputusan terbaik akan dicapai dan semua pihak bisa menerima dengan lapang dada langkah yang nantinya diambil oleh Pemerintah.

Kepada Dinas Perhubungan, Pastika meminta agar secara serius mengawal permasalahan angkutan online ini dan begitu pula halnya kepada Dinas Kehutanan dan Bappeda untuk membuat surat untuk yang ketiga kalinya kepada Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang ditembuskan ke Menteri Perikanan dan Kelautan dan Menteri Kemaritiman untuk permasalahan reklamasi Teluk Benoa, sehingga akan segera tahu jawaban dari pemerintah pusat apakah melanjutkan pembangunan atau menundanya.

Di bagian lain, Pastika juga kembali mengingatkan masyarakatnya akan hadirnya para kompetitor baru dalam dunia pariwisata yang salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Banyuwangi yang tak kalah memiliki pantai yang indah. Kawasan Pantai NTB dan Bayuwangi turut memulai untuk menerapkan sistem Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dan NTB sangat memiliki peluang untuk mengalihkan wisatawan Bali ke NTB.

Kekhawatiran akan akibat lebih dalam tentang persetujuan yang tidak kunjung selesai membuat gubernur selalu melakukan persuasi untuk tetap mempertahankan citra Bali sebagai wilayah dengan konsep wisata sehingga ekonomi masyarakat tetap terbantu. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan pengembangan pariwisata selain pengembangan pariwisata sektor budaya, agar kedepannya sektor pariwisata tetap menjadi andalan lapangan kerja untuk generasi muda kedepannya .

**Gb 27: Mandalika NTB**



Pelaksanaan simakrama sebagai sebuah even yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat dipandu oleh Inspektur Provinsi Bali Ketut Teneng. Dalam acara tersebut, berbagai elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya untuk kemajuan Bali. Sebagai contoh, aspirasi generasi muda juga disampaikan untuk membangun Bali. Dikutip dari website Biro Humas Provinsi Bali, bahwasannya pemuda harus turut aktif membangun dengan memunculkan ide ide kreatif tanpa selalu mengkritik. Seperti Ketut Wenten asal Nusa Penida yang hadir dalam setiap Simakrama memaparkan beberapa persoalan di daerah Nusa Penida yakni diantaranya muncul indikasi kerugian LPD Desa Seibunibus Kec. Nusa Penida Klungkung sebesar 897 juta Rupiah. Meskipun dari Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Inengah Laba mengatakan tidak ditemukannya fakta, namun LPD mendapatkan keuntungan.

Berita pada website BiroHumas Provinsi Bali turut memaparkan bahwa Gubernur Pastika meminta Karo Ekbang memanggil Kelihan Banjar agar menyelesaikan persoalan tersebut hingga jelas. Serta, pasca runtuhnya Jembatan Kuning, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Astawa Riadi setelah berkoordinasi dengan beberapa pihak, maka pada periode Kementrian Pekerjaan Umum selanjutnya akan membantu pembangunan jembatan yang bersifat permanen dan mampu menampung kendaraan bermotor telah mempunyai DED (*Detailed engineering Design*).

Disampaikan oleh Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Jero Gede Suwena Upadesa, bahwasannya peran Desa Pekraman merupakan keterlibatan yang penting dalam menjaga adat, budaya, dan tradisi dari masyarakat Bali, yakni dengan kembali seperti selogan di Bali Sagilik-sagluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, saling asah-asih dan asuh. (<http://www.birohumas.baliprov.go.id> Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

Menurut Pastika, demonstrasi adalah hak masing-masing warga negara. Namun demikian, etika demonstrasi harus dijaga demi kelancaran dan ketenangan. Di pihak lain, ada sebuah peristiwa yang membuat Pastika kecewa. Gubernur Pastika menyayangkan terjadinya penurunan bendera merah putih pada saat terjadinya demonstrasi Tolak Reklamasi teluk Benoa pada tanggal 25 Agustus lalu di kantor DPRD Provinsi Bali. Menurutnya tindakan penurunan bendera dengan menaikkan bendera lain merupakan bentuk pelanggaran undang-undang. Demikian disampaikannya saat melakukan simakrama dengan masyarakat di Wantilan DPRD Provinsi Bali. Tindakan ini juga merupakan bentuk pelecehan terhadap negara. Hal ini dikarenakan bendera, bahasa dan lambang negara diatur oleh undang-undang.

Menurutnya hal ini bukan delik aduan, sehingga polisi bisa bertindak. Pastika hanya menginginkan kesadaran dari masyarakat agar tidak berbuat anarkhis dan melanggar etika. Menurut Pastika hal ini tidak bisa dibiarkan dan yang melakukan seharusnya bisa ditindak sebagai bentuk pelajaran.

Pastika menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014. Berikut alasan Pastika terkait dengan masalah ini:

Mendesak kepada pemerintah sama dengan mem-berontak. Saya tidak tuli, saya juga tidak bongol, tapi saya tidak bisa memaksa presiden untuk mencabut peraturan presiden tentang reklamasi ini. Itu namanya Insurgensi, pemerintah dibawahnya melawan peme-rintah yang di atasnya, itu tidak boleh.

Keluhan terhadap terjadinya aksi demonstrasi tersebut juga dikeluhkan peserta simakrama yaitu I Wayan Suata, asal Kuta. Ia yang bekerja di sektor pariwisata. Dengan demons-trasi tersebut dia mengalami sejumlah kerugian. Berikut kutipan I Wayan Suata tentang kekurangrespekan terhadap aksi demonstrasi yang kurang simpatik:

Sebenarnya bukan masalah pro atau kontra tapi de-monstrasi ini merugikan banyak orang dan kepentingan publik. Banyak tamu yang terlambat dijemput, dan banyak yang ketinggalan pesawat karena macet yang terjadi di jalan.

Menanggapi komplain ini, Pastika mengingat agar para pendemo melakukan aksinya dengan tidak merugikan orang lain. Apalagi jika anarkis, maka Pastika menyebutnya dengan bunuh diri. Artinya membunuh Bali dengan memunculkan kekacauan sehingga citra Bali jatuh. ([http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/2573/Gubernur-Pastika-Sayangkan-Aksi-Penurunan-Bendera-Merah-Putih-saat-Demonstrasi-Tolak-Reklamasi/Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018](http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/2573/Gubernur-Pastika-Sayangkan-Aksi-Penurunan-Bendera-Merah-Putih-saat-Demonstrasi-Tolak-Reklamasi/Diakses%20pada%3A%20Sabtu%2C%2020%20Januari%202018))

Terkait dengan “for Bali” oleh pemerintah Bali mempersepsikan sebagai partner bukan lawan meskipun pada awalnya berseberangan, sebagaimana dijelaskan oleh Bagus Suryo:

Mungkin awalnya seperti berseberangan tapi sekarang sudah menjadi partner. Partner dalam arti karena apapun yang mereka lakukan adalah suatu yayasan yang memang aktif dalam hal penolakan terhadap perusakan lingkungan. Hal ini karena pemerintah daerah tidak hanya akan melihat dari sisi reklamasi saja walaupun dominannya dia disana. Namun organisasi ini juga menangani hal-hal yang bersifat lingkungan secara luas sehingga dia adalah menjadi dia akan memberikan suatu masukan dan kritikan kepada kita terhadap pengelolaan lingkungan di Bali.

**Gb 28 : Forbali Tolak Reklamasi Teluk Benoa**



Dengan demikian tidak ada persoalan antara pemerintah dengan For Bali, sebagai organisasi pecinta lingkungan. Partner akan memberikan kritikan dan masukan sebagai bahan diskusi bagi pemerintah Bali. Sekarang ini, baik For Bali dan pemprov Bali sudah menjadi pihak yang saling mendengarkan. Ketika pemerintah mempunyai pendapat maka for Bali diajak berembung, sebaliknya ketika yayasan punya pendapat maka akan didengarkan juga oleh pemerintah. Dengan demikian tidak ada hal yang bersifat pertentangan yang ekstrem sebagaimana awal-awal pertentangan for Bali terhadap reklamasi.

Beberapa kali pertemuan dilaksanakan secara kekeluargaan. Kritikan ataupun masukan yang disampaikan oleh yayasan for Bali ini selalu didengar oleh pemerintah dan apapun kebijakan yang disampaikan pemerintah daerah diterima oleh mereka. Artinya sama-sama menerima, karena penolakan adalah aspirasi mereka dan pemerintah Bali ber kewajiban menyampaikan aspirasi tersebut. Pada prinsipnya ada isu yang disepakati bersama yaitu isu lingkungan hidup, meski dalam penolakan reklamasi pemerintah bersifat netral. Perlunya komunikasi membuktikan bahwa prasangka semakin mengecil ketika pemerintah Bali mengetahui sepak terjang for Bali, demikian juga sebaliknya. Pada awalnya terkesan konflik yang ekstrem diantara keduanya, namun lama kelamaan konflik mereda karena pemahaman sudah terbentuk ketika sudah duduk bersama.

Bahkan forum PB3AS mendapatkan apresiasi dari pemerintah, sebagaimana yang dikatakan oleh Kabiro Humas dan protokol :

Ya kemarin sudah dapat nominasi 40 inovasi terbaik di kementerian. Dari 3000 inovasi yang masuk, 3200 yang masuk ke departemen jadi kita bersaing antara departemen antara pelebagaan, pemerintah provinsi, kabupaten dan swasta yang melakukan inovasi. Kita termasuk 40 besar, maju ke 5 besar untuk bertahan di penilaian pengkritikan internasional gagal, karena yang masuk hanya satu dari masaki batang namanya itu yang tembus ke tingkat internasional.

Dilansir dari Birohumas, Provinsi Bali, LSM For Bali dan Kontras mendatangi Komnas HAM untuk menyikapi isu Reklamasi Teluk Benoa dan Paguyuban Pedagang Bandara (P2B) di Bandara Ngurah Rai. Nurcholis mengatakan bahwa yang diinginkan adalah untuk kebaikan masyarakat Bali seluruhnya, tidak ada permasalahan mistik dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Komnas HAM bertugas untuk pemantauan dan penyelidikan pada masalah yang dilaporkan, serta melakukan mediasi antar pelapor dan yang dilaporkan, dan yang terpenting memberikan pengertian dan edukasi kepada masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Nurcholis juga menyatakan bahwa yang diusut oleh pihak Komnas HAM adalah apakah benar akan ada degradasi pada kehidupan warga bila dilakukannya reklamasi pada segi ekonomi, sosial dan budaya? Lalu apakah ada potensi bahwa degradasi menyebabkan kerusakan nlingkungan alam? Dan apa benar akan ada intimidasi dari kelompok yang kontra akan reklamamsi?

Selanjutnya pada artikel Komnas HAM Siap Mediasi Masalah P2B dan Reklamasi pada website BiroHumas Provinsi Bali, menjelaskan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut akan dibuka melalui forum untuk konsultasi dan mendapatkan informasi serta validasi atas referensi. Kegiatan ini dimaksud oleh Komnas HAM untuk mencegah perselisihan antar kelompok yang mampu mendorong konflik horizontal.

Gubernur Provinsi Bali Mangku Pastika mengharapkan Komnas HAM mampu menjadi mediator dan fasilitator dalam mendapati solusi, dengan berdiskusi secara transparan dan terlepas dari permasalahan unsur politik demi kemaslahatan masyarakat Bali.

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/579/KOMNAS-HAM-SIAP-MEDIASI-MASALAH-P2B-DAN-REKLAMASI>/Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

Semua komponen berhak mengutarakan pendapat tentang rencana reklamasi Teluk Benoa yang belakangan mengundang pro dan kontra. Namun sebenarnya, rencana ini merupakan sebuah antisipasi jauh ke depan dan mungkin baru dinikmati 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Keberdaaan gagasan reklamasi ini memiliki tujuan agar menjadi alternatif fungsi lahan atas berkembangnya pembangunan di Bali.

Kepala Huas Setda Provinsi Bali, I Ketut Teneng, menjelaskan bahwa secara alami pesatnya laju pembangunan belakangan ini dibarengi dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, migrasi serta alih fungsi lahan.

Mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, bahwa dari tahun ketahun selama dalam kurun waktu 14 tahun lahan produktif mengalami banyak pengurangan. Pada tahun 1997-2011 lahan produktif berkurang mencapai 436 Ha atau sekitar 0,50% tiap tahunnya. Berdasarkan pesatnya pembangunan pada dua tahun terakhir data tersebut kemungkinan sudah berubah dan luas lahan produktif diperkirakan makin berkurang.

Melihat kecenderungan tersebut, Pulau Bali dengan luas yang terbatas terus mengalami penurunan lahan produktif untuk pertanian dikarenakan pesatnya pertumbuhan pemukiman dan pariwisata di Bali. Berangkat dari fakta tersebut, Pemprov Bali memikirkan berbagai upaya dan terobosan dalam menyeimbangkan perkembangan pariwisata dengan tetap berkomitmen menjaga kelestarian pertanian yang menjadi nafas kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat Bali. Oleh karena itu, terobosan ini adalah bentuk wujud dari reklamasi nantinya yang mencegah penyusutan lahan produktif.

Namun proses reklamasi masih perlu untuk didiskusikan dan dikaji lebih dalam agar mewujudkan kemanfaatan untuk segala pihak dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat Bali di masa yang akan datang. Ketut Teneng berharap, semua pihak bisa menyikapi rencana ini dengan pikiran terbuka dan jauh ke depan. Mengenai kajian yang lebih teknis, sepatutnya dipercayakan kepada pihak yang berkompeten.

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/305/Reklamasikoma-Sebuah-Alternatif-Atasi-Alih-Fungsi-Lahan/Diakses> pada: Sabtu, 20 Januari 2018 pukul 12.44 wib)

Gubernur Bali Made Mangku Pastika secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap berbagai masukan baik berupa saran maupun kritik terkait rencana reklamasi Teluk Benoa yang mengemukakan pada diskusi terbuka di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada bulan Mei. Khusus terkait SK Nomor : 2138/02-C/HK/2012 Tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa, tim hukum gubernur mulai bergerak untuk mempelajari serta mendalami berbagai pendapat yang berkembang. Setelah digodok secara intern, berikutnya Pemprov Bali juga akan membahasnya dengan DPRD Bali dan mengundang sejumlah komponen dan praktisi hukum yang lebih berkompeten. Ketut Teneng sebagai Karo Humas berharap, pembahasan secara lebih spesifik mampu menghasilkan solusi yang lebih baik. Pihak pemerintah Bali berharap, semua komponen menyikapi rencana ini dengan jernih dan pikiran terbuka. Menurutnya, rencana ini untuk memberikan solusi kedepan bukan bermaksud untuk menjual Bali. Rencana ini tidak berarti menjual Bali, justru kalau rencana reklamasi ini bisa terealisasi, Bali dapat menambah luas wilayah.

Karo Humas Ketut Teneng juga memaparkan manfaat yang akan dituai ketika berani melakukan reklamasi ini. Diantaranya selain difungsikan sebagai penyangga daratan terkait mitigasi bencana tsunami, reklamasi juga menjadi solusi untuk menaikkan lahan produktif, serta meningkatkan jumlah hutan di Bali yaitu dari 800 hektar 50 persennya akan dibihi hijaukan.

Pemda Bali juga menyatakan alasan bahwa reklamasi juga akan berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan [birohumas.baliprov.go.id](http://birohumas.baliprov.go.id), pada berita Tim Hukum Gubernur Dalam Hasil Diskusi Reklamasi Teluk Benoa, menjabarkan bahwa pertimbangan mereklamasi ini salah satunya adalah untuk pengembangan destinasi. Ketut Keneng berusaha untuk mengarahkan pemikiran masyarakat akan banyaknya lulusan dari universitas dan sekolah kejuruan yang setiap tahunnya meningkat. Apabila tidak diantisipasi dengan menghadirkan lapangan kerja, hal ini akan menurunkan angka kesejahteraan masyarakat akibat tingginya angka pengangguran.

Selain itu, pariwisata Bali yang sangat dikenal baik masyarakat Indonesia maupun dari Mancanegara membutuhkan alternatif pariwisata baru di Bali dimana persaingan pada bisnis pariwisata sangat ketat. Ketut mempunyai harapan besar agar rencana ini disikapi dengan bijak dan mempertimbangkan potensi besar kedepannya tidak hanya pada prespektif yang negative.

Kemudian Karo Humas turut menegaskan kembali mengenai SK Gubernur yang belum memberikan ijin atas kegiatan reklame. SK tersebut masih banyak memiliki batasan-batasan dan peraturan agar pihak Investor segera memenuhi peraturan dan persyaratan yang diperlukan. Pada Klausul SK ke-empat, menyebutkan bahwa PT. Tirta Wahana Bali Internnasional (TWBI) yang memiliki ijin diwajibkan untuk menyesuaikan dan mentaati peraturan yang sudah ditentukan pada perundangan yang berlaku, serta wajibnya melakukan pengkajian, dan menyusun AMDAL dalam pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Kawasan Teluk Benoa

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/302/Tim-Hukum-Gubernur-Dalami-Hasil-Diskusi-Reklamasi-Teluk-Benoa>/Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

Selanjutnya pada artikel Reklamasi untuk Kemajuan Bali pada situs website Birohumas, baliprov.go.id menjelaskan bahwa kebijakan PemProv Bali mengenai ijin pemanfaatan reklamasi sudah melalui proses diskusi, baik dari permohonan yang diajukan PT. TWBI, rekomendasi DPRD Prov. Bali, dan sampai keluarnya Keputusan Gubernur. Meskipun rekomendasi tersebut masih perlu melalui banyak pengkajian ulang, singkronisasi atas hubungan dengan peraturan UU, serta tahapan perijinan yang dimiliki oleh investor yang mana hal tersebut menjadi kebijakan dari Pemerintah Kota/Kabupaten.

Meskipun rekomendasi tersebut telah dikeluarkan, namun hal tersebut belum cukup untuk menjadi acuan diijinkannya proses reklamasi di Teluk Benoa. Rekomendasi tersebut hanya sebatas sebagai ijin investor untuk melakukan penelitian, pengkajian, survey, serta perijinan lainnya untuk memenuhi kebutuhan perijinan dari Keputusan Gubernur yang mana perlu untuk seksama memperhatikan hasil kajian tersebut agar sama sama mengetahui pilihan terbaik atas nasib Kawasan Teluk Benoa.

Kajian tersebut dapat disebut sebagai kajian *feasibility* atau diartikan sebagai studi yang memiliki tujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah usaha atau bisnis yang meliputi aspek *financial benefit*.

Proses pengkajian *feasibility* perlu untuk mengacu pada berbagai perundangan-undangan yang berlaku, hal ini untuk mensinkronkan, dan menyetarakan kebijakan antara Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 mengenai kawasan perkotaan di daerah Denpasar, Bandung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita). Mengenai rancangan Perda Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, dan Arahan Peraturan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. Dilain sisi pemerintah Bandung sedang mempersiapkan Raperda Arahan Peraturan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Bandung sebagai tindaklanjut amanat UU No. 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. Dengan tegas pemerintah Bali mencatumkan persyaratan wajib untuk dipenuhi oleh calon Investor dalam mereklamasi Teluk Benoa. (<http://birohumas.baliprov.go.id/index.php/artikel-detail/53/REKLAMASI-TELUK-BENOA-UNTUK-MASA-DEPAN-BALI/>, akses 20 Juni 2018)

Sementara itu, wakil ketua DPRD Bali, Ketut Suwandi mendukung agar *Feasibility Study* (FS) yang lebih komprehensif terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa tetap dilanjutkan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui apakah reklamasi layak atau tidak untuk dilakukan. Suwandi meminta agar semua pihak tidak berandai-andai tentang dampak reklamasi jika itu nantinya dilaksanakan. FS tak hanya dilakukan oleh pihak investor.

Sebaiknya seluruh komponen masyarakat memberi kesempatan pada pihak yang berkompeten untuk melakukan kajian. Presentasi di Bappeda maupun DPRD terbuka bagi media. Semua pihak tetap menjaga kondusifitas Bali menjelang pelaksanaan berbagai *event* internasional seperti Miss World, APEC, BDF dan lainnya.

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/301/Dewan-Minta-Kajian-Reklamasi-Teluk-Benoa-Dilanjutkan/Diakses> pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

Dilansir dari PhriBali.or.id Tradisi diskusi di Bali yang melibatkan berbagai komponen masyarakat sebagaimana telah disinggung di atas disebut dengan simakrama. Simakrama sudah dilakukan puluhan kali. Beberapa kali forum ini membahas tentang kasus Teluk Benoa yang sampai saat ini masih dalam upaya penyelesaian, selain topik lain yang dianggap urgent bagi eksistensi Bali. Dengan tema Prospek Pariwisata Bali Simakrama Gubernur Bali yang dilaksanakan di Gedung Sabha Utama kantor Gubernur Bali pada tanggal Sabtu, 11 Februari 2017, Karo Humas dan Protokol menyampaikan simakrama kali ini lebih sesuai dengan upaya Pemprov dalam mendorong kemajuan sektor yang menjadi lokomotif bagi perekonomian Bali. Hal ini didorong atas tantangan sektor pariwisata di Bali yang memiliki pesaing yang ketat. Melalui agenda inin Gubernur Pastika menginginkan berbagai masukan mengenai pembangunan pariwisata dan menghadirkan diskusi dari berbagai elemen masyarakat untuk hadir di acaraa Simakrama. (<http://www.phribali.or.id/general/simakrama-gubernur-bali-prospek-pariwisata-bali.htm>, akses 20 Mei 2018)

Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga menggelar diskusi terbuka membahas rencana reklamasi Teluk Benoa. Diskusi digelar di ruang Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur, Sabtu, 3 Mei 2017 berlangsung hangat. Hampir seluruh komponen yang diundang hadir dan diberi kesempatan bicara. Gubernur Mangku Pastika mengucapkan terima kasih atas kehadiran komponen masyarakat dalam acara yang dinilai sangat penting tersebut. Pastika juga mengapresiasi berbagai saran dan masukan konstruktif terhadap rencana pembangunan yang tengah bergulir.

Berbagai respon dan tanggapan dinilai sebagai wujud kepedulian dan kecintaan terhadap Bali. Hanya saja, Gubernur berharap kecintaan dan kepedulian tersebut diletakkan secara proporsional demi kemajuan Bali. Menurutnya, reaksi pro dan kontra terkait rencana reklamasi Teluk Benoa bergulir tanpa arah yang jelas. Diskusi yang melibatkan seluruh komponen terkait diharapkan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang apa yang akan dilaksanakan di kawasan Teluk Benoa.

Suasana diskusi berjalan dinamis. Kelompok yang pro dan kontra, masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Guru besar FH Unud Prof.Dr. Ibrahim R,SH,MH dan Ketua WALHI Wayan 'Gendo' Suardana tetap berharap SK Gubernur Bali Tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa dikaji ulang. Di sisi lain, friksi juga terjadi diantara perwakilan masyarakat yang berasal dari kawasan sekitar Teluk Benoa. Secara garis besar, masyarakat setempat berharap agar Pulau Pudut direhabilitasi karena luasnya makin berkurang.

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/300/Gubernur-Apresiasi-Saran-dan-Masukan-Terkait-Rencana-Reklamasi-Teluk-Benoa>/Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018 pukul 13.00 wib).

Ketut Teneng, Kabiro Humas menjelaskan bahwa, kegiatan Simakrama ini bertujuan memberi kesempatan bagi segenap komponen masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mendiskusikan rencana pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perairan Teluk Benoa yang belakangan memicu pro dan kontra. Dengan demikian informasi yang berkembang tidak sepotong sepotong dan tidak bias. Menurut Teneng, undangan untuk menghadiri diskusi telah beberapa kali disampaikan Gubernur Mangku Pastika pada beberapa kesempatan. Pada ajang diskusi itu, komponen masyarakat yang hadir dipersilahkan menyampaikan berbagai pendapat mengenai rencana reklamasi Teluk Benoa. Mereka yang hadir adalah pihak akademisi, DPRD, LSM, perwakilan organisasi, mahasiswa hingga komponen masyarakat lainnya Kegiatan ini sengaja digelar pada hari libur agar semua pihak berkesempatan hadir. Tidak ketinggalan, pihak media juga diundang resmi dalam acara ini. Undangan resmi lainnya antara lain Pimpinan dan Anggota DPRD Bali, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua BPK Perwakilan Bali, Bupati/Walikota se-Bali, para rektor dan BEM sejumlah universitas di Denpasar, PHDI, KIP, KIP, PWI, AJI, Ketua Ombudsman Provinsi Bali, MUDP dan Pimpinan SKPD Provinsi Bali.

Selain itu, Undangan resmi juga disampaikan kepada tokoh masyarakat di kawasan rencana reklamasi antara lain Lurah Tanjung Benoa I Wayan Kembar beserta tokoh masyarakat setempat, Lurah Benoa I Wayan Solo, Lurah Jimbaran, Kedonganan dan Tuban. Bendesa adat dari Tanjung Benoa, Tengkulung, Kelan, Bualu, Kedonganan, Jimbaran, Tuban, kelompok nelayan kawasan teluk Benoa, Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER), pemerhati tata ruang dan Ketua LPM dari wilayah itu juga diundang. Dengan banyaknya peserta yang hadir, maka semakin lengkaplah uraian pembicaraan reklamasi teluk Benoa tanpa bias informasi. Diskusi diharapkan menjadi bukti transparansi pemda Bali untuk masalah ini.

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/297/Gubernur-Undang-Masyarakat-Bicara-Soal-Reklamasi-Tanjung-Benoa>/Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

Berdasarkan berita yang dikeluarkan oleh Kemendagri.go.id, Pada simkrama yang ke 91 dengan mengusung tema Evaluasi Akhir Tahun pada Desember 2017, mendiskusikan terkait kinerja pememrintah dan mengevaluasi kinerja pemerintah dengan mengundang beberapa pihak untuk berbicara. Hasilnya menyampaikan bahwa pariwisata di Bali dalam kondisi yang aman. Pastika mengharapkan ditahun kedepan kepemimpinanya dapat melahirkan program baru yang dapat terealisasi dengan baik. (<http://www.kemendagri.go.id/news/2017/12/31/gubernur-bali-gelar-simakrama-evaluasi-akhir-tahun>)

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengambil inisiatif mengangkat persoalan alih fungsi lahan pertanian dalam pelaksanaan Simakrama ke-89 yang digelar pada hari Sabtu 27 Mei 2017. Rencana tersebut diinformasikan melalui siaran persnya oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Serda Provinsi Bali. Dia mengundang seluruh elemen dan tokoh masyarakat, khusus-nya mereka yang peduli terhadap pelestarian lahan pertanian untuk hadir dan memberikan solusi yang aplikatif. Pemprov Bali juga menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya antara lain Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra dan Ketua Majelis Utama Subak Provinsi Bali.

(<https://www.beritabali.com/read/2017/05/24/201705240008/Simakrama-Gubernur-Digelar-Minggu-Ini-Angkat-Tema-34Alih-Fungsi-Lahan-dan-Solusinya34.html>)

Beberapa forum komunikasi telah dipersiapkan oleh pemerintah Bali sebagai saluran komunikasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah. Masing-masing forum tidak hanya digelar sekali, sebagaimana dinyatakan oleh Ida Surya:

Ada forum yang namanya PB3AS Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja Itu kami adakan **setiap minggu pagi**. Masyarakat boleh menyampaikan aspirasinya, kritikan-nya terhadap apapun itu baik itu terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan. Masyarakat juga boleh secara terbuka ngomong di podium itu yang dilakukan hari minggu pagi. Ada juga kegiatan simakrama. Dalam kegiatan ini, gubernur akan bertemu langsung dengan masyarakat secara terbuka.

Seluruh elemen masyarakat diundang **setiap bulan sekali diakhir bulan hari sabtu**. Itulah dua media yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat untuk berbagai permasalahan apapun, termasuk hal yang berkaitan dengan reklamasi.

**Gb 29 :Mangku Wayan Suteja (Aktivis For Bali)  
BerBicara Tolak Reklamasi**



PB3AS 27 Maret 2016 - Mangku Wayan Suteja  
( aktivis For Bali )

(Sumber: [http://youtube BP3AS 27 Maret 2016-Mangku Wayan Suteja](http://youtube.com/BP3AS), akses tanggal 22 September 2018).

Iklim komunikasi dalam forum terkendali dan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masing-masing desa adat melakukan koordinasi siapa dan apa yang ingin dikatakan dalam forum tersebut sehingga oknum penyusup ataupun provokator tidak mudah masuk, sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Ida Bagus Surya:

Nah kenapa terjadi komunikasi yang baik, pengolahan informasi yang baik, karena kebetulan ada tipikal yang saya katakan tadi. Secara umum masyarakat Bali tidak ingin ada keributan tidak ingin ada kerusuhan maupun bentrok antar kelompok. Sehingga mereka akan mengkoordinir diri mereka untuk melakukan unjuk rasa secara damai apabila pendapat mereka memiliki perbedaan terkait reklamasi.

Dengan kata lain, sasaran pada kegiatan komunikasi ini tidak dikhususkan untuk desa adat yang terkena reklamasi, namun melibatkan kepentingan untuk semua masyarakat di wilayah Bali, sebagaimana disampaikan oleh Ida Surya

Setelah dikaji yang awalnya hanya terlihat akan dampaknya saja, namun setelah dikaji yang akhirnya menyentuh budaya ritual ritual sehingga mengembang menjadi wilayah yang teritorialnya tidak terkena dampak langsung. Karena desa-desa lain pun juga melakukan demo. Namun mereka juga melakukan hal yang sama. Itulah yang saya katakan tadi itu, terkoordinir baik oleh koordinator lapangan mereka.

### **C. PERAN KEARIFAN LOKAL BALI**

Beberapa kearifan lokal Bali ternyata memberi peran yang cukup signifikan bagi harmonisasi. Salah satu budaya yang khas adalah pakaian “udeng”. Pakaian ini mengandung filosofi yang bijak dalam mengendalikan perilaku manusia. Pakaian ini juga berperan ketika manusia berinteraksi dengan orang lain, sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Ida Surya:

Pakaian pun di Bali ikut berperan. Pendemo dipantau langsung oleh desa adat mereka dengan pakaian, maaf ya saya terus terang saja buka di sini kalau orang Bali melakukan hal-hal seperti itu dia pakai udeng, udeng itu tujuannya adalah untuk mengikatkan pikiran kita supaya tidak liar itu mitosnya dulu, filosofinya. Dengan filosofi pakaian adat, mereka mengadakan suatu gerakan penolakan. Pakaian akan memfokuskan pada sesuatu hal yang memang tujuan utama supaya tidak

membias. Kalau dibiarkan dengan leluasa kadang-kadang emosional mereka itu tidak terkendali apalagi kalau masyarakat sudah berkumpul susah dikendalikan. Tapi dengan gaya adat seperti itu sejak awal mereka ditekan untuk mengikatkan pikiran kamu supaya fokus jangan bias.

**Gb 30 : Pakaian Udeng sebagai salah satu bentuk kearifan lokal Bali**



Dengan kearifan lokal seperti pakaian tadi, demo-demo yang terjadi di Bali termasuk yang berkaitan dengan reklamasi selama ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan aman. Tetapi di pihak lain tetap saja dari pemerintah tetap minta bantuan keamanan. Hal ini hanya bersifat antisipasi. Keamanan tetap berjaga di lokasi-lokasi tertentu untuk mengecek apakah ada orang lain yang masuk sebagai penyusup atau tidak.

Faktor keagamaan dan media komunikasi yang tepat akan sangat betul-betul mendukung iklim komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat adat Bali. Hadirnya tokoh-tokoh adat juga membawa dampak yang tidak kecil bagi

terciptanya kesepakatan kedua belah pihak Meski tidak sedikit bentuk pertemuan dengan kesepakatan yang alot, namun bagi pemerintah Bali tetap pada prinsip bahwa kesepakatan harus dijunjung tinggi. Sebagaimana hal ini dipaparkan oleh Ida Surya selaku Kabiro Humas dan Protokol:

Rembug-rembug atau musyawarah tetap dilakukan dari pihak pemerintah ketika menginginkan komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat menentukan tokoh-tokohnya walaupun kadang-kadang tidak ada titik temu dalam diskusi. Tetapi pada prinsipnya pemerintah provinsi Bali pada akhirnya juga menyesuaikan dan mengikuti apa keinginan masyarakat.

Pemerintah Bali pada prinsipnya memposisikan diri sebagai penengah antara keinginan pusat dengan keinginan masyarakat Bali. Hal ini dikarenakan dasar hukum reklamasi teluk Benoa merupakan peraturan presiden. Namun demikian, keterlibatan pemerintah provinsi tentu saja tidak bisa dielakkan. Oleh karenanya pemerintah Bali berupaya untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Cara yang selama ini ditempuh masih bersifat musyawarah diantara dua pihak tanpa rekayasa. Kalaupun selama ini masyarakat adat menolak reklamasi, maka pemprov Bali juga mengatakan secara jujur bahwa kepada pemerintah pusat bahwa telah terjadi penolakan di awal.

Media yang digunakan tentu sangat beragam mulai dari media lama dan media baru. Media cetak dan elektronik yang sampai saat ini masih relevan sebagai media massa tetap dipilih oleh pemprov Bali. Disamping itu, media sosial yang sedang dalam trend juga tidak kalah. Semua media digunakan

sebagai sarana berdialog antara masyarakat adat dengan pemprov Bali. Pemprov memiliki website resmi birohumas. baliprov.go.id. Ada juga instagram @protokolbali sebagai media sosial yang sangat digemari kaum milenial meskipun baru memiliki followers kurang dari 500 orang (<https://www.instagram.com/protokolbali/akses> 26 September 2018). Informasi yang ditulis antara lain berupa semua kegiatan terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan Bali termasuk perkembangan komunikasi dalam forum-forum PB3AS maupun Simakrama. Dengan demikian masyarakat yang tidak mengikuti langsung 2 forum tersebut tetap masih bisa menyimak perkembangan keadaan.

Selain mengandalkan media komunikasi, tentu saja pemerintah Bali tidak bisa meninggalkan peran ketua adat sebagai pemimpin pendapat. Struktur masyarakat Bali dengan kearifan lokal yang teramat kental cenderung menyerahkan keputusannya ke publik figur atau tetua adat mereka sebagai orang yang memiliki *legitimate* kekuatan yang lebih besar. Namun demikian tetua adat sendiri sifatnya bertingkat atau memiliki strata sebagaimana yang dinyatakan oleh Ida Bagus Surya:

Lembaga adat yang ada di Bali juga ada stratanya seperti pemerintahan dinas. Jadi, desa adat yang ada di tingkat desa dipimpin oleh tetua desa adat. Tetua adat itu punya atasan lagi dia di tingkat kecamatan dan kabupaten disebut tetua madian terus di tingkat kabupaten juga ada. Kalau di tingkat provinsi namanya tetua adat utama. Jadi pendekatannya adalah melalui struktur ini. dulu pada akhirnya kita bertemunya di tingkat desa. Beberapa kali diadakan pertemuan baik

dari pihak pemerintah dengan struktur desa adat. Memang ucapan tetua yang didengar itu adalah memang tetua yang di tingkat desanya apapun kata mereka.

**Gb 31: Pelantikan kelian Adat**



***Delod Peken, Kelian desa adat Pakraman Buleleng Ir. Nyoman Sutrisna, MM Sabtu (10/02/2018) dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Buleleng.***

Proses demokrasi di Bali sangat transparan, yang dimulai dari pemilihan pendesa/kelihan adat. Proses ini sudah terjadi dari leluhur dulu sampai sekarang. Sehingga siapa pun yang terpilih sebagai pendesa adat adalah benar-benar orang yang bisa menjadi tauladan. Jadi tidak ada nuansa politis seperti yang banyak terjadi di Pilkada di banyak tempat di Indonesia. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Ida Bagus Surya:

Mereka yang terpilih adalah siapa yang bisa mempunyai kepribadian yang baik. Orangnya lebih bijaksana. Sehingga ketika beliau akan ngomong didengarkan betul oleh rakyatnya. Sebagaimana halnya di Jawa, kalau seorang kyai bicara pasti di dengar oleh umatnya, di sini

juga seperti itu. Jadi yang terpilih itu adalah orang-orang yang betul-betul dituakan dan diteladani karena konteks seorang pendesa adat ini gak boleh tersentuh oleh nuansa kepentingan lain atau politis.

Emosional negatif atau marah apalagi agresif tidak mendapat tempat di Bali. Kalaupun ada anggota masyarakat yang “nyeleneh” satu dua kali biasanya hukum sosialnya lumayan berat. Mereka akan malu karena sampai di tegur oleh tetua desanya. Bahkan semangat untuk tidak melakukan konflik dalam memecahkan masalah juga diimplementasikan dalam skala yang lebih besar yaitu bagaimana sikapnya sebagai tuan rumah di daerah wisata dengan tamu dari manca negara, sebagaimana diungkapkan oleh kepala Biro Humas dan Protokol:

jadi bagaimana ya dengan karakter orang Bali yang pada intinya dia tidak ingin terjadi kericuhan karena kita tahu mungkin di Bali mutlak harus bergantung dengan kenyamanan dan keamanan untuk bisa kita hidup. Dengan begitu orang-orang pada datang dan wisata ke Bali merasa tenang dan aman juga. Ketika wisata sudah bisa berkembang, tentu kita bisa cari kerja dan menghidupi keluarga kan seperti itu. Beda dengan daerah lain yang mungkin mereka punya sumber daya alam. Kalau kita hanya mengandalkan itu yang mempunyai dampak multi efek player ketika berwisata seperti itu.

Anarkisme disadari sepenuhnya oleh masyarakat Bali bahwa hal ini tidak menguntungkan diri mereka sendiri. Hal ini disebabkan bukan hanya semata-mata sektor wisata saja

yang mungkin menjadi sepi, tetapi sektor ini akan menyeret sektor lainnya juga seperti transportasi, kuliner, UMKM, dan sebagainya. Jadi sedikit dari orang Bali yang menginginkan kekacauan. Kalaupun ada mungkin ya bisa dihitung dengan jari. Kadang-kadang ada masyarakat dengan vokal keras tetapi sampai saat ini pihak pemerintah Bali masih bisa mengatasi sehingga gejolak tidak begitu besar.

Dalam manajemen konflik beberapa prinsip akan dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan, diantaranya prinsip partisipatif. Upaya pemerintah Bali dalam menciptakan prinsip partisipatif utamanya di internal dikembangkan dengan pola koordinasi yang kuat di dalam pemerintahan. Terlebih hal ini dilakukan dalam menghadapi kemungkinan apabila tiba-tiba perpres turun dan harus menerapkan isi perpres. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Bagus Suryo:

Tentunya secara keseluruhan Pak gubernur beserta seluruh jajarannya dan termasuk dengan musyawarah pimpinan daerah ya selalu berkoordinasi dan melakukan rembug bersama. Jadi rapat koordinasi itu selalu terjadi mengikuti perkembangan-perkembangan dari gejolak di masyarakat. Tentunya hasilnya juga dikomunikasikan langsung kepada di masyarakat.

Pemerintah Bali berusaha untuk selalu menyampaikan aspirasi masyarakatnya tanpa tendensi apa-apa. Akhirnya pemerintah sekarang juga sejalan dengan masyarakat, tidak ingin reklamasi itu dilakukan. Namun karena surat itu ber-sifat universal tidak hanya untuk Bali saja termasuk daerah lain juga sehingga masyarakat Bali dalam posisi dilematis.

Penolakan hanya sepihak pada masyarakat Bali. Mereka menuntut untuk menghentikan reklamasi. Tetapi di pihak lain perpres itu juga mencakup Indonesia secara luas.

**Gb 32 :Massa dari 39 Desa Adat di Bali Meminta Pemerintah Untuk Membatalkan Perpres 51 Tahun 2014 (ANTARA FOTO/Wira Suryantala), CNN 25 Agustus 2014**



**Gb 33 : Reklamasi Teluk Benoa Bali, Pro dan Kontra Tak Kunjung Usai (Liputan 6, 24 Mei 2015)**



Kadang-kadang ada pihak tertentu yang tidak menginginkan kedamaian dalam konteks reklamasi sukses. Pemerintah Bali juga telah mengantisipasi hal ini dengan cukup mengandalkan partisipasi masyarakat di tingkat desa.

Selalu ada saja orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang kadang-kadang ingin mengail di kekeruhan. Langkah pemerintah adalah melakukan beberapa kali pendekatan kepada desa adat dalam suatu gerakan penolakan. Masing-masing dari korlap harus tahu benar kondisi riil barisannya, sehingga tidak mungkin disusupi oleh kelompok-kelompok lain. Masing-masing tokoh harus hafal siapa-siapa yang ikut berdemo. Berdemo tidak dilarang oleh pemerintah, namun harus dilakukan dengan cantik dan baik. Kekerasan akan menimbulkan kekacauan. Tentu saja kerugian yang akan didapat jika demo anarkhis yang dipilih, sehingga pemerintah Bali selalu siap melakukan pengawalan.

Komunikasi pemerintah Bali dengan masyarakatnya setidaknya menyiratkan sebuah pesan untuk keamanan Bali, demi kelangsungan kehidupan masyarakat Bali, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bagus Suryo:

Dari pemerintah saya menginginkan apapun pendapat masyarakat, apapun kepentingan masyarakat terhadap hal itu pada intinya adalah tetap menjaga kondusivitas keamanan Bali. Sehingga terciptalah kenyamanan bagi para wisatawan untuk bisa hidup di Bali. Karena ranahnya sudah di pusat, pemerintah daerah hanya bisa memfasilitasi atas aspirasi masyarakat

Untuk menjaga interaksi sosial tetap *sustainable*, pemerintah provinsi Bali secara berkesinambungan menjaga agar harmonitas itu terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Ada dua hal cara yang ditempuh pemerintah Bali: *pertama*, **pertemuan gubernur langsung kepada masyarakatnya** untuk dialog. Seluruh elemen masyarakat bisa langsung menyampaikan apa yang mereka inginkan. *Kedua*, disini ini ada **forum kerukunan antar umat beragama** juga sangat membantu pemerintah provinsi Bali menjaga rasa toleransi keharmonisan untuk Bali bisa aman.

Munculnya pemikiran yang kedua disebabkan karena Bali tidak boleh hanya menjaga masyarakat lokalnya saja tapi ada kehidupan heterogen. Harus ada upaya saling menjaga keharmonisan antara masyarakat pribumi dengan pendatang. Melalui paguyuban-paguyuban mereka itulah akan dikomunikasikan segala sesuatu untuk kepentingan Bali. Ada yang namanya “Pasundan”, terus yang di Sumatera Barat : “Minang Saiyo.” Sebagaimana masyarakat Bali, mereka juga sering melakukan pertemuan secara intensif setiap bulan. Dengan demikian setiap pesan kebijakan-kebijakan pemerintah itu disampaikan melalui pertemuan pertemuan mereka.

Prinsip keharmonisan lain yang mendukung keharmonisan pola hubungan antar elemen masyarakat adalah prinsip Tri Hita Karana, sebagai ajaran untuk menyeimbangkan hubungan dengan Tuhan, dengan manusia dan dengan lingkungan sekitar, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Bagus Suryo:

Bali pemerintahannya tidak sama dengan di beberapa daerah ada dinas yang ada di Indonesia. Adat mereka itu hidup tidak hanya secara administrasi, tetapi hidup secara adat yang juga dibungkus dengan keagamaan. Setiap hari kita melakukan keagamaan akhirnya lahirnya sebuah kekeluargaan. Kita harus seimbang dalam hubungan dengan Tuhan kemudian antara manusia dan lingkungan. Kita ada namaya *Tri Hita Karana*, itu konsep yang ada di Bali dan akhirnya menyebar ke penduduk pendatang. Karena kita melakukan hal seperti itu akhirnya budaya ini juga dilakukan oleh penduduk pendatang, itulah yang menyebabkan di Bali rasa kekeluargaannya sangat dekat.

Dengan demikian, konflik jarang terjadi di Bali. Pemerintah provinsi Bali juga sangat konsen mengatasi konflik reklamasi ini. Beberapa penolakan dan ketidaksetujuan tentang reklamasi membuat pihak pemerintah menghentikan pembangunan. Dengan demikian tidak muncul pemberontakan besar. Jadi selama ini kondisi masih terkontrol. Hal ini mungkin yang menyebabkan mengapa reklamasi Teluk Benoa itu tidak seperti di Jakarta.

Dalam konsep Tri Hita Karana, masyarakat Bali sangat menghargai dan menghormati lingkungannya. Beberapa upacara-upacara tertentu mencerminkan hal bagaimana kita menghargai lingkungan. Ada yang namanya tumpeg udong, tumpeg tanaman, ada namanya tumpeg landak. Jadi itu adalah contoh yang diyakini masyarakat agar kita menjaga lingkungan ini agar lestari dan untuk kebutuhan kita. Adapun yang kedua adalah bagaimana kita menghargai sesama kita jadi hormati sesama kita terus yang ketiga adalah bagaimana kita menghormati Tuhan. Jadi Tri Hita Karana yang menjadi pegangan hidup masyarakat Bali disamping ada lagi satu prinsipnya adalah Tat Twam Asi, sebagaimana dijelaskan oleh kabiro Humas dan protokol ini:

Tat Twam Asi itu adalah hidup bertoleransi antar kita. Intinya “Aku adalah kamu, kamu adalah aku”, sehingga kita dapat merasakan persaudaraan walaupun mereka datang dari Sumatera, Kalimantan, Irian, Jawa. Jadi dengan prinsip Tat Twam Asi itulah yang membuat kita bisa hidup satu tanah di Bali untuk menjadi keharmonisan tapi yang berkaitan dengan reklamasi tentunya Tat Twam Asi itulah yang menjadi kata kunci.

**Gb 34: Tri Hita Karana**



Dengan demikian kearifan lokal tersebut setidaknya membantu dalam mengendalikan konflik antara masyarakat dengan pemerintah provinsi Bali. Kearifan lokal bisa mencegah masyarakat untuk bertindak anarkis kepada sesamanya.

### **LATIHAN**

1. Berikan pendapat saudara terkait reklamasi dalam perspektif masyarakat adat bali.
2. Apa perbedaan sudut pandang masyarakat Bali dalam menanggapi reklamasi dan bagaimana reklamasi di negara lain?
3. Apa hubungan anantara kearifan lokal dengan penyelesaian konflik penolakan reklamasi Teluk Benoa Bali?
4. Analisislah keadaan sosial di daerah tempat saudara tinggal, temukan konflik disana, dan paparkan solusi untuk penyelesaian konflik tersebut.

## **BAB V**

### **ANALISIS KRITIS TERHADAP STRATEGI KOMUNIKASI PEMPROV BALI**

**S**ebuah proyek reklamasi atau pengelolaan memperbaiki kawasan, tentu idealnya memiliki tujuan yang positif. Tidak saja untuk tujuan pengelolaan kawasan yang sudah tidak produktif, namun juga akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Banyak proyek reklamasi yang berjalan mulus tanpa batu sandungan. Sebagaimana hal ini dapat dijumpai dalam negara antara lain Dubai, Singapura, Mongolia, Belanda, Hongkong, Korea Selatan, China, dan Jepang. Di ke- 8 negara tersebut banyak mendapatkan acungan jempol masyarakat dunia karena kesuksesannya. Berbeda dengan Indonesia, reklamasi Jakarta dan reklamasi teluk Benoa Bali menuai penolakan dan demonstrasi dari masyarakat setempat. Bahkan penolakan tersebut bisa disebut berlarut-larut hingga belum mendatangkan kata sepakat. Pemerintah dan masyarakat menjadi saling menuduh bahwa masing-masing menyembunyikan suatu kepentingan yang harus dimenangkan.

Berkaca dari 8 negara yang sukses, akan bisa dilihat apa dampak yang terjadi dalam reklamasi tersebut. Hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**TABEL I**  
**REKLAMASI SUKSES DI 8 NEGARA DAN INDONESIA**

<b>NO.</b>	<b>NEGARA</b>	<b>MOTIF REKLAMASI</b>	<b>keterangan</b>
1.	Dubai	Lambat laun minyak mengering sehingga dialihkan ke bisnis pariwisata	Sukses, proyek pengurukan bekerjasama dengan Van Oord Dredging, Belanda perusahaan ahli reklamasi dunia
2.	Singapura	Daerah dengan sebutan Pulau Blakang Mati. Pengurukan dilakukan dengan menggabungkan pulau pulau kecil di Pulau Sentosa seluas 500 Ha, yang kini menjadi pusat wisatawan dunia dengan menawarkan fasilitas hiburan, hotel, vila, dan arena permainann	Sukses, berfokus pada menjaga sustainability Pulau Sentosa

3.	Mongolia	Area revitalisasi tambang di Ereen yang bertransformasi menjadi padang rumput untuk penggembalaan ternak masyarakat lokal.	Sukses, proyek reklamasi dapat menghasilkan sumber daya air yang sebelumnya keterbatasan air
4.	Belanda	Reklamasi proyek di Pelabuhan Maaksvlakte 1 dinilai mencapai kapasitas maksimal dan membutuhkan Maasvlakte 2 yang dapat diberdayakan	Sukses, menghasilkan pelabuhan baru yang diberdayakan untuk peningkatan komersial
5.	Hongkong	Mengubah pulau terpencil menjadi kota baru yakni Area Tung Chung, dengan menghadirkan magnet Bandara Internasional Hongkong dan pusat wisata belanja.	Sukses, dari kota Terpencil berubah menjadi Kota Baru

6.	Korea Selatan	<p>Bermotif untuk pengembangan The New Smart City, mendorong pembangunan di Song Do International Business District. Pembangunan ini menjadi pertemuan internasional seperti ASEAN Games 2014 dan The World Education Forum 2015, serta semakin mendapatkan perhatian penuh setelah pemutaran Video Gangnam Style</p>	<p>Sukses, hal ini didukung oleh faktor perencanaan yang matang, sisteatis, dan informatif dengan membuat maket.</p>
7.	China	<p>Reklamasi dimuai sejak dinasti Qing, ketika membutuhkan perluasan pada pengelolaan argikultural, pengembangan kawasan industry dan pemukiman <i>eco-city</i></p>	<p>Sukses, Cao Fei Dian direklamasi berdasarkan perencanaan yang matang dan dirancang dengan daya Tarik yang signifikan tinggi</p>

8.	Jepang	Pembuatan Bandara Internasional pembuatan pulau buatan untuk membangun bandara internasional. Bandara Udara Internasional Kansai terletak di tengah Teluk Osaka	Sukses, menaikkan taraf perekonomian Warga sekitarnya. menaikkan taraf perekonomian Warga sekitarnya. Prosesnya dilakukan dengan hati hati. Palm Island di dubai telah melakukan lebih dari 100 studi sebelum dilakukan reklamasi
9.	Jakarta	Memberikan lapangan pekerjaan bagi warga setempat (Liputan6.com)	Tidak sukses, terjadi penolakan oleh masyarakat. Selain itu Amdal tidak matang
10	Denpasar	Memberikan lapangan pekerjaan warga setempat dan revitaliasai pariwisata	Tidak sukses, terjadi penolakan oleh masyarakat adat setempat, AMDAL tidak matang

Berdasarkan tabel 1 di atas didapat sebuah pembelajaran mengapa sebuah reklamasi bisa dikatakan sukses ataupun gagal. Bercermin pada reklamasi yang sukses dari 8 negara di atas maka dapat dirumuskan hal-hal yang menjadikannya sukses:

- a. Sebuah kebijakan negara yang strategis, misalnya pulau mati atau terpencil menjadi pusat pariwisata
- b. Bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat
- c. Dilakukan dengan perencanaan yang matang dan bertahap (termasuk kajian amdal)
- d. Dikomunikasikan berbagai pihak
- e. Dilakukan oleh tenaga ahli

Berdasarkan 5 hal di atas, bagaimana dengan Indonesia, terutama reklamasi teluk Benoa Bali. Reklamasi teluk Benoa Bali mengalami kendala, disebabkan pihak masyarakat Bali tidak sepakat dengan keinginan pemerintah untuk mereklamasi teluk benoa.

**Gb 35 : Deklarasi Desa Pakraman Denpasar  
Tolak Reklamasi Teluk Benoa,  
Puluhan Ribu Massa Tumpah Ruah Di Pusat Kota 26 Maret 2016**



<http://walhibali.org/deklarasi-des>

**Gb 36 :Warga Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Bali Siap Macet**  
<http://regional.kompas.com>, Minggu 20 Maret 2016



Berdasarkan analisis penulis kendala proses reklamasi dapat dijelaskan dalam tabel 2 di bawah ini:

**TABEL 2**  
**ANALISIS KEGAGALAN REKLAMASI TELUK BENOA**

<b>Syarat Sukses Reklamasi</b>	<b>Reklamasi Teluk Benoa</b>	<b>Keterangan</b>
Kebijakan strategis	Menambah lapangan pekerjaan sarjana yang telah lulus	Kurang strategis, karena dengan reklamasi justru masyarakat nelayan terancam kehilangan mata pencaharian
Meningkatkan perekonomian masyarakat	Sarjana setiap tahun bertambah membutuhkan lapangan pekerjaan	Analisis statistik pemprov

Perencanaan matang dan bertahap	Tahapan amdal oleh beberapa perguruan tinggi yaitu Unair, universitas Udayana	Terlalu sedikit kajian kelayakan yang dilakukan (reklamasi Jepang menggunakan 100 studi amdal)
Dilakukan komunikasi oleh berbagai pihak	Antara masyarakat adat dengan pemprov Bali	Pemerintah pusat harus terjun langsung untuk berkomunikasi dengan masyarakat Adat. Hal ini disebabkan pemprov Bali bukan sebagai pengambil keputusan.
Dilakukan oleh tenaga ahli	PT TWBI	Tidak menggunakan Tenaga ahli internasional yang sudah teruji sehingga terhindar dari prasangka

Sumber: data sekunder yang diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 2 di atas maka dapat dikatakan bahwa kebijakan reklamasi teluk Benoa memiliki posisi sebagai kebijakan yang kurang strategis mengingat lahan tersebut bukanlah lahan yang kritis dan mati, sehingga masih dalam kondisi yang bisa diperbaiki. *Kedua*, perencanaan berupa survey kelayakan masih kurang dilakukan sehingga

menimbulkan banyak keraguan antara layak dan tidak layak untuk direklamasi. *Ketiga*, pemerintah perlu melibatkan tenaga ahli internasional yang berpengalaman sehingga hasil yang akan dicapai meyakinkan. *Keempat*, posisi pemprov Bali bukanlah posisi strategis sebagai pengambil keputusan tentang jadi atau tidaknya reklamasi dijalankan. dengan demikian harus ada upaya pemerintah pusat untuk bertemu langsung dengan masyarakat adat untuk penyelesaian masalah konflik. Hal ini terlihat ketika mangku Pastika sebagai orang nomor satu di Bali mengatakan bahwa dirinya sudah lelah menghadapi persoalan yang tidak kunjung selesai sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat (CNN Indonesia 16 September 2018)

### **A. Analisis Strategi Komunikasi Berdasarkan Tujuan**

Meski hanya dalam posisi perantara, pemprov Bali dengan segala upaya melakukan strategi komunikasi agar penyelesaian konflik bisa selesai. Adapun upaya sebagai sebuah strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh pemprov Bali dalam rangka penyelesaian konflik pada dasarnya bertujuan untuk tiga hal sebagaimana disebutkan pada buku *Techniques for Effective Communication* karangan R.Wayne pace, Peterson, dan M. Dallas Burnet (dalam Arifin, 2008). Pada buku tersebut memaparkan bahwa strategi komunikasi terdiri atas tiga hal, yakni

1. *Secure Understanding*
2. *Estabilish Aceptance*
3. *Motivate Action*

Pada point pertama, *secure understanding* diartikan bahwa komunikasi memahami pesan yang diterima.

Komunikasi yang dimaksud di sini tidak lain adalah masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat yang menolak reklamasi pada khususnya. Pihak yang dimaksud antara lain adalah forBali (Forum rakyat Bali) yang dipimpin oleh Wayan Gendo Suardana. Hingga saat ini pendirian Baliho Tolak reformasi semakin bertambah. Pendirian Baliho dilakukan oleh masyarakat adat dan berbagai komunitas. Hal ini dikuatkan bahwa tanggal 25 Agustus 2018, ijin lokasi akan habis dan AMDAL dinyatakan tidak layak. Terdapat 10 pemasangan Baliho yang tersebar di Gianyar, Denpasar dan Badung. Beberapa desa yang terlibat bisa terkena dampak langsung, bisa juga tidak. Desa tersebut antara lain desa adat Kelan, Jimbaran, Kuta, Forum masyarakat Singapadu Gianyar, desa adat Intaran Sanur, Sidakarya, Kesiman dan Canggalu. Di beberapa desa adat tersebut telah terpasang baliho-baliho yang menyuarakan untuk menolak reformasi (forbali.org, akses 28 Agustus 2018)

Adapun pesan dari Pemprov Bali adalah berusaha menanamkan pemahaman bahwa dibutuhkan lapangan pekerjaan yang besar untuk lulusan-lulusan sarjana di Bali diwaktu yang mendatang sebagai konsekuensi dari konsep *projob*, bahwa setiap tahun ada 25 ribu tamatan S1 di Bali ini dari 53 perguruan tinggi setiap tahun. Mereka tentu saja membutuhkan lapangan pekerjaan yang tidak sedikit. Namun dengan adanya proyek reklamasi, selain pembangunan proyek itu sendiri maka bisnis pariwisata akan memberikan wadah bagi calon-calon tenaga kerja.

Beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai perbedaan persepsi tentang reklamasi antara pemerintah dengan masyarakat antara lain:

**TABEL 3**  
**REKLAMASI DILIHAT DALAM PERSPEKTIF**  
**PEMERINTAH DAN MASYARAKAT**

<b>Hal</b>	<b>Perspektif Pemerintah</b>	<b>Perspektif Masyarakat Adat Bali</b>
Jika reklamasi jika dilaksanakan	Tidak mengganggu ekologi	merusak ekologi (Menyebabkan banjir)
	Menyediakan lapangan kerja bagi generasi muda	Melanggar kearifan lokal (merusak laut)
	Mencegah menyusutnya lahan produktif	Nelayan terancam mata pencahariannya
	Mitigasi bencana Tsunami	Melanggar kesepakatan awal bahwa Teluk Benoa adalah kawasan konservasi
	Penambahan luas hutan yang rencananya dari 800ha 50 persennya akan dibumihijaukan	

Sumber: data primer yang diolah tahun 2018

Secara alami, pesatnya laju pembangunan belakangan ini dibarengi dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, migrasi serta alih fungsi lahan. Sebagaimana mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, dalam kurun waktu 14 tahun yaitu dari tahun 1997-2011 pengurangan lahan produktif mencapai 436 Ha atau 0,50 persen. Pada tahun 1997 pengurangan sebesar 87.849 Ha dan pada tahun 2011, semakin menyusut sebesar 81.744 Ha. Pesatnya pembangunan dua tahun terakhir membuat kemungkinan sudah berubah dan luas lahan produktif diperkirakan makin berkurang.

Pemprov Bali memikirkan berbagai upaya dan terobosan dalam melestarikan pariwisata agar memiliki keselarasan dengan kelestarian pertanian yang merupakan nafas budaya kehidupan masyarakat Bali. Reklamasi ini menjadi salah satu alternatif untuk menanggulangi menyusutnya lahan produktif.

Namun, tujuan strategi komunikasi tersebut baru berhenti sampai *to secure understanding* belum sampai pada *to secure established* dan *to motivated action*. Respon yang negatif dari sebagian masyarakat Bali membuat persoalan ini tidak kunjung selesai. Adapun perbedaan pendapat dari keduanya meliputi bahwa wilayah teluk Benoa adalah wilayah konservasi plus dan sudah ditetapkan sebagai wilayah suci oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia berdasarkan paruman pandita atau rapatnya pendeta majelis tertinggi. Secara perspektif kearifan lokal, ada karakter masyarakat lokal Bali yang memiliki tiga keyakinan mendasar, antara lain adanya beberapa tempat yang mereka anggap suci: tempat suci yang terdiri tidak hanya pure,

masjid, gereja, dan apapun itu tempat ibadah harus disucikan; gunung, dan laut.

Teluk Benoa adalah kawasan suci yang tidak boleh dilakukan upaya-upaya pengurukan karena Teluk itu mempunyai energi yang suci. Di sini ada banyak pura, daratan pasang surut yang diyakini sebagai umat Hindu disebut muntik. Masing-masing pihak merasa memiliki dasar yang kuat tentang amdal untuk boleh tidaknya teluk tersebut direklamasi.

Dengan adanya perbedaan persepsi tersebut menyebabkan pemprov Bali untuk terus menerus melakukan kajian melalui berbagai saluran komunikasi diantaranya simakrama, Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), dan paguyuban antar agama. Simakrama sebagai sebuah ajang komunikasi yang melibatkan gubernur dengan masyarakat luas untuk membicarakan persoalan-persoalan seputar Bali, diadakan setiap bulan. Sampai Juli 2018 Simakrama sudah diselenggarakan selama 98 kali. Pemberitaan pro kontra reklamasi sudah juga mendapatkan tempat beberapa kali dalam simakrama. Pada Simarkama Bali ke-84 aspirasi rakyat meminta Pemerintah Pusat untuk segera mengambil keputusan terkait reklamasi Teluk Benoa. Di bagian akhir simakrama, Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Jero Gede Suwena Upadesa, menyampaikan tentang pentingnya peran Desa Pekraman yang ada di Bali dalam menjaga adat, budaya dan tradisi dari masyarakat Bali dan mengajak masyarakat Bali untuk selalu menyelesaikan permasalahan dengan memegang slogan kearifan lokal *Sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, saling asah-asih dan asuh.*

Terkait masalah kejelasan kelanjutan tentang reklamasi Teluk Benoa, Pastika mengatakan dirinya sudah mengirimkan surat ke Menteri kehutanan dan lingkungan Hidup. Tidak berhenti sampai di sana Pastika juga ia juga menyusulkan surat kedua dengan tembusan kepada Menteri Kemaritiman dan Menteri kelautan. Pastika menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan Perpres 51 tahun 2014. Namun demikian penyampaian aspirasi masyarakat Bali tetap disampaikan.

Podium Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) bertujuan untuk memberi ruang pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya atau para pendemo ada di ruang publik yang tidak sampai mengganggu lalu lintas. Pemprov Bali menyediakan sebuah mimbar kecil dengan pengeras suara yang hanya dibuka setiap Minggu pagi mulai pukul 8.00 sd 10.00. setiap orang, warga Balai boleh berbicara apa saja yang ia keluhkan dan ingin disampaikan.

Selain itu terdapat pula forum kerukunan antar umat beragama yang juga sangat membantu pemerintah provinsi Bali untuk menjaga rasa toleransi rasa keharmonisan untuk mencapai suasana Bali bisa aman. Ada pula paguyuban - paguyuban yang didalamnya akan dikomunikasikan segala sesuatu untuk kepentingan Bali. Beberapa nama paguyuban antara lain yang namanya "Pasundan", di Sumatera Barat: "Minang Saiyo." Sebagaimana masyarakat Bali, mereka juga sering melakukan pertemuan-pertemuan secara intensif setiap bulan. Dengan demikian setiap pesan-pesan kebijakan-kebijakan pemerintah itu disampaikan melalui pertemuan mereka.

Kegiatan rembug-rembug atau musyawarah tetap dilakukan dari pihak pemerintah ketika menginginkan komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat menentukan tokoh-tokohnya walaupun tidak selalu ada kesepakatan dalam diskusi. Tetapi pada prinsipnya pemerintah provinsi Bali pada akhirnya tetap pada posisi yang seharusnya. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemprov merasa berkewajiban menindaklanjuti perpres, namun di sisi lain masyarakat Bali menginginkan yang terbaik bagi tempat tinggalnya.

Dengan melihat upaya pemprov dalam membuka saluran komunikasi, setidaknya komunikasi menjadi transparan dan masing-masing pihak menjadi jelas tentang apa yang diperselisihkan. Namun demikian, mengingat posisi pemprov adalah di tengah antara pemerintah pusat dan masyarakat Bali, maka idealnya dalam simakrama dipertemukan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Bali untuk kepastian eksekusi reklamasi. Hal ini terlihat bahwa Gubernur mangku pastika menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat tentang masalah ini.

Penyusunan strategi komunikasi memerlukan pemikiran dan perhitungan atas factor pendukung dan factor penghambat. Terlebih akan menghasilkan pengkajian yang lebih baik apabila memperhatikan komponen komunikasi yang dapat mendukung maupun penghambat pada koponen kerangka referensi, situasi dan kondisi, pemilihan media, penentuan tujuan pesan, dan peranan komunikator dalam berkomunikasi.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi komunikasi adalah banyaknya forum komunikasi yang digelar pemprov Bali untuk menyamakan persepsi. Sedangkan faktor penghambat adalah kearifan lokal masyarakat Bali yang diyakini dan tidak boleh dilanggar, posisi pemprov Bali sebagai perantara bukan eksekusi, sehingga pemprov bukanlah pengambil keputusan.

Tujuan merupakan hal pertama yang harus dirumuskan dalam sebuah perencanaan strategi komunikasi. Tujuan strategi yang dilakukan pemprov sudah memiliki tujuan yang jelas yaitu menginformasikan tentang pentingnya reklamasi teluk Benoa. Sisi positif dan manfaat reklamasi dipaparkan secara jelas oleh pemprov. Hal tersebut dipertegas oleh Quinn (dalam Ruslan, 2002) tentang efektivitas sebuah strategi dijalankan akan sangat bergantung pada beberapa hal yaitu *pertama*, adanya tujuan yang jelas dan bisa dipahami, meskipun tidak harus dibuat secara tertulis. Tujuan strategi pemprov tidak dilakukan secara tertulis, namun tujuan itu muncul karena dikaitkan dengan kebutuhan di masa mendatang yaitu kebutuhan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.

**B. Analisis Strategi Komunikasi Berdasarkan Prinsip** Ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan strategi komunikasi, yaitu prinsip partisipatif, prinsip kesinambungan, dan prinsip holistik.

- 1) Prinsip partisipatif ialah sebuah rencana yang ideal harus dapat mendorong terciptanya partisipatif, baik dari pengelola maupun *stakeholder* yang menjadi target sasaran perencanaan tersebut.

- 2) Prinsip kesinambungan ialah sebuah perencanaan dibuat tidak hanya untuk sesaat, melainkan harus mempertimbangkan proses kelanjutannya secara berkesinambungan, artinya rencana harus memiliki perhitungan bahwa perencanaan ini memiliki kelanjutan setelah dilakukan untuk jangka waktu tertentu.
- 3) Prinsip holistik artinya menyeluruh dan tidak disusun berdasarkan unit-unit. Perencanaan tidak hanya dilihat dari satu sisi tetapi juga harus dilihat dari aspek dan keutuhan konsep secara keseluruhan.

Berdasarkan ketiga prinsip di atas, pemprov Bali melakukan strategi komunikasi dengan prinsip partisipatif. Dalam prinsip partisipatif, pemprov membuka rembug-rembug yang melibatkan stakeholder, baik itu masyarakat Bali, pengembang, maupun dunia perguruan tinggi. Namun ada satu stakeholder yang justru menentukan, tetapi tidak dilibatkan yaitu pemerintah pusat. Komunikasi dilakukan melalui acara-acara di simakrama, PB3AS, maupun pagu-yuban-paguyuban. Kerjasama dan komunikasi juga dilakukan dengan dunia civitas akademika yaitu universitas Airlangga dan Udayana dalam rangka survey AMDAL. Di sisi lain pihak WALHI sebagai kontra reklamasi juga ikut dirangkul untuk mencapai titik tengah. Satu hal yang menarik ketika pihak penelitian yang dilakukan akademisi berkesimpulan untuk mengatkan tidak layak untuk direklamasi. Sementara Pemerintah pusat belum juga mencabut perpres No 51 tahun 2014. Dilihat dari sisi netralitas, tentu pihak akademisi tidak memiliki kepentingan apapun untuk reklamasi ini, namun sampai saat ini perjalanan pro dan kontra tidak kunjung selesai.

Terdapat 3 pendekatan dalam strategi komunikasi menurut Berger dalam Griffin (2006), yakni terdiri atas strategi aktif, pasif, dan interaktif. Dari setiap strategi tersebut, strategi dengan pendekatan interaktif merupakan pendekatan yang memiliki nilai – nilai humanis dan budaya baru yang berpotensi untuk mengubah *mindset* masyarakat mengenai perubahan maupun pembangunan. Pendekatan interaktif lebih menekankan pada edukasi kepada masyarakat untuk terciptanya kesadaran, yang mana kesadaran ini memiliki fungsi untuk menghindari konfrontasi politik dan menjamin kesediaan alternative dalam memformulasikan hubungan organisasi yang baik. Selain itu hal ini akan memunculkan *indigenous knowledge* serta skill dalam proses menemukan solusi pada permasalahan sosial.

Dalam pembangunan membutuhkan instrument komunikasi partisipatoris untuk menghasilkan partisipasi dan antusiasme warga. Ada 4 dimensi dalam komunikasi partisipasi. Yang pertama, proses rekayasa sosial melalui pemberlajaran individu dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas, mobilitas, dan suberdaya kehidupan. Yang kedua, Partnership yang menekankan pemerintah dan masyarakat diposisi yang sejajar, yang ketiga tanggung jawab individu, dan nilai terakhir yang ke-empat yakni nilai nilai yang ada di sekitar.

Oleh karena itu, dengan komunikasi partisipatoris akan melakukan pendekatan dengan masyarakat karena pada komunikasi partisipatoris tidak hanya melakukan pendekatan pada level kognisi, namun turut melibatkan sikap, perilaku, dan skill.

Pendekatan partisipatoris sudah dilakukan oleh pemprov Bali meskipun belum semua langkah terlaksana. Proses pembelajaran atau disebut dengan pendidikan adalah upaya untuk menuju kepada perubahan. Pendidikan yang dimaksud adalah mengajak kepada perubahan *mind set* bahwa reklamasi teluk Benoa memiliki manfaat atau berdampak positif bagi masa depan Bali. Hadirnya bisnis pariwisata membuat ribuan tenaga kerja tersalurkan sehingga slogan Bali Mandara dapat terwujud. Pada dimensi yang kedua yaitu *partnership*, pemprov Bali berusaha untuk menjadi mitra bagi siapapun masyarakat yang ingin berkomunikasi. Kedudukan sebagai mitra terlihat dengan upaya komunikasi yang terus dilakukan pemprov dengan pihak-pihak yang kontra. Namun demikian sekali lagi bahwa posisi pemprov adalah perantara, bukan pengambil keputusan. Dengan demikian posisi strategis harus diambil oleh pemerintah pusat. Merekalah yang harus intens berkomunikasi dengan pihak masyarakat yang menolak reklamasi dan ini belum dilakukan.

Dimensi yang ketiga tentang tanggung jawab individu sudah berjalan dengan baik. Masing-masing pihak baik pemprov maupun masyarakat setempat melakukan perannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan pihak lain seperti komnas HAM melakukan langkah-langkah penanganan. Adapun yang dicari oleh Komnas HAM yang pertama yakni mengenai degradasi terhadap kehidupan masyarakat baik pada sektor ekonomi maupun sosial budaya, lalu ingin mengetahui degradasi pada lingkungan alam, serta mencari tahu akan potensi intimidasi kelompok kontra reklamasi. Setelah itu akan dibuka forum konsultasi untuk mendapatkan informasi yang valid untuk dijadikan referensi.

Komnas HAM pada dasarnya bertugas untuk mencegah adanya perselisihan antar kelompok yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik – konflik horizontal. Peran Komnas HAM menjadi mediator untuk mencari solusi, yakni dengan membahas secara transparan dan terlepas dari unsur-unsur politik demi kemaslahatan masyarakat Bali.

Adapun untuk nilai-nilai yang dianut masyarakat Bali juga tidak ditinggalkan begitu saja. Nilai-nilai mereka pada dasarnya berasal dari agama yang dianut, yaitu Hindhu. Munculnya Tri Hita Karana, tat twam si dan sebagainya justeru menjadi penguat bahwa laut harus diselamatkan dan tidak boleh dijamah reklamasi disamping dari sisi amdal sementara ini belum juga mengizinkan.

Dusseldorp mamaparkan bentuk-bentuk kegiatan partisipasi (Mardikanto, 1993) antara lain:

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- 2) Melibatkan diri dalam diskusi kelompok
- 3) Melibatkan diri dalam kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
- 4) Menggerakkan sumber daya masyarakat
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan masyarakatnya.

Bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemprov Bali terdapat pada poin satu sampai dengan enam. Pelibatan diskusi sampai dengan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan sudah dilakukan. Hanya saja pada poin 6 pemanfaatan hasil yang dicapai masih sebatas pada hasil diskusi

yang dilaporkan kepada pemerintah pusat. Sebab diskusi dalam mencapai kesepakatan belum terwujud. Dengan demikian untuk partisipasi pada poin 6 belum berjalan dengan maksimal.

Arnstein (dalam Haryono. 2005:51) memperkenalkan 8 tangga pendekatan partisipatif yang dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk kegiatan besar yaitu:

1. *Non participations* : berbentuk manipulasi dan terapi. berbentuk manipulasi dan terapi. *Non participations* tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengarahan program. Namun peran pemerintah disini aktif dalam pengelolaan serta mengedukasi masyarakat.
2. *Simbol/Petanda (Tokenism)*: terdiri atas *information consultation and placation*. Pada tingkatan ini masyarakat dan pemerintah terlibat dialog secara aktif namun pengambil kebijakan tetap dibebankan pada peran pemerintah.
3. *Citizen power* : meliputi *partnership; dele-gated control*; dan *citizen control*. *Partnership* merupakan kesejajaran antara pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. *Delegated control* artinya pemerintah mendelegasikan kewenangannya kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kebutuhannya. *Citizen control* adalah masyarakat memilih kekuasaan atas kebijakan publik baik dalam perumusan, implementasi hingga evaluasi kontrol.

Dari tiga bentuk partisipasi tersebut, maka kasus penyelesaian reklamasi oleh Pemprov Bali menggunakan bentuk yang kedua, yaitu *tokenism* (petanda/symbol). Hal ini dikarenakan peran masyarakat dan pemerintah terlibat dalam suatu dialog namun penentuan serta penetapan jadi tidaknya pelaksanaan reklamasi di Teluk Benoa ditetapkan oleh Pemerintah. Bentuk komunikasi yang dibangun adalah dua arah yang secara langsung yakni dibuktikan dengan agenda Simakrama dan PB3AS. Sekali lagi bahwa yang dimaksud pemerintah di sini sebenarnya pemerintah pusat yaitu pemerintah yang telah menetapkan perpres 51 tahun 2014. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah yang selalu mengadakan komunikasi dengan masyarakat adalah pemerintah daerah Bali yang notabene bukan pengambil keputusan. Hal inilah yang menyebabkan strategi komunikasi yang dijalankan belum berlangsung secara efektif meskipun menggunakan pendekatan partisipatif.

### **C. Analisis Komunikasi Berdasarkan Metode**

Metode komunikasi dapat diwujudkan dengan beberapa bentuk sebagai berikut (Abdin, 2015 : 116)

- a. Metode *redudancy*, cara mempengaruhi dengan mengulang pesan kepada khalayak sehingga akan menarik perhatian. Komunikator juga dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dalam penyampaian sebelumnya.
- b. Metode *Canalizing*, dalam metode ini, komunikator pertama-tama mengenal audiens dan mulai menyampaikan ide-ide sesuai dengan kepribadian, sikap dan motif audiens. Sedangkan menurut bentuk isi metode komunikasi diwujudkan dalam bentuk:

- c. Metode informatif, dalam dunia publisitas atau komunikasi massa dikenal sebagai salah satu bentuk pesan yang informatif, yaitu bentuk konten pesan, yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat dengan memberikan informasi. Pencahayaan berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, apa adanya, di atas fakta dan data yang benar serta pendapat yang benar.
- d. Metode edukatif, diwujudkan dalam bentuk pesan yang berisi opini, fakta dan pengalaman yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Isi pesan diatur secara teratur dan terencana dengan tujuan mengubah perilaku audiens.
- e. Metode Pemaksaan, yang memengaruhi audiensi secara paksa, dalam hal ini audiens dipaksa untuk menerima ide atau ide karena itu pesan komunikasi ini selain mengandung opini juga mengandung ancaman.
- f. Metode persuasif, adalah cara untuk mempengaruhi komunikasi, dengan tidak terlalu banyak berpikir kritis, bahkan jika audiens dapat dipengaruhi secara tidak sadar.

Berdasarkan analisis metode komunikasi maka pemprov Bali menggunakan metode informatif dan persuasif. Mengapa demikian, hal ini disebabkan pemprov masih sebatas hanya menginformasikan tentang kondisi teluk Benoa yang sekarang terjadi serta berupaya untuk mengajak masyarakat terutama masyarakat yang kontra untuk mematuhi perpres 51 tahun 2014, sehingga reklamasi dapat segera diwujudkan tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Namun ajakan ini sampai sekarang belum menemui titik temu sebab pihak yang diajak masih merasa benar dengan pendapatnya. Meski bujukan disertai iming-iming, tetapi pihak masyarakat Bali juga memiliki argumen yang kuat.

#### **D. Analisis Penggunaan Pesan dalam Strategi Komunikasi Pemprov Bali**

Wilbur Schramm memaparkan persyaratan keberhasilan pesan sebagai berikut :

1. harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian sasaran
2. Penggunaan pesan memerlukan tanda yang memiliki makna yang sesuai.
3. Perancangan pesan harus menyesuaikan kebutuhan target
4. Harus memberikan saran sesuatu untuk memperoleh kelayakan untuk kelompok dan agar mendapatkan jawaban yang dikehendaki (Fajar, 2009:194).

Samovar dan Porter dalam Liliwari 2001 tertarik untuk menjabarkan efektivitas penggunaan kode, baik verbal maupun non verbal (Liliwari,2001). Beberapa strategi penggunaan pesan antara lain melibatkan sebagai berikut:

1. Tidak tergesa-gesa membuat kesimpulan tentang orang lain.
2. Mempertimbangkan kondisi fisik dan lingkungan.
3. Memberikan kesempatan pada pihak lain untuk memberikan feedback.
4. Mengembangkan empati atas dasar asumsi adanya perbedaan.

Berdasarkan pendapat dari Samover dan Porter tentang efektivitas sebuah pesan, maka pesan ajakan yang disampaikan oleh pemprov bali belum dapat dikatakan efektif proses menuju kesana belum selesai. Agar lebih jelas, bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

**TABEL 4**  
**EFEKTIVITAS PESAN PERSUASIF**

<b>Indikator</b>	<b>Implementasi</b>
Tidak menyimpulkan orang lain secara terges-gesa	Dalam hal ini pemprov menyatakan bahwa Walhi sebagai pihak kontra bukan dianggap musuh tetapi dianggap sebagai partner yang memberi masukan terhadap analisis lingkungan
Mempertimbangkan kondisi fisik dan lingkungan.	Dengan penolakan yang dilakukan 38 desa adat, maka upaya terus untuk berkomunikasi secara persuasif dilakukan tanpa upaya memaksa
Memberikan kesempatan pada pihak lain untuk	Rembug-rembug melalui berbagai forum komunikasi

memberikan <i>feedback</i> .	menandakan bahwa pemprov terbuka terhadap masukan dan kritikan
Mengembangkan empati atas dasar asumsi adanya perbedaan.	Sebagai provinsi yang menaungi wilayah teluk Benoa berupaya untuk tidak menafikan masyarakatnya sehingga Gubernur menyatakan bahwa pemerintah pusatlah yang seharusnya turun tangan.

Sumber: data primer yang diolah tahun 2018

Berdasarkan analisis pesan pemprov Bali terlihat bahwa pesan sudah bisa dikatakan efektif untuk mengajak semua elemen masyarakat dalam menyukseskan reklamasi teluk Benoa.

### **E. Langkah-Langkah Pemprov dalam Mencapai Efektivitas Strategi Komunikasi**

Hal ini dipertegas oleh Quinn (dalam Ruslan, 2002) tentang efektivitas sebuah strategi dijalankan akan sangat bergantung pada beberapa hal yaitu *pertama*, adanya tujuan yang jelas dan bisa dipahami, meskipun tidak harus dibuat secara tertulis. *Kedua*, memelihara inisiatif dengan jalan menjaga kebebasan bertindak dan memperkaya komitmen, bukan bereaksi terhadap suatu peristiwa. *Ketiga*, konsentrasi, yaitu dilakukan secara penentuan waktu dan usaha yang besar. Dan *keempat* memperhatikan fleksibilitas strategi.

Kelima, memiliki komitmen dan terkoordinasi. Keenam, kejujuran, bahwa sebuah strategi dipersiapkan untuk memanfaatkan kerahasiaan dan kecerdasan untuk menyerang lawan pada saat tidak terduga. Ketujuh, keamanan, sebuah strategi untuk semua operasi penting organisasi.

**TABEL 5**  
**EFEKTIVITAS STRATEGI KOMUNIKASI PEMPROV BALI**

<b>Indikator</b>	<b>Implementasi oleh Pemprov</b>
tujuan yang jelas	Mengajak seluruh masyarakat Bali untuk setuju dengan proyek reklamasi teluk Benoa sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam perpres 51 tahun 2014
memelihara inisiatif dengan jalan menjaga kebebasan bertindak dan memperkaya komitmen, bukan bereaksi terhadap suatu peristiwa	Pemprov masih memiliki komitmen untuk membuat Bali aman dari ancaman yang berasal dalam maupun luar sehingga komunikasi demi komunikasi masih terus dilakukan untuk menuju keharmonisan

<p>konsentrasi, yaitu dilakukan dengan menentukan waktu dan usaha yang besar</p>	<p>Pemprov konsentrasi pada kekuatan for Bali yang bertahan untuk menolak reklamasi sehingga beberapa kali undangan disampaikan kepada ketua untuk duduk bersama</p>
<p>fleksibilitas, yaitu bahwa sebuah strategi diniatkan untuk dilengkapi penyangga dan dimensi fleksibilitas</p>	<p>Pemprov juga menyatakan bahwa jika reklamasi tidak disetujui/ditolak juga akan disampaikan sebagaimana adanya karena pemprov bukanlah pengambil keputusan</p>
<p>kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi</p>	<p>Meski berposisi sebagai perantara, gubernur melarang untuk melakukan demonstrasi yang agresif dan tidak santun kepada pemerintah pusat, sebab koordinator ada di Jakarta. Semua harus melalui prosedur yang benar</p>

<p>kejujuran, bahwa sebuah perencanaan strategi perlu dipersiapkan agar dapat memanfaatkan rahasia dan kecerdasan untuk menyerang diwaktu yang tak terduga</p>	
	<p>Data-data amdal sebagai bentuk dari kecerdasan masih masih sangat minimalis. Kajian kelayakan dari dunia akademisi menyatakan tidak layak sehingga masih memerlukan banyak sekali kajian</p>
<p>keamanan, bahwa sebuah rencana harus memiliki nilai yang mengamankan seluruh organisasi dan oprasional penting pada sebuah organisasi</p>	<p>pihak kontra tidak boleh melakukan tindakan di luar koridor hukum sehingga perlu terus menerus diajak berkomunikasi sampai pada titik jenuh. Dengan demikian slogan Bali Mandara (Bali Aman, damai, dan Sejahtera) benar-benar akan terwujud.</p>

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa strategi komunikasi yang dilakukan Pemprov belum terbilang belum efektif mengingat banyak persoalan yang mengganjal yaitu posisi Pemprov bukanlah posisi kunci, kekuatan pengaruh kearifan lokal, dan perencanaan amdal yang tidak matang.

## **F. Langkah-Langkah Pemprov Bali dalam Pelaksanaan Strategi Komunikasi**

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan pemprov Bali dalam menyelesaikan kasus penolakan reklamasi adalah sebagai berikut:

1. Membuka saluran komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat.

Saluran komunikasi adalah wadah tempat berlangsungnya komunikasi antara kedua belah pihak yaitu pemprov dan masyarakat bali. Beberapa wadah yang bisa dibuat untuk fasilitas komunikasi antara lain:

- Simakrama
- Forum bebas bicara apa saja (FP3AS)
- forum kerukunan antar umat beragama
- paguyuban-paguyuban daerah

2. Memfungsikan opinion leader

Lembaga adat yang ada di Bali juga ada stratanya seperti pemerintahan dinas. Jadi, desa adat yang ada di tingkat desa dipimpin oleh tetua desa adat. Tetua adat itu punya atasan lagi dia di tingkat kecamatan dan kabupaten disebut tetua madian terus di tingkat kabupatennya juga ada. Kalau di tingkat provinsi namanya tetua adat utama. Jadi pendekatannya adalah melalui struktur ini. dulu pada akhirnya kita bertemunya di tingkat desa. Beberapa kali diadakan pertemuan baik dari pihak pemerintah dengan struktur desa adat. Memang ucapan tetua yang didengar itu adalah memang tetua yang di tingkat desanya apapun kata mereka.

Struktur kelembagaan desa di Bali terdiri dari desa dinas dan desa adat. Desa dinas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa seperti permohonan kartu identitas, kartu keluarga dan sebagainya. Desa dinas berada di bawah kecamatan. Sedangkan pemerintahan desa adat atau Pakraman di pulau Bali terdiri dari tiga tingkatan yaitu 1 desa adat agung (tingkat provinsi) 9 desa adat madya (tingkat kabupaten) dan 700 desa pakraman (tingkat desa). Tugas utama pemerintah desa adat adalah menangani kegiatan budaya agama dan isu sosial. Misalnya ketika sebuah keluarga akan melakukan upacara pernikahan atau penduduk desa akan mengadakan upacara keagamaan di pura desa maka pemimpin desa adat (kelihan adat) akan menanganinya. Dalam menjalankan tugasnya Kelihan adat dan bawahannya harus berdasarkan pada aturan adat-istiadat setempat baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis (*awig-awig*). Kelihan adat tidak digaji tetapi “ngayah” artinya bekerja dan melayani masyarakat tanpa mengharapkan imbalan apapun. Semua dilakukan dengan suka rela. Namun demikian pemprov telah mengalokasikan sejumlah dana untuk kelihan adat yaitu 700 ribu sd 1.500.000 (diedit.com akses 18 Agustus 2018).

Pemuka pendapat adalah seseorang yang relatif sering dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu secara informal. Mereka memiliki pengaruh yang besar pandangan atau pendapat dari orang-orang yang berada di kelompoknya (Hanafi dalam Kunto, 2010). Dengan demikian Kelihan adat menjadi rujukan penapatnya bagi masyarakat yang memilihnya.

Karakteristik opinion leader (Nurudin, 2010), pada umumnya memiliki kompetensi tertentu yang melampaui anggotanya. Biasanya mereka memiliki ciri-ciri sebagaimana di bawah ini:

- a. Lebih tinggi pendidikan formal daripada anggotanya
- b. Lebih tinggi status sosial dan status ekonomi
- c. Lebih inovatif dalam mengadopsi ide baru
- d. Lebih tinggi pengenalan medianya
- e. Kemampuan empati yang lebih besar
- f. Partisipasi sosial lebih besar

Bagi kelihan adat di Bali enam syarat di atas tidak terpenuhi semuanya bagi para tetua adat di pemprov Bali. Pemilihan kelihan adat di Bali bukan berdasarkan pada status sosial ekonomi, namun lebih pada kepercayaan masyarakat kepada yang bersangkutan karena partisipasi dan empati besar dalam masyarakat meskipun bisa dikatakan bahwa mereka tidak menerima gaji.

### 3. Memfungsikan kearifan lokal

Beberapa kearifan lokal Bali ternyata memberi peran yang cukup signifikan bagi harmonisasi. Beberapa bentuk kearifan lokal yang mengarah pada keharmonisan antara lain:

- 1) Pakaian “udeng”. Pakaian ini mengandung filosofi yang bijak dalam mengendalikan perilaku manusia. Pakaian ini juga berperan ketika manusia berinteraksi dengan orang lain. Pendemo dipantau langsung oleh desa adat mereka dengan pakaian. Udeng bertujuan untuk mengikatkan pikiran supaya tidak liar. Dengan filosofi pakaian adat, mereka mengadakan suatu gerakan penolakan. Pakaian akan memfokuskan pada sesuatu

hal yang memang tujuan utama supaya tidak bias. Jika emosi dibiarkan dengan leluasa kadang-kadang emosional mereka itu tidak terkendali apalagi kalau masyarakat sudah berkumpul susah dikendalikan. Tapi dengan gaya adat seperti itu sejak awal mereka ditekankan untuk fokus dalam pikiran.

- 2) Dalam konsep Tri Hita Karana, masyarakat Bali sangat menghargai dan menghormati lingkungannya. Beberapa upacara-upacara tertentu mencerminkan hal bagaimana kita menghargai lingkungan. Ada yang namanya tumpeg udong, tumpeg tanaman, ada namanya tumpeg landak. Hal ini adalah contoh yang diyakini masyarakat agar masyarakat tetap menjaga lingkungan agar lestari. Adapun yang kedua adalah bagaimana menghargai sesama dan saling menghormati sesama. Ketiga adalah bagaimana menghormati Tuhan. Tiga hal inilah yang menyebabkan manusia akan hidup bahagia. Konsep Tri Hita Karana itu sendiri berarti tiga kebaikan atau tiga kebahagiaan. Norma susila ini dirangkum dalam tiga kata yaitu parhyangan, pawongan dan palemahan. Pada saat ini masyarakat Bali disinyalir sudah banyak melanggar norma susila yang kedua yaitu pawongan (hubungan harmonis kepada sesama manusia). Akibat-nya adanya kesengsaraan, konflik, ketidakpercayaan, dan sebagainya. Dengan tetap menjaga pawongan maka demonstrasi yang agresif dan tidak santun bisa dihindarkan kerana pada dasarnya “pawongan” menghendaki adanya keharmonisan hubungan antar manusia.

- 3) Tat Twam Asi itu adalah hidup bertoleransi antar kita. Intinya “Aku adalah kamu, kamu adalah aku”, sehingga kita dapat merasakan persaudaraan diantara kita walaupun mereka datang dari Sumatera, Kalimantan, Irian, Jawa. Jadi dengan prinsip Tat Twam Asi itulah yang membuat kita bisa hidup satu tanah di Bali untuk menjadi keharmonisan tapi yang berkaitan dengan reklamasi tentunya Tat Twam Asi itulah yang menjadi kata kunci.
- 4) Kata slogan “Sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, saling asah-asih dan asuh. Slogan ini memiliki arti bersatu padu dalam suka duka dan menghadapi bahaya berembug dan bermusyawahar (menghargai pendapat orang lain), saling menyayangi, saling mengingatkan dan saling menolong. Slogan ini adalah turunan dari Tri Hita Karana yang kedua yaitu pawongan yaitu hubungan harmonis sesama manusia.

Bentuk kearifan lokal masyarakat Bali erat kaitannya dengan sistem kepercayaan dan nilai-nilai agama Hindhu. Salah satu ciri *local genius* adalah biasanya sangat terkait dengan sistem kepercayaan (Al Wasilah, 2009). Beberapa bentuk kearifan lokal di Bali adalah hasil dari nilai-nilai agama Hindhu sebagai mayoritas kepercayaan yang diamut oleh masyarakat Bali. Beberapa penelitian antropologis menyatakan bahwa orang bali dikenal sebagai orang yang berbudi pekerti baik karena keyakinan dan kepercayaan serta melaksanakan ajaran agama Hindhu-Bali dengan baik, berjiwa halus dengan budaya kesenian yang tinggi ramah-tamah, toleran, rendah hati suka gotong royong dan sebagainya. Agama orang Bali bersumber pada agama tirta

yang menginduk pada agama Hindhu dari sekte waisnawa. Salah satu norma susila itulah yang kini disebut dengan konsep Tri Hita Karana.

Tersebutlah desa Tenganan yang terletak di Kabupaten Karangasem. Desa ini sangat dekat dengan Panti Candi dasa. Keunikan desa ini adalah ketatnya masyarakat setempat dalam melindungi dan melestarikan hutan adat. Mereka memiliki hukum adat (*awig-awig*) yang mengatur pengelolaan hutan termasuk pelarangan menebang pohon. Adapun desa Panglipuran memiliki tata desa yang bergitu rapi dan cantik. Rumah diatur dengan seragam berpagar sama dan berpintu sama. Jalan utama menanjak ke atas dan membagi desa menjadi 3 bagian sesuai dengan konsep Tri Hita Karana (hubungan manusia dengan Tuhan; manusia dengan manusia; dan manusia dengan alam semesta) (kompas. com 19 Agustus 2018)

Ada berbagai tantangan dalam eksistensi kearifan lokal. Dalam hal pengelolaan sumber daya air dalam perkembangan dan perjalanannya sering tatanan air menghadapi banyak tantangan sehingga mempengaruhi eksistensinya. Kondisi ini disebabkan oleh tekanan penduduk terhadap sumber daya air dan alam sekitarnya, kegiatan pembangunan dan modernisasi (Hidayati.2016). Proyek reklamasi teluk Benoa yang selama ini diperjuangkan oleh pemerintah jelas mendapatkan hambatan dari kearifan lokal masyarakat Bali itu sendiri. Mereka menyucikan laut sebagai cermin dari Hita Karana yang ketiga yaitu harmonisasi hubungan manusia dengan alam. Oleh karenanya siapapun tidak boleh menyentuh laut. Kegiatan reklamasi dianggap penduduk setempat akan

merusak laut mereka yang selama ini digunakan sebagai sarana ibadah.

#### 4. Melakukan perencanaan berupa studi kelayakan dengan dunia akademisi

Studi kelayakan merupakan bagian dari perencanaan komunikasi yaitu analisis situasi. Sebuah perencanaan komunikasi mutlak dilakukan dalam sebuah strategi komunikasi. Sebagai contoh sebuah perencanaan komunikasi yang matang dilakukan Jepang ketika melakukan reklamasi Osaka. Kemudian keberhasilan Jepang dalam melakukan reklamasi dengan revitalisasi Osaka yang berdampak pada kenaikan tarif perekonomian warganya, serta proses pengkajian yang dalam sebanyak 100kali studi sebelum memulai proyek reklamasi Palm Island di Dubai. Dengan berkaca pada keberhasilan Jepang maka bisa dikatakan bahwa studi kelayakan yang dilakukan dalam reklamasi Teluk Benoa masih sangat sedikit terlebih bahwa studi kelayakan yang dilakukan oleh semua dunia akademisi menyatakan tidak layak untuk direklamasi.

UNESCO membuat langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan komunikasi, yakni: (Cangara. 2013:67)

- a. Mengumpulkan data tentang status sumber daya komunikasi
- b. Menganalisis struktur sumber, dari surat kabar, media apa saja yang digunakan masyarakat
- c. Menganalisis secara kritis pada kebutuhan komunikasi, informasi, menyesuaikan apakah hiburan, berita, atau opini.

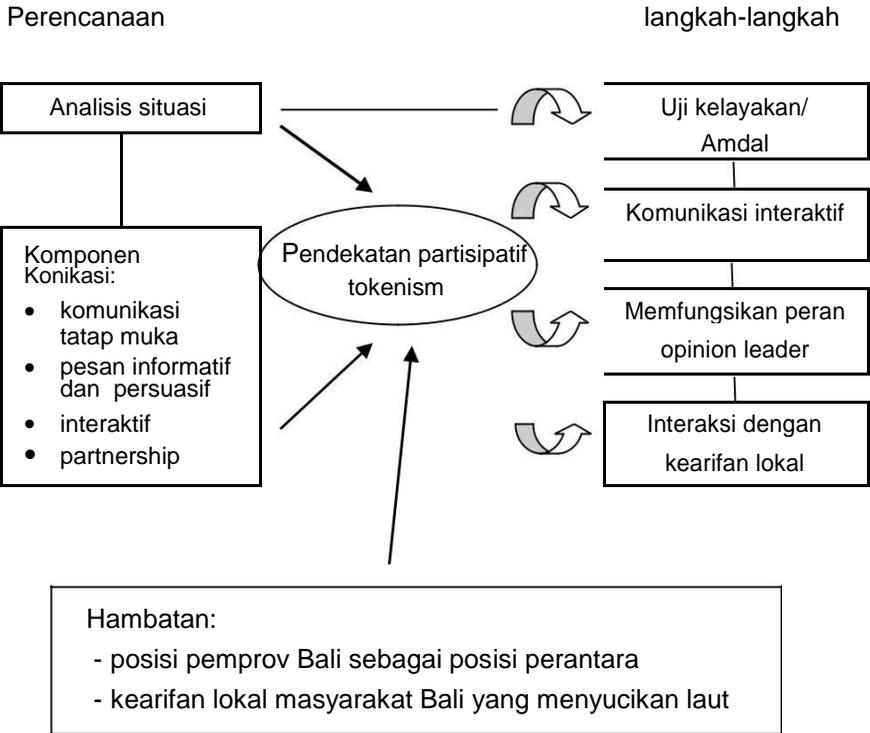
- d. Menganalisis pada komponen komunikasi, baik dari sumber, pesa, saluran/media, *receiver*, serta *feedback*
- e. Melakukan analisis terhadap pengembangan komunikasi, apakah komunikasi mengalami kemajuan dalam hal jumlah (tiras), sebaran, atau peringkat dalam tayangannya.
- f. Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan kebijaksanaan komunikasi yang ada.

Perencanaan yang dilakukan oleh pemprov Bali dalam penyelesaian konflik reklamasi teluk Benoa Bali mencakup studi kelayakan bersama dunia akademisi. Analisis tentang sumber daya komunikasi sebagaimana yang dimaksud Cangara di atas menjelaskan bahwa perlunya melihat komponen-komponen komunikasi mulai dari komunikator, media, pesan sampai dengan penerima. Dalam perspektif sumber daya komunikasi atau komunikator, pemprov menetapkan bahwa komunikator yang sebenarnya adalah pemerintah pusat berdasarkan munculnya perpres 51 tahun 2014. Hal ini terlihat dari pernyataan Gubernur untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan jadi tidaknya reklamasi kepada pemerintah pusat. Dalam analisis media, pemprov lebih banyak menggunakan media tatap muka dalam kelompok besar atau komunikasi publik. Dengan dibukanya forum simakrama, diharapkan keluhan masyarakat dapat tersalurkan.

Dalam hal analisis komunikasi, pemprov menyatakan bahwa para anggota masyarakat yang menolak kebijakan reklamasi adalah partner yang harus terus digandeng dan ditanggapi dalam komunikasinya. Dengan demikian pemprov merasa bahwa dirinya menjadi bagian yang penting dalam menentukan sebuah kebijakan.

Dengan demikian model strategi komunikasi pemprov Bali dalam penyelesaian konflik reklamasi teluk Benoa dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

**Bagan 1: Strategi Komunikasi Pemprov Bali**



**LATIHAN**

1. Jelaskan keterkaitan antara pesan komunikasi berbasis kearifan lokal dengan keberhasilan strategi komunikasi pemerintah Provinsi Bali terkait penolakan reklamasi Teluk Benoa Bali?
2. Buatlah analisis tentang efektifitas strategi komunikasi Pemprov Bali beserta tahapannya.

## BAB VI

### SIMPULAN DAN IMPLIKASI

**D**alam menjalankan strategi komunikasi dalam penyelesaian penolakan reklamasi teluk Benoa, pemprov Bali melakukan pendekatan partisipatif tokenism yang berarti adanya dialog antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan kebijakan namun peran penentuan keputusan tetap berada pada peran pemerintah, lalu disampaikan bersifat persuasif dan informatif. Pemprov melakukan perencanaan komunikasi berupa analisis situasi/ amdal yang dilakukan dengan beberapa Perguruan tinggi di Indonesia. Namun hasil survey dari dunia akademisi menyatakan bahwa Teluk Benoa tidak layak untuk direklamasi karena bisa mengganggu ekologi. Adapun posisi pemprov Bali sebagai perantara dan bukan pengambil keputusan adalah faktor yang menghambat efektivitas strategi komunikasi selain keberadaan kearifan lokal. Beberapa tahapan yang dilakukan

oleh pemprov Bali dalam strateginya antara lain:

1. Membuka saluran komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat.

Hal ini dilakukan melalui simakrama, Forum Bali Bebas Bicara apa saja (FP3AS), forum kerukunan antar umat beragama, dan paguyuban-paguyuban daerah.

2. Memfungsikan peran opinion leader

Mereka adalah para kelihan adat di bali/pimpinan masyarakat adat yang dipilih karena tingkat partisipasi yang lebih besar dalam kemasyarakatan dan kemampuan empati yang besar.

### 3. Berinteraksi dengan kearifan lokal

Beberapa kearifan lokal Bali ternyata memberi peran yang cukup signifikan bagi harmonisasi. Beberapa bentuk kearifan lokal yang mengarah pada keharmonisan antara lain: *Pertama*, pakaian “udeng” dengan filosofi pakaian adat, mereka mengadakan suatu gerakan penolakan. Dengan gaya adat seperti itu sejak awal mereka ditekankan untuk mengikatkan pikiran untuk fokus. *Kedua*, konsep Tri Hita Karana, masyarakat Bali sangat menghargai dan menghormati lingkungannya. Beberapa upacara-upacara adat tertentu mencerminkan hal bagaimana menghargai lingkungan. *Ketiga*, Tat Twam Asi Twam Asi itulah yang membuat masyarakat Bali bisa hidup satu tanah di Bali. *Keempat*, slogan *Sagilik-saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya, saling asah-asih dan asuh*. Bentuk-bentuk kearifan lokal Bali tersebut bersumber dari nilai-nilai agama Hindhu.

### 4. Melakukan studi kelayakan amdal dengan dunia akademisi

Studi kelayakan merupakan bagian dari perencanaan komunikasi yaitu analisis situasi. Namun demikian, amdal yang dilakukan kurang dalam kuantitas dan kualitas. Tidak lebih dari 10 amdal yang baru dijalankan oleh pemerintah. Padahal ketika berkaca dari Jepang, amdal dilakukan sampai ratusan penelitian kelayakan sehingga hasilnya menjadi sangat maksimal.

- Implikasi

- a. Diharapkan pemerintah pusat turun langsung untuk berkomunikasi dengan masyarakat adat Bali dan bertindak tegas tentang keputusan yang akan diambil.

- b. Pemerintah membuat perencanaan yang jelas dan matang termasuk *time scheduling* sehingga persoalan tidak berlarut-larut.
- c. Kajian tentang amdal sebagai studi kelayakan diperbanyak lagi sampai mencapai titik jenuh.
- d. Menggunakan tenaga ahli yang teruji dengan skala internasional , sebagaimana yang telah dilakukan dalam reklamasi Dubai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Wasilah, 2009, *Ednopedagogis*, Bandung: Kiblat
- Arifin, Anwar. 1994. *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*. Bandung: Armico
- Berger Charles 2006, *Uncertainty Reduction Theory*, dalam Griffin, EM, *A First Look At Communication*, Edisi 6.mc Graw-Hill
- Cangara, Hafied. 2013. *Perencanaan dan Strategi komunikasi*. Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fajar, M, 2009, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Liliweri, Alo, 2001, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mardikanto Totok, 1993, *Strategi Komunikasi Pembangunan*, Jakarta: Balai pustaka
- Nurudin, 2010, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Radja grafindo Persada, Jakarta
- Putra, I Dewa Ghede Mahendra. (2017). *Bali Mandara*, Denpasar: Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
- Ruslan, Rusadi, 2002, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, Jakarta: PT Rajawali Pers
- Wiana, I Ketut. (2004). *Menuju Bali Jagadhita: Tri Hita Karana Sehari-Hari Dalam Bali*, Denpasar: Aneka Perpektif.

### **Jurnal :**

- Kunto RA, dkk, 2010, *Proses Difusi Teknologi Konservasi lahan Kering melalui Pemuka pendapat (opinion Leader) di Kabupaten Bantul*, Jurnal agritext, no 28, Desember 2010
- Haryono, Puji. 2001. *Proses Perencanaan Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karang Anyar*, diakses dari Jurnal penyuluhan Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat
- Hidayati, Deny, 2016, *Memudarnya Nikai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*, diakses dari Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 11 No. 1 Juni 2016

### **Internet:**

kompas. com 19 Agustus 2018

<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/305/Reklamasikoma-Sebuah-Alternatif-Atasi-Alih-Fungsi-Lahan/>diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018 pukul 12.44 wib.

<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/302/Tim-Hukum-Gubernur-Dalami-Hasil-Diskusi-Reklamasi-Teluk-Benoa/> diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018 pukul 12.47 wib.

<http://www.baliprov.go.id/v1/topographi>, akses tanggal 30-6-2018, pukul 11: 42 WIB.

<http://www.baliprov.go.id/v1/agamaadatbudaya>, akses tanggal 30-6-2018, pukul 11: 40 WIB

trtb.pemkomedan.go.id, akses Maret 2017 liputan 6.com, 6 April 2016

suara.com, 4 Februari 2016

www.bbc.com, akses Februari 2017

www.forbali.org, akses Februari 2017

<http://www.walhibali.org/category/tolak-reklamasi-teluk-benoa>)  
(<http://news.liputan6.com/read/2217360/dprd-bali-izinkan-reklamasi-teluk-benoa-asalkan>, akses Januari 2017).

(<http://www.tribunnews.com/regional/2016/07/26/susi-jelaskan-kenapa-izin-lokasi-reklamasi-teluk-benoa-diperpanjang>).

(<http://www.mongabay.co.id/2013/09/03/kajian-universitas-udayana-reklamasi-teluk-benoa-tidak-layak-diteruskan/>)

(<https://m.tempco.co/read/news/2016/03/13/206753147/its-tolak-tawaran-kajian-reklamasi-teluk-benoa>, akses Pebruari 2017).

(<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/3343>  
akses tanggal 8 April 2017 ).

(<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569114000052>, Ocean & Coastal Management vol. 92 (2014) 65-73, akses tanggal 9 April 2017) .

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/2706/Terkait-Reklamasi-Telok-Benoa--dan-Angkutan-Umum-Berbasis-Onlinekoma--Pastika-Tegaskan-Tunggu-Keputusan-Pusat/Diakses> pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/2573/Gubernur-Pastika-Sayangkan-Aksi-Penurunan-Bendera-Merah-Putih-saat-Demonstrasi-Tolak-Reklamasi/Diakses> pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/579/KOMNAS-HAM-SIAP-MEDIASI-MASALAH->

P2B-DAN-REKLAMASI/Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

(<http://birohumas.baliprov.go.id/index.php/artikel-detail/53/REKLAMASI-TELUK-BENOA-UNTUK-MASA-DEPAN-BALI/>, akses 20 Juni 2018)

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/301/Dewan-Minta-Kajian-Reklamasi-Teluk-Benoa-Dilanjutkan/>Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

(<http://www.phribali.or.id/general/simakrama-gubernur-bali-prospek-pariwisata-bali.htm>, akses 20 Mei 2018)

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/300/Gubernur-Apresiasi-Saran-dan-Masukan-Terkait-Rencana-Reklamasi-Teluk-Benoa/>Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018 pukul 13.00 wib).

(<http://www.birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/297/Gubernur-Undang-Masyarakat-Bicara-Soal-Reklamasi-Tanjung-Benoa/>Diakses pada: Sabtu, 20 Januari 2018)

(<http://www.kemendagri.go.id/news/2017/12/31/gubernur-bali-gelar-simakrama-evaluasi-akhir-tahun>)

(<https://www.beritabali.com/read/2017/05/24/201705240008/Simakrama-Gubernur-Digelar-Minggu-Ini-Angkat-Tema-34Alih-Fungsi-Lahan-dan-Solusinya34.html>)

(Sumber: <http://youtube> BP3AS 27 Maret 2016-Mangku Wayan Suteja, akses tanggal 22 September 2018)

(<https://www.instagram.com/protokolbali/> akses 26 September 2018)

forbali.org, akses 28 Agustus 2018)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2014.

CNN Indonesia, 16 September 2016



**LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

---

No.121, 2014014      SERBAGITA. Kawasan Perkotaan.  
Tata Ruang. Perubahan.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN  
2014 TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN  
2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN DENGAN RAHMAT  
TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan kebijakan strategis nasional dan dinamika internal di Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan, khususnya terkait pemanfaatan ruang di Kawasan Teluk Benoa, sehingga perlu dilakukan revitalisasi;
- b. bahwa Kawasan Teluk Benoa dapat dikembangkan sebagai kawasan yang potensial guna pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, serta keberadaan prasarana dan sarana infrastruktur di Kawasan Teluk Benoa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 55 ayat (3) huruf a dan ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 55

- (1) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dengan tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi meliputi:
  - a. kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan, maupun di perairan; dan
  - b. kawasan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Taman hutan raya meliputi kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
  - b. Taman wisata alam meliputi kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

- (3) Zona L3 yang merupakan kawasan pelestarian alam di Kawasan Perkotaan Sarbagita ditetapkan di:
- a. Taman Hutan Raya Ngurah Rai, yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian wilayah Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan
  - b. Taman Wisata Alam Sangeh, dengan luas 13 (tiga belas) hektar, yang berada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.
- (4) Zona L3 yang merupakan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kawasan yang memiliki ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; dan
  - b. terdiri atas zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan/atau zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
- (5) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. kawasan konservasi pulau kecil meliputi sebagian Pulau Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Pulau Pudut, di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
  - b. kawasan konservasi perairan di perairan Kawasan Sanur di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagian perairan Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, perairan Kawasan Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan perairan Kawasan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

- c. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau atau mangrove dan kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
  - d. kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan perlindungan terumbu karang, di kawasan pesisir Sanur di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagian Pulau Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Tuban dan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
  - e. kawasan konservasi maritim, berupa permukiman nelayan, di Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
  - f. kawasan Jimbaran dan kawasan Kedonganan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung; dan
  - g. kawasan konservasi pada kawasan pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial-budaya dan agama di seluruh pantai tempat penyelenggaraan upacara keagamaan (melasti) dan kawasan laut di sekitarnya.
- (6) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi budaya bangsa, dan kepentingan ilmu pengetahuan antara lain berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen.
- (7) Zona L3 yang merupakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan secara menyebar di Kawasan Perkotaan Sarbagita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

Kawasan budi daya dikelompokkan ke dalam zona budi daya, terdiri atas zona budi daya 1 (Zona B1), zona budi daya 2 (Zona B2), zona budi daya 3 (Zona B3), zona budi daya 4 (Zona B4), zona budi daya 5 (Zona B5), zona budi daya 6 (Zona B6), zona budi daya 7 (Zona B7), dan zona penyangga (Zona P);

3. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 63A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63A

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan zona perairan pesisir dengan karakteristik kawasan teluk yang berhadapan dengan Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 di Kawasan Teluk Benoa, yang menjaga fungsi Zona L3, Zona B1, Zona B2, dan Zona B3 sebagai kawasan pemanfaatan umum yang potensial untuk kegiatan kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama.
- (2) Zona P sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan di perairan pesisir Teluk Benoa yang berada di sebagian Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- (3) Zona P yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai, selanjutnya disebut L3/P di sebagian Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, termasuk Pulau Pudut.
- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 81 ayat (3) diubah sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
  - b. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya.
- (2) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Arahan peraturan zonasi untuk Zona L2; dan
  - b. Arahan peraturan zonasi untuk Zona L3.
- (3) Arahan peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B1;
  - b. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B2;
  - c. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B3;
  - d. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B4;
  - e. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B5;
  - f. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B6;
  - g. Arahan peraturan zonasi untuk Zona B7; dan
  - h. Arahan peraturan zonasi untuk Zona P.
5. Diantara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 101A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101A

Arahan peraturan zonasi untuk Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf h terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian fungsi Taman Hutan Raya dan ekosistem mangrove, kelautan, perikanan, kepelabuhanan, transportasi, pariwisata, pengembangan ekonomi, permukiman, sosial budaya, dan agama;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi Zona P;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan untuk tempat pembuangan limbah dan kegiatan yang mengganggu fungsi Zona P;
- d. Penerapan ketentuan di Zona P meliputi:
  1. kegiatan dalam Zona P yang berhadapan dengan Zona L3 dilakukan dengan menjaga fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan ekosistem mangrove serta pendalaman bagian-bagian tertentu dari Teluk;
  2. penyediaan aksesibilitas di dalam kawasan teluk, termasuk ketersediaan alur pelayaran;
  3. pemanfaatan ruang dengan tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem Daerah Aliran Sungai;
  4. pemanfaatan ruang dilakukan sekurang-kurangnya berjarak 100 (seratus) meter dari Zona L3;
  5. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana induk pengembangan Pelabuhan Internasional Benoa, Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Jalan Bebas Hambatan Serangan-Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa, dan fungsi jaringan energi;
  6. kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dapat dilakukan melalui kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi paling luas 700 (tujuh ratus) hektar dari Kawasan Teluk Benoa; dan
  7. pemanfaatan ruang untuk mitigasi bencana.
- e. kegiatan sebagaimana dimaksud huruf d angka 6 melalui penyelenggaraan reklamasi dilakukan dengan:

1. penyediaan ruang terbuka hijau paling kurang 40% dari total luasan pulau hasil reklamasi;
  2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pengembangan sentra ekonomi berbasis lingkungan dan budaya Bali;
  4. pengaturan tata letak, bentuk, dan luasan, ditentukan berdasarkan hasil kajian kelayakan lingkungan;
  5. aksesibilitas di dalam kawasan teluk, termasuk ketersediaan alur pelayaran dan alur aliran air antar pulau hasil reklamasi dengan memperhatikan karakteristik lingkungan, kedalaman paling kurang 2 (dua) meter dari titik surut terendah;
  6. perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi dalam Zona P dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IXA, yang memuat 1 (satu) Pasal diantara Pasal 120 dan Pasal 121 yakni Pasal 120A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120A

- (1) Dalam Zona P dapat dikembangkan sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana: jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan guna mendukung pengembangan dan fungsi Zona P yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sistem jaringan prasarana: jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan dapat dikembangkan di Kawasan Perkotaan Sarbagita guna mendukung pengembangan dan fungsi Zona P yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan sistem permukiman dan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan sistem jaringan prasarana ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.

7. Ketentuan Pasal 122 ayat (2) diubah sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 122

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;
  - d. pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Sarbagita yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan
    2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
  - e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang berikut peraturan zonasi termasuk ren-

cana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan Sarbagita belum ditetapkan dan/atau disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini, digunakan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang.

8. Bagian Keterangan Gambar, Bagian Nomor II-97-2-25-2, dan Bagian Nomor II-97-2-25-4 Peta Pola Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011, diubah sehingga Peta Pola Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita menjadi sebagaimana Lampiran I Peraturan Presiden ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
9. Indikasi Program Utama Lima Tahunan Arah Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagaimana termuat dalam Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011, diubah dengan menambahkan indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan Perwujudan Pola Ruang untuk Zona P sehingga Indikasi Program Utama Lima Tahunan Arah Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

## Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

## BIODATA PENULIS

### A. Identitas Diri

	1. Nama Lengkap (dengan gelar)	Nur Sofyan, S.I.Kom., M.I.Kom
	2. Jenis Kelamin	Laki-Laki
	3. Jabatan Fungsional	-
	4. NIP/NIK/Identitas lainnya	19890704201704 163 163
5. NIDN		0504078901
6. Tempat dan Tanggal Lahir		Temanggung, 4 Juli 1989
7. E-mail		Nursofyan@umy.ac.id
8. Nomor Telepon/HP		081225491979
9. Alamat Kantor		Jl. Lingkar Barat, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55813
10. Nomor Telepon/Faks		0274-387656/0274- 387646
11. Mata Kuliah yang Diampu		1. Komunikasi Politik
		2. Pendidikan Kewarga Negaraan
		3. Retorika
		4. Riset Publik Relations

### . Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	UMY Yogyakarta	UNDIP Semarang
Bidang Ilmu	Komunikasi	Komunikasi
Tahun Masuk-Lulus	2007-2012	2013-2016

### C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume / Nomor / Tahun
-----	----------------------	-------------	---------------------------

1	Bahasa Sebagai Simbolisasi Mempertahankan Kekuasaan	Jurnal Interaksi	Volume 4 No 1 Mei 2012, halaman 47-60
---	---	------------------	---------------------------------------

	1. Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Suciati, S.Sos, M.Si
	2. Jenis Kelamin	Perempuan
	3. Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
	4. NIP/NIK/Identitas lainnya	19720413199702163054
	5. NIDN	0513047201
6. Tempat dan Tanggal Lahir	Salatiga, 13 April 1972	
7. E-mail	Suciati@umy.ac.id	
8. Nomor Telepon/HP	08156732855	
9. Alamat Kantor	Jl. Lingkar Barat, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55813	
10. Nomor Telepon/Faks		
	0274-387656/0274-387646	
11. Mata Kuliah yang Diampu	1. Psikologi Komunikasi	
	2. Metode penelitian kuantitatif	
	3. Komunikasi interpersonal	
	4. Teori komunikasi	

### A. Riwayat Pendidik

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNDIP Semarang	UNS Surakarta	UMY Yogyakarta
Bidang Ilmu	Komunikasi	Komunikasi	Psikologi

			Islam
Tahun Masuk-Lulus	1990-1995	2003-2005	2011-2014

### C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian
1	2009	Strategi Komunikasi KPID DIY dalam Mengawasi Isi Siaran TV Lokal di Yogyakarta
2	2014	Strategi Revitalisasi Peran Konsil Keagamaan dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
3	2012	Kohesi Anggota Keluarga dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis : Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul
4	2016	Managemen Konflik Pasangan Pernikahan Dini: Studi kasus di Yogyakarta

### D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume / Nomor / Tahun
1	Strategi Komunikasi KPID DIY dalam Menagawasi Siaran Televisi Lokal	Jurnal Sosial dan Politik	Volume 19 No 1 Februari 2010, halaman 59-74
2	Pentingnya Karakter Komunikasi dalam Rumah Tangga	Jurnal Komunikator	Volume 4 No 1 Mei 2012, halaman 47-60
3	Kohesivitas Suami Istri dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga	Jurnal Komunikasi Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom)	Volume 2 No. 1 Juli 2013, halaman 25-39

4	<i>The cohesiveness of Moslem Pangestu members in Salatiga, Central Java</i>	<i>Jurnal of Islamic Studi : Al Jamiah</i>	Volume 52, no. 1 (2014) halaman 85-99
---	--	--	---------------------------------------

#### **E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Komunikasi Interpersonal Sebuah Tinjauan psikologis dan Perspektif Islam	2015	302	Buku Litera Yogyakarta
2	Komunikasi Transendental Implementasi Komunikasi Islami dalam Lingkup Praktek dan Keilmuan	2013	280	Lingkar Media Yogyakarta
3	Memahami Kohesivitas Kelompok (Studi kasus Kohesivitas pengikut Pangestu Di Salatiga)	2015	295	Lingkar Media Yogyakarta
4	Psikologi Komunikasi	2014	308	Litera Yogyakarta
5	Teori Komunikasi dalam Multi Perspektif	2017	240	Litera Yogyakarta
6	Identifikasi Masalah Penelitian dalam Pendekatan Kuantitatif	2018	300	Litera Yogyakarta

## GLOSARIUM

### **Bali Mandara :**

Gubernur Bali menjelaskan arti Bali Mandara berarti Aman, Damai, Sejahtera dimaknai sebagai berikut: Bali yang maju adalah Bali yang dinamis, yang terus bergerak dan maju sambil menjunjung tinggi kekudusan dan ketulusan demi dharma, masih "metaksu" yang terus-menerus meningkatkan kualitasnya sebagai daerah yang dapat diandalkan, karismatik dan tujuan wisata religius. Advanced Bali adalah Bali modern sesuai dengan ukuran dan tuntutan nilai-nilai universal yang tidak menyimpang dari nilai-nilai agama Hindu (Bali) dan adat istiadat Bali. Bali Aman, adalah Bali yang "dabdab" secara teratur sekala niskala, memiliki keseimbangan antara korelasi antara kebutuhan manusia dengan manusia lain, manusia dengan lingkungan alaminya, dan manusia dengan Tuhannya, sesuai dengan konsep "Tri Hita Karana. Bali adalah kedamaian, yaitu Bali, yang diselimuti oleh suasana yang sejuk, lahir secara fisik dan selalu dalam kondisi yang aman dan kondusif. Bali yang damai adalah Bali yang menggambarkan keberadaan masyarakat Bali, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan yang kental dengan suasana "briyang-briyung, pakede pakenyem". Ini adalah indikator optimisme masyarakat dalam melihat masa depan yang menjanjikan. Bali makmur, yaitu sukerta sekala niskala, sebagai akumulasi kemajuan, keamanan, dan perdamaian yang diperoleh. Kesejahteraan adalah akhirnya hasil yang diharapkan oleh pemerintah provinsi Bali dalam konsep pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.

**ForBali:**

Forum Rakyat Bali tolak Reklamasi yang diketuai oleh Wayan Gendo Suardana

**Kelihan adat:**

Pemimpin desa adat di Bali dimana mereka yang terpilih adalah siapa saja yang memiliki kepribadian yang baik dan bijaksana dengan demikian ketika beliau ngomong akan didengarkan oleh rakyatnya.

**Kearifan lokal:**

merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lo-kal (*local wisdom*) biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut.

**Management komunikasi:**

bagaimana individu atau manusia mengelola proses komunikasi melalui penyusunan kerangka makna dalam hubungannya dengan orang lain dalam berbagai lingkup komunikasi dengan mengoptimalkan sumber daya komunikasi dan teknologi yang ada.

**Pendekatan non partisipasi yang berbentuk manipulasi dan terapi:**

Tingkatan partisipasi dimana masyarakat tidak diikutsertakan dalam perencanaan dan pengarahannya program, sedangkan pemerintah memiliki peran yang aktif.

### **Pendekatan Tokenism (Petanda/Simbol)**

Tingkatan yang meliputi *information consultation and placation*. Hal ini diartikan masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang aktif dengan berdialog, namun pengambilan keijakan ditetapkan pada peran pemerintah. Bentuk komunikasi adalah komunikasi satu arah dan didominasi oleh pemerintah.

### **Pendekatan Citizen power:**

Tingkatan partisipasi meliputi *partnership; delegated control; dan citizen control*. *Partnership* diartikan sebagai kesejajaran antara level pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan atau perumusan kebijakan terkait kebutuhan pembangunan masyarakat. *Delegated control* diartikan sebagai pemerintah mendelegasikan kewenangannya kepada masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhannya.

### **Perencanaan komunikasi:**

suatu proses yang menetapkan kemana kita harus pergi dengan mengidentifikasi syarat apa yang harus dipenuhi untuk sampai ketempat tersebut dengan cara yang paling efisien dan efektif, atau dengan kata lain perencanaan sebagai penetapan spesifikasi tujuan yang ingin dicapai termasuk dengan cara-cara apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

### **PB3AS:**

Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja yang diadakan **setiap minggu pagi**. Masyarakat boleh menyampaikan aspirasinya, kritiknya terhadap apapun itu baik itu terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan. Masyarakat juga boleh secara terbuka ngomong di podium itu yang dilakukan hari minggu pagi.

**Prinsip partisipatif:**

sebuah rencana yang ideal harus dapat mendorong terciptanya partisipatif, baik dari pengelola maupun *stakeholder* yang menjadi target sasaran perencanaan tersebut.

**Prinsip kesinambungan:**

sebuah perencanaan dibuat tidak hanya untuk sesaat, melainkan harus mempertimbangkan proses kelanjutannya secara berke-sinambungan, artinya rencana harus memiliki perhitungan bahwa perencanaan ini memiliki kelanjutan setelah dilakukan untuk jangka waktu tertentu.

**Prinsip holistik:**

menyeluruh dan tidak disusun berdasarkan unit-unit. Perencanaan tidak hanya dilihat dari satu sisi tetapi juga harus dilihat dari aspek dan keutuhan konsep secara keseluruhan.

**Reklamasi :**

pemanfaatan kawasan baru tersebut bisa diwujudkan sebagai kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pela-buhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi kawasan wisata terpadu.

**Strategi komunikasi:**

Perencanaan (*planning*) komunikasi dan manajemen (*manage-ment*) komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak

berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

### **Simakrama:**

Kegiatan dialog antara masyarakat dan pemerintah provinsi Bali. Gubernur akan bertemu langsung dengan masyarakat secara terbuka. Seluruh elemen masyarakat diundang setiap bulan sekali diakhir bulan hari sabtu

### **Tradisi Mekare-kare:**

Tradisi yang digelar digelar saat ngusaba kapat (Sasih Sambah). Ritual ini dilakukan bertujuan untuk menghormati Dewa Perang atau Dewa Indra yang merupakan Dewa tertinggi bagi umat Hindu di Tenganan. Adapun ritualnya seperti berperang satu lawan satu dengan masing-masing orang memegang pandan berduri sebagai senjata.

### **Tradisi Mekotek:**

tradisi yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali tepatnya saat peringatan Hari Raya Kuningan yang bertujuan untuk tolak bala, melindungi dari serangan penyakit dan juga memohon keselamatan kepada sang pencipta.

### **Tri Hita Karana:**

Kearifan lokal yang fokus pada keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya, serta hubungan manusia dengan tuhan.

## INDEKS

### B

Bali mandara:20,29,30,31,32,  
34,35,36,37,39,40,41,42,88

### F

ForBali:4,6,7,115,150

### K

Kelihian adat:96,136,137,144  
Kearifan lokal:23,92,95,104,  
116,117,119,121,134,137,13  
9,140,144,145,149,157

### M

Management komunikasi:13,  
16,17,18

### P

PB3AS:68,77,90,95  
Pendekatan non partisipasi  
yang berbentuk manipulasi  
dan terapi:158  
Pendekatan *tokenism*  
(petanda/simbol):126,127  
Pendekatan *Citizen*  
*power*:158

Perencanaan komunikasi:13,  
14,15,141,145,158

Prinsip partisipatif:14,98,  
121,122,158

Prinsip kesinambungan:14,  
121,122,158

Prinsip holistik:15,121,  
122,159

### R

Reklamasi :1-11,26,27,28,  
29,42-48,51-70,73-88,91-  
99,101-159

### S

Strategi komunikasi:11,12,  
13,16,51,68,114,117,120,122,  
129,131,144,148,152

### T

Tradisi Mekare-kare:22,23  
Tradisi Mekotek:22,23  
Tri Hita Karana:6,23,24,  
25,28,29,3,12,103,125,139,14  
0,145,148

